BADAN POM

BALAI POM DI KENDARI





Disusun oleh

TIM SAKIP
BPOM Kendari

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

kendari.pom.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

BALAI POM DI KENDARI

Pembina

Kepala Balai POM di Kendari

Ketua

Nurhadia, S.Si

Sekretaris

Apriyani Cahyaning, S.Ak

Anggota

Dra. Hasnah Nur, Apt. MPH

Dra. Mirnawati Purba, Apt.

Wahyuddin Muis, S.Si, Apt., M.Sc.

Sienny, S.Si, Apt.

Jalidun, S.Si, Apt., MPPM

Ratna Palupi Fajarini, S.Farm., Apt

Dewi Amni Idrus, S.Si, Apt

Suharni, S.Si., Apt

Yens Roberto Stefanus Welley, S.T

Fauzan Akbar Gusran, S.Si

Uswatun Hasana, S.Farm., Apt.

Nurlihayati Karim, A.MF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari (BPOM di Kendari) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun secara periodik setiap tahun dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM RI dalam rangka mencapai misi, melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra BPOM di Kendari Tahun 2025-2029, Pengukuran Capaian Kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2025, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target jangka menengah, serta evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari pada tahun selanjutnya.

Kendari, 27 Oktober 2026

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kendari,

Andi Amirah Nilawati, S.Si., Apt., M.HSM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kendari kepada publik sebagai pemberi mandat mengenai keberhasilan Balai POM di Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama periode Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai selama periode 2025-2029 adalah:

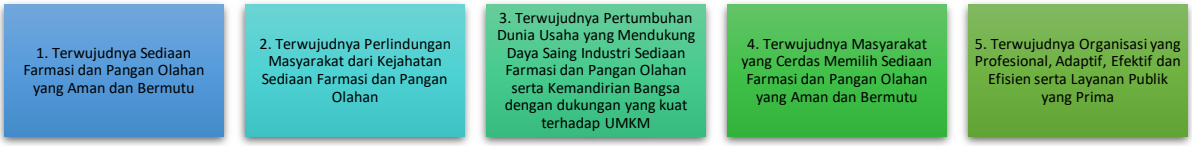

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai POM di Kendari dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Kendari Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang harus dicapai oleh Balai POM di Kendari.



Capaian sasaran kegiatan Balai POM di Kendari pada Tahun 2025 menunjukkan, dari delapan sasaran kegiatan, terdapat lima sasaran kegiatan dengan predikat "**Baik"**; dan tiga sasaran kegiatan dengan predikat "**Cukup"**. Hasil capaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Capaian pada sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 96,03% dengan kriteria **Baik**;
- Capaian pada sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” sebesar 90,00% dengan kriteria **Cukup;**
- Capaian pada sasaran kegiatan ketiga “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” sebesar 90,50% dengan kriteria **Baik**;
- Capaian pada sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan 90% dengan kriteria **Cukup**;
- Capaian pada sasaran kegiatan kelima “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 99% dengan kriteria **Baik**;
- Capaian indikator pada sasaran kegatan keenam “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 95,22% dengan kriteria **Baik**;
- Capaian pada sasaran kegiatan ketujuh “Layanan Publik yang prima” sebesar 95,09% dengan kriteria **Baik**; dan
- Capaian pada sasaran kegiatan kedelapan “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” sebesar 86,45% dengan kriteria **Cukup.**

Balai POM di Kendari didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 (Pagu awal) sebesar Rp.23.993.072.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2025 masih terdapat kebijakan efisiensi dari periode Februari 2025 sehingga Pagu diblokir menjadi sebesar Rp.14.862.040.000,00.

Pada Tahun 2025 BPOM di Kendari melaksanakan 23 (dua puluh tiga) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran kegiatan. Dua puluh satu RO menunjukkan penggunaan sumberdaya yang efisien; dan dua RO menunjukkan penggunaan sumerdaya tidak efisien. Progres Capaian Rincian Output (PCRO) berkisar antara 0,50-338,69% dengan input anggaran sebesar 94,67-100%; yang menunjukkan bahwa BPOM di Kendari telah melakukan pengawalan atas pencapaian target RO pada Tahun 2025.

Nilai Predikat Organisasi Balai POM di Kendari pada Tahun 2025 sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

93,61% dengan predikat **"Baik".** Balai POM di Kendari telah mencapai kinerja enam sasaran kegiatan dengan predikat Baik (90-100%); dan dua sasaran kegiatan dengan predikat Cukup (60-90%). Pada Tahun 2025 terdapat tiga indikator kinerja yang memperoleh predikat baik, namun belum mencapai target kinerjanya, yaitu indikator 1] Nilai Pembangunan ZI; 2] Nilai AKIP; dan 3] Indeks Manajemen Risiko. Balai POM di Kendari berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara terus menerus untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

BPOM di Kendari belum mencapai target Nilai Pembangunan Zona Integritas disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan seluruh komponen pembangunan ZI, baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil. Kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian nilai antara lain belum meratanya pemahaman pegawai terhadap pembangunan ZI, belum optimalnya implementasi program perubahan secara konsisten, serta belum lengkapnya dokumentasi dan bukti dukung atas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, efektivitas inovasi pelayanan, pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi, dan pengukuran dampak program terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik masih perlu diperkuat. BPOM di Kendari perlu melaksanakan pemantauan berkala terhadap kemajuan pembangunan ZI melalui mekanisme evaluasi internal dan pengendalian pemenuhan indikator. Setiap potensi ketidaksesuaian terhadap target diidentifikasi sejak dini dan ditindaklanjuti melalui rencana mitigasi yang jelas. Selain itu, perlu dilakukan penguatan komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pegawai, integrasi program ZI ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan unit kerja, serta penyiapan bukti dukung secara berkelanjutan agar risiko penurunan nilai atau ketidaktercapaian target pada periode berikutnya dapat diminimalkan.

Pada Tahun 2025 target Nilai AKIP belum mencapai target; yang menunjukkan bahwa penerapan SAKIP pada BPOM di Kendari masih memerlukan penyempurnaan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target antara lain belum optimalnya keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan kegiatan yang dilaksanakan; belum maksimalnya pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan; serta belum konsistennya tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Selain itu, kualitas analisis atas capaian kinerja dan bukti yang menunjukkan hubungan antara penggunaan sumber daya dengan pencapaian hasil masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya perbaikan, BPOM di Kendari perlu mengintegrasikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengendalian kinerja ke dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi ketidaktercapaian target. Selain itu, perlu dipastikan bahwa hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga peningkatan nilai AKIP tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran organisasi.

Pada Tahun 2025 belum tercapainya target Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko masih memerlukan penguatan agar berjalan secara konsisten dan terintegrasi dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target antara lain belum optimalnya identifikasi dan analisis risiko pada seluruh proses bisnis, belum memadainya penetapan langkah mitigasi yang terukur, serta belum konsistennya pemantauan terhadap efektivitas pengendalian risiko. Selain itu, pemahaman dan keterlibatan pemilik risiko dalam mengelola risiko, kualitas dokumentasi manajemen risiko, serta pemanfaatan hasil pemantauan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan BPOM di Kendari diantaranya memperkuat penerapan manajemen risiko melalui pemantauan berkala atas risiko utama, efektivitas pengendalian, dan progres pelaksanaan mitigasi. Setiap perubahan kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran organisasi harus segera diidentifikasi dan diikuti dengan pemutakhiran daftar risiko serta penyesuaian rencana mitigasi. Selain itu, perlu ditetapkan mekanisme eskalasi untuk risiko dengan tingkat signifikansi tinggi, disertai pelaporan berkala kepada pimpinan dan evaluasi atas efektivitas tindakan pengendalian. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja, bukan sekadar pemenuhan administrasi atau dokumentasi.

Secara umum, belum tercapainya target pada ketiga indikator kinerja Tahun 2025 memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Meskipun memperoleh predikat baik, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Telah dilakukan penyempurnaan pada bagian 1] Ringkasan/Ikhtisar Eksekutif; dan 2] Metode Pengukuran pada LAKIP Tahun 2025 ini. Pada bagian Ringkasan/Ikhtisar Eksekutif dengan penyajian informasi yang diperkuat dengan uraian mengenai langkah perbaikan dan upaya antisipatif yang berpotensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menghambat pencapaian kinerja pada periode berikutnya terhadap indikator yang belum mencapai target Tahun 2025. Pada bagian Metode Pengukuran telah dilakukan penyempurnaan dengan memperjelas mekanisme pengukuran dan perhitungan capaian setiap indikator kinerja, termasuk penjelasan penanggung jawab pengumpulan data pendukung pengukuran kinerja tersebut. Melalui penyempurnaan pada LAKIP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas kinerja organisasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT

Pada Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari memperoleh beberapa prestasi diantaranya:



SDN 3 Bau-bau merupakan sekolah yang diintervensi oleh BPOM di Kendari; berhasil menjadi Juara III pada Lomba Sekolah dengan PJAS Aman Tingkat Nasional Kategori SD/MI Regional Timur pada Tahun 2025



BPOM di Kendari memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi tenggara 2025 Kategori Badan Publik Vertikal Tingakt Propinsi

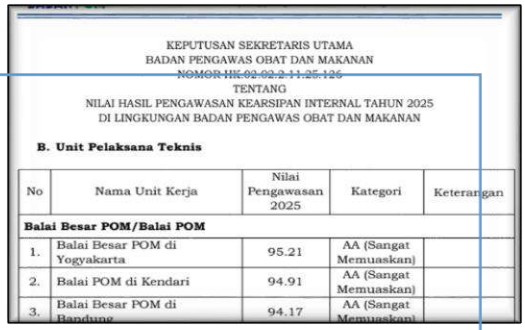

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.11.25.126
TENTANG
NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

B. Unit Pelaksana Teknis

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2025	Kategori	Keterangan
Balai Besar POM/Balai POM				
1.	Balai Besar POM di Yogyakarta	95.21	AA (Sangat Memuaskan)	
2.	Balai POM di Kendari	94.91	AA (Sangat Memuaskan)	
3.	Balai Besar POM di Bandung	94.17	AA (Sangat Memuaskan)	

Pada Tahun 2025 Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM di Kendari meraih peringkat kedua (predikat Sangat Memuaskan) Nasional di lingkup satker BPOM RI



BPOM di Kendari meraih penghargaan atas Pencapaian Gerakan Zero Retur SP2D Periode Semester I TA 2025



BPOM di Kendari meraih penghargaan sebagai satker dengan Penggunaam KKP terbaik III periode Triwulan I TA 2025 Lingkup KPPN Kendari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar Isi

TIM PENYUSUN ..... **I**

KATA PENGANTAR ..... **II**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **IV**

HIGHLIGHT ..... **IX**

DAFTAR ISI ..... **X**

DAFTAR GAMBAR ..... **XI**

DAFTAR TABEL ..... **XIV**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI 5
1.4 ISU STRATEGIS 8

BAB II **19**

PERENCANAAN KINERJA **19**

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029 19
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025 22
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025 23
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025 26
2.5 METODE PENGUKURAN 27

BAB III **34**

AKUNTABILITAS KINERJA **34**

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025 34
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 202
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 209
3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 213

BAB IV **227**

PENUTUP **227**

4.1 KESIMPULAN 227
4.2 SARAN 229

LAMPIRAN **230**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari 6
Gambar 2 Sebaran Pegawai BPOM di Kendari Tahun 2025 10
Gambar 3 Penduduk Sulawesi Tenggara 14
Gambar 4 Luas Wilayah Sulawesi Tenggara 14
Gambar 5 Visi dan Misi Badan POM RI 2025-2029 19
Gambar 6 Sasaran Kegiatan Balai POM di Kendari 2025-2029 21
Gambar 7 Kriteria Nilai Indikator Kinerja 29
Gambar 8 Kriteria Capaian Kinerja Tahunan dibandingkan Target Jangka Menengah Renstra 29
Gambar 9 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi 32
Gambar 10 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Tahun 2025 pada Aplikasi e-performance 34
Gambar 11 Capaian Sasaran Kegiatan BPOM di Kendari Tahun 2025 35
Gambar 12 Sasaran Kegiatan 1 40
Gambar 13 Perbandingan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara 45
Gambar 14 Perbandingan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan Balai setara 49
Gambar 15 Perbandingan Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara 53
Gambar 16 Perbandingan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 dengan Balai setara 58
Gambar 17 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara 62
Gambar 18 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025 dibandingkan Tahun sebelumnya 65
Gambar 19 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025 dengan Balai setara 67
Gambar 20 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara 72
Gambar 21 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara 76
Gambar 22 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara 82
Gambar 23 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara 86
Gambar 24 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara 92
Gambar 25 Komponen Nilai Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 BPOM di Kendari 95
Gambar 26 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan Balai setara 96
Gambar 27 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dengan Balai setara 101
Gambar 28 Nilai komponen pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai SKL Tahun 2025 104
Gambar 29 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 105
Gambar 30 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Balai setara 106
Gambar 31 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan Balai setara 111
Gambar 32 Sasaran Kegiatan 2 114
Gambar 33 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara 117
Gambar 34 Sasaran Kegiatan 3 121
Gambar 35 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 124
Gambar 36 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Balai setara 125
Gambar 37 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 130
Gambar 38 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dengan Balai setara 131
Gambar 39 Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 134
Gambar 40 Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dengan Balai setara 135
Gambar 41 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 138
Gambar 42 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dengan Balai setara 139
Gambar 43 Sasaran Kegiatan 4 141
Gambar 44 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan Balai setara 146
Gambar 45 Sasaran Kegiatan 5 149
Gambar 46 Capaian Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Kendari Tahun 2025 151
Gambar 47 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 151
Gambar 48 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Balai setara 152
Gambar 49 Sasaran Kegiatan 6 155
Gambar 50 Komponen Nilai Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 158
Gambar 51 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan Balai setara 159
Gambar 52 Sasaran Kegiatan 7 160
Gambar 53 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 162
Gambar 54 Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 dengan Balai setara 163
Gambar 55 Sasaran Kegiatan 8 167
Gambar 56 Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 170
Gambar 57 Trend Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari 171
Gambar 58 Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025 dengan Balai setara 172
Gambar 59 Nilai AKIP BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

.....182
Gambar 60 Nilai AKIP Tahun 2025 dengan Balai setara.....183
Gambar 61 Nilai AKIP BPOM di Kendari.....184
Gambar 62 Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari Tahun 2025 berdasarkan aplikasi e-Monev DJA.....189
Gambar 63 Nilai IKPA BPOM di Kendari Tahun 2025.....190
Gambar 64 Nilai EKA BPOM di Kendari Tahun 2025.....191
Gambar 65 Nilai Kinerja BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024.....191
Gambar 66 Detail Capaian NKA BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 192
Gambar 67 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dengan Balai setara.....192
Gambar 68 Detail Kinerja Capaian RO Tahun 2025 BPOM di Kendari.....195
Gambar 69 Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan Balai setara.....199
Gambar 70 Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari Tahun 2021-2025.....200
Gambar 71 Revisi DIPA dan POK Tahun 2025.....213
Gambar 72 Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada aplikasi spanint.kemenkeu.....214
Gambar 73 Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI.....214

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar Tabel

Tabel 1 Luas Gedung Balai POM di Kendari 12
Tabel 2 Tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Kendari Tahun 2025 22
Tabel 3 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025 24
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025 BPOM di Kendari . 26
Tabel 5 Hasil Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2025 35
Tabel 6 Hasil Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 39
Tabel 7 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 41
Tabel 8 Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan Target Tahun 2029 44
Tabel 9 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 46
Tabel 10 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 48
Tabel 11 Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dibandingkan Target Tahun 2029 49
Tabel 12 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 50
Tabel 13 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 51
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra 53
Tabel 15 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 54
Tabel 16 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 56
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 58
Tabel 18 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 59
Tabel 19 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 60
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 61
Tabel 21 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 63
Tabel 22 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025 65
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 ... 66
Tabel 24 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 68
Tabel 25 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 69
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 71
Tabel 27 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 73
Tabel 28 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 74
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 76
Tabel 30 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 77

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 31 Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 79
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 81
Tabel 33 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 83
Tabel 34 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 85
Tabel 35 Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 86
Tabel 36 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 87
Tabel 37 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 89
Tabel 38 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 91
Tabel 39 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 92
Tabel 40 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 94
Tabel 41 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 96
Tabel 42 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 98
Tabel 43 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR Tahun 2025 99
Tabel 44 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 100
Tabel 45 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 104
Tabel 46 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 106
Tabel 47 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 107
Tabel 48 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 109
Tabel 49 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 110
Tabel 50 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 112
Tabel 51 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 115
Tabel 52 Perbandingan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 116
Tabel 53 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 118
Tabel 54 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 122
Tabel 55 Kriteria Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 123
Tabel 56 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 124
Tabel 57 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 127
Tabel 58 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 129
Tabel 59 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 131

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 60 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 132
Tabel 61 Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 133
Tabel 62 Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 134
Tabel 63 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 136
Tabel 64 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 137
Tabel 65 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 139
Tabel 66 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 140
Tabel 67 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 144
Tabel 68 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 145
Tabel 69 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 148
Tabel 70 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 150
Tabel 71 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 152
Tabel 72 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 153
Tabel 73 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 157
Tabel 74 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan Target 2029 158
Tabel 75 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 160
Tabel 76 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 162
Tabel 77 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik 162
Tabel 78 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target 2029 163
Tabel 79 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 165
Tabel 80 Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025 169
Tabel 81 Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025 dengan Target 2029 171
Tabel 82 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 174
Tabel 83 Nilai AKIP Tahun 2025 181
Tabel 84 Nilai AKIP Tahun 2025 dengan Target 2029 183
Tabel 85 Matriks Rekomendasi Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2026 186
Tabel 86 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 189
Tabel 87 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dengan Target 2029 192
Tabel 88 Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 197
Tabel 89 Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan Target 2029 199
Tabel 90 Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 203
Tabel 91 Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2025 216
Tabel 92 Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan 218
Tabel 93 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan pada Tahun 2025 219

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM di Kendari menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket, postmarket,* dan penguatan penindakan terhadap pelanggaran dan kejahatan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP dan Keputusan Kepala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPOM Nomor 676/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Balai POM di Kendari diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Tahun 2025 Balai POM di Kendari dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam rangka mendukung daya saing nasional serta meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nomor 22 tahun 2020 dan diperbarui dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan diperbarui kembali dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya diperbarui kembali dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. UPT terdiri atas:

- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM
- Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM
- Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

1.2.1. PROFIL BALAI POM KENDARI

Balai POM di Kendari yang beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari, merupakan salah satu UPT Badan POM RI yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai POM di Kendari berkoordinasi dengan Balai POM di Kota Baubau dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2.2. KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai.

1.2.3. TUGAS

Berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai POM di Kendari sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.4. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Kendari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
8. Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
11. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan adanya Surat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperbarui dengan Surat Keputusan kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Balai POM di Kendari:

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

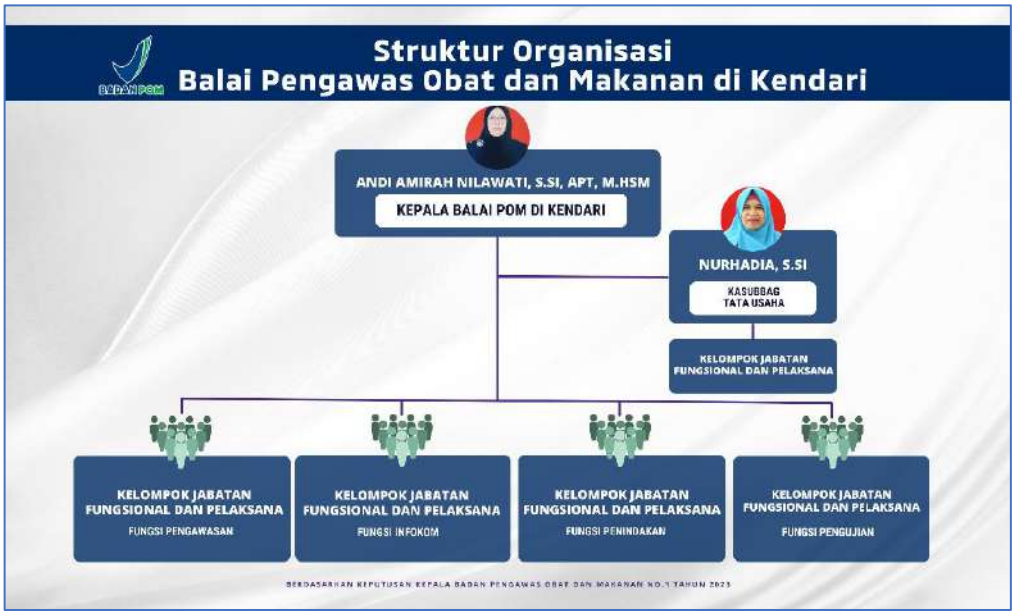

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

1) Fungsi Pengujian

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Adapun tugas nya adalah;

1. Penyusunan rencana dan program dan anggaran di substansi pengujian kimia Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
3. Pelaksanaan Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di substansi Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan.

2) Fungsi Pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Fungsi Pemeriksaan yang terdiri dari bagian Pemeriksaan dan bagian Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi, sarana distribusi Obat dan Makanan, sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Tugas Fungsi Pemeriksaan adalah;

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi, sarana distribusi Obat dan Makanan, sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (Sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.

3) Fungsi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Fungsi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan;

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan makanan.
b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
c. Pelaksanaan kerjasama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4) Fungsi Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Fungsi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Fungsi Penindakan melaksanakan;

a. Penyusunan rencana program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
b. Pelaksanaan cegah tangkal, inteligen, dan penyidikan terhadap pelanggaran, ketentuan peraturan perundang undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
c. Pelaksanaan pemantauan, peredaran Obat dan Makanan

5) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan SDM, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Sub Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai;

a. Penyusunan Rencana, program dan anggaran.
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu.
e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

1.4 ISU STRATEGIS

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Balai POM di Kendari sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan mutu produk Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengemban perannya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Melalui identifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan untuk digali dan permasalahan yang harus diatasi, Balai POM di Kendari dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan pelayanan publik dan terselenggaranya pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Aspek Internal

a) Sumber Daya Manusia.

Jumlah sumber daya manusia Balai POM di Kendari per 31 Desember 2025 sebanyak 81 orang ASN, terdiri atas 77 PNS dan 4 PPPK. Berikut sebaran jumlah pegawai Balai POM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

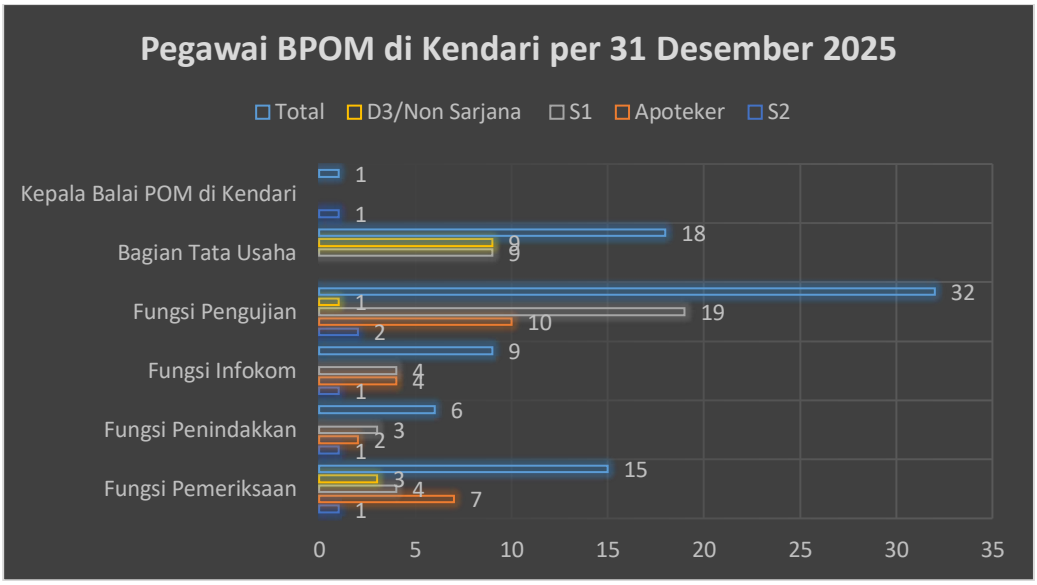

Gambar 2 Sebaran Pegawai BPOM di Kendari Tahun 2025

Dari jumlah SDM diatas BPOM di Kendari masih membutuhkan pegawai berdasarkan hasil ABK dalam menunjang pengawasan obat dan makanan. Dalam era globalisasi industri 5.0 diperlukan kompetensi SDM Balai POM di Kendari yang menguasai teknologi informasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan serta pelayanan publik secara online.

b) Regulasi dan Standar di Bidang Obat dan Makanan

Pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara telah didukung dengan regulasi yang kuat agar berjalan secara efektif dan optimal. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM, diantaranya meliputi:

- ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- ✓ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya;
- ✓ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.

c) Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaaran Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Komitmen tinggi Balai POM di Kendari untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, ditunjang oleh beberapa kekuatan internal diantaranya:

- SDM dengan latar belakang multi disiplin dan komitmen BPOM di Kendari dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- Jejaring kuat BPOM di Kendari dengan unsur *Criminal Justice System* dari tingkat pusat hingga daerah;
- Tersedia pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Tersedianya landasan hukum untuk melakukan Penindakan terhadap pelanggaran kejahatan bidang Obat dan Makanan; dan
- Adanya kewenangan PPNS yang luas dan berlaku secara nasional

d) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

BPOM memiliki jaringan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM serta satu laboratorium utama di Kantor Pusat BPOM yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Sistem regionalisasi laboratorium memungkinkan BPOM untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk obat dan makanan, mulai dari analisis mikrobiologis hingga pengujian kimia dan toksikologi. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Balai POM di Kendari mendukung upaya regionalisasi laboratorium terpadu dengan memperkuat jaringan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Region V.

e) Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM di Kendari melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 s.d 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Kendari merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Wujud komitmen BPOM di Kendari dalam pelaksanaan RB adalah pencanangan Zona Integriats menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) sejak Tahun 2019; dan perolehan predikat WBK dari Kemenpan RB pada Tahun 2023.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan RB dilakukan BPOM di Kendari melalui peningkatan pelayanan publik yang prima kepada Masyarakat. Berbagai inovasi dikembangkan BPOM di Kendari untuk menangkap harapan dan ekspektasi Masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan bidang Obat dan Makanan. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan public Balai POM di Kendari berdasarkan pada Perka Badan POM Nomor 15 tahun 2022 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Kendari memliliki Gedung berupa:

Tabel 1 Luas Gedung Balai POM di Kendari

NO	Bangunan	Luas Tanah
1	Kantor Lama	1.315 m²
2	Kantor Baru	17.200 m²

f) Kemudahan Perizinan/Registrasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peningkatan permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat BPOM di Kendari melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Pendampingan yang intensif telah dilakukan BPOM di Kendari kepada pelaku usaha untuk mendukung penerbitan izin secara cepat dengan tetap memenuhi standar. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen BPOM di Kendari dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan peningkatan perekonomian.

g) Keunggulan Balai POM di Kendari
   - Sulawesi Tenggara merupakan wilayah penghasil kacang mete. Petugas BPOM di Kendari telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB sebagai syarat registrasi MD melalui inovasi Sipintar Plus;
   - Pada Tahun 2024 BPOM di Kendari memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB;
   - Pada Tahun 2024 BPOM di Kendari meraih penghargaan Penggunaan KKP Terbaik I Semester II Tahun 2024 dari Kanwil KPPN Kendari;
   - Pada Tahun 2024 BPOM di Kendari meraih penghargaan Implementasi Nominal Transaksi KKP Terbaik I Semester I Tahun 2024 dari Kanwil DJPb Prov Sultra;
   - Pada Tahun 2024 Balai POM di Kendari meraih penghargaan Implementasi Penggunaan KKP Terbaik I Semester I Tahun 2024 dari Kanwil KPPN Kendari;

2. Aspek Eksternal

a. Kondisi Geografis dan Demografi Sulawesi Tenggara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi. Sulawesi Tenggara memiliki jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 2 Kota dan 15 Kabupaten dengan total 222 kecamatan dan 2.309 desa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2023, kondisi demografi Provinsi Sulawesi Tenggara diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2.836.740 jiwa yang terdiri dari 1.436.260 jiwa laki-laki dan 1.400.480 jiwa perempuan (BPS, 2025).



Gambar 3 Penduduk Sulawesi Tenggara

b. Pola Transportasi Sulawesi Tenggara;

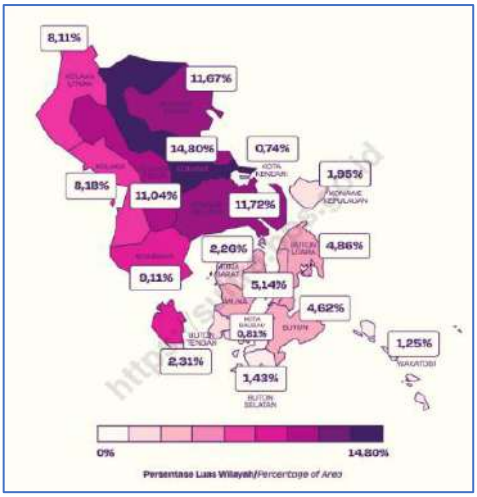

Gambar 4 Luas Wilayah Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan mencapai 36.159,71 km^2. Topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari daratan berbukit dan bergunung dan memiliki beberapa pulau. Jarak terjauh dari Ibukota (Kota Kendari) adalah Kabupaten Kolaka Utara dengan jarak 188 km.

Pola Transptasi tersebut yaiu:

- Transportasi udara, yaitu fasilitas bandara dan rute jalur pesawat dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kota Kendari ke Kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau, dengan waktu tempuh 30–45 menit

- ❖ Transportasi laut yaitu menggunakan kapal cepat (jetfoil), Kapal Kayu, Kapal Feri, dan Kapal Penumpang ke kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan waktu tempuh tercepat 4 jam dan terlama 12 jam.
- ❖ Transportasi darat yaitu ke Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, kabupaten Bombana dan Kota Kendari menggunakan kendaraan dinas ataupun kendaraan umum, dengan waktu tempuh tercepat 1 jam dan terlama 10 jam.

c. Peningkatan Pertumbuhan Pasar Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

Pertumbuhan pelaku usaha sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkembang pesat merupakan peluang bagi Balai POM di Kendari untuk melakukan intensifikasi pengawasannya. Balai POM dI Kendari berada pada posisi strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di Sulawesi Tenggara memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Balai POM di Kendari hadir bagi konsumen dengan memberikan jaminan akses ke produk yang aman dan berkualitas; dengan adanya berbagai inovasi pendampingan UMKM. BPOM di Kendari memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan dan kemudahan perizinan; sehingga membantu produk Sulawesi Tenggara memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tenggara yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka pengawasan bidang Obat dan Makanan, Balai POM di Kendari sejumlah melaksanakan target pengawasan pada tahun 2025 sebanyak 32 sarana produksi terdiri dari 28 sarana produksi Obat dan Makanan; dan 4 sarana produksi Pangan Fortifikasi. Sedangkan sarana distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan yang menjadi target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan BPOM di Kendari sebanyak 545 sarana distribusi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan jangkauan jarak tempuh, namun tetap dijadikan target Pengawasan selanjutnya.

PERMASALAHAN

1) **Kondisi Sosial Kultural masyarakat yang beragam di wilayah Sulawesi Tenggara**

Demografi, epidomologi dan kondisi sosio-kultural mempengaruhi jenis dan perilaku konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini menjadi tantangan Balai POM di Kendari dalam menjawab dinamika kebutuhan yang kompleks. Perilaku konsumsi sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak sesuai ketentuan dibawah kesadaran penuh, menjadi ancaman dalam pemberian edukasi terhadap Penggunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berkualitas. Tantangan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

2) **Adaptasi Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi**

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional.

Balai POM di Kendari menangkap peluang ini melalui digitalisasi dan kemudahan dalam pemberian pelayanan publik. Berbagai inovasi pelayanan publik basis digital dikembangkan untuk memenuhi harapan masyarakat Sulawesi Tenggara. Peningkatan kompetensi pegawai BPOM di Kendari terkait teknologi informasi dan digitalisasi terus dilakukan melalui pembelajaran e-learning maupun onsite. Kemampuan dalam pemanfaatan teknologi AI diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketepatan yang dibutuhkan dalam pengawsan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sehingga secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

3) Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan Obat dan Makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh BPOM menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Di Propinsi Sulawesi Tenggara penerimaan terhadap kebijakan Obat dan Makanan menjadi tantangan yang perlu dikelola dengan baik oleh Balai POM di Kendari. Perubahan regulasi dalam kemudahan perizinan membuka celah bagi pelaku usaha untuk tidak memenuhi komitmen pemenuhan standarnya, sehingga akan menyulitkan dalam pengawasan produk postmarket. Disisi lain perubahan regulasi justru memunculkan oknum percaloan oleh masyarakat dalam pengurusan penerbitan izin edar. Balai POM di Kendari harus dapat menjawab tantangan ini dan menganalisis agar tidak menjadi ancaman serius bagi organisasi.

4) E-commerce dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. *E-commerce* menjadi pintu kemudahan akses Masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap produk sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadi tantangan Balai POM di Kendari dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Balai POM di Kendari harus mampu menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

Selain ancaman dari perdagangan illegal melalui e-commerce, Perkembangan teknologi memberikan ancaman Balai POM di Kendari terhadapa penyebaran berita hoax tentang produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kemudahan akses terhadap internet dan informasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memungkinkan berkembangnya informasi-informasi yang profokatif dan tidak benar terkait pengawasan Obat dan Makanan baik di lingkup Sulawesi Tenggara maupun secara nasional.

5) Kolaborasi dan Koordinasi dengan Stakeholder

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Balai POM di Kendari menyadari dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu, Balai POM di Kendari membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (OPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Kendari maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Kendari yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional /Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian (JLP), Satgas Pangan Sulawesi Tenggara, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah, Criminal Justice System (CJS).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja Balai POM di Kendari terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Balai POM di Kendari yang ditetapkan dalam SK Nomor HK.02.02.6B.04.25.27 tanggal 25 April 2025. Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Arah Kebijakan Balai POM di Kendari selama 2025-2029.

VISI: Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045			
MISI 1 Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	MISI 2 Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	MISI 3 Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	MISI 4 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Gambar 5 Visi dan Misi Badan POM RI 2025-2029

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategi BPOM yang tertuang dalam Visi BPOM adalah:

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman

- Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu

- BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing

- BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

Masyarakat Sehat dan Sejahtera

- Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

1) Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka dirumuskan tujuan strategis pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai Balai POM di Kendari dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

2) Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis Balai POM di Kendari tahun 2025-2029 yang mencakup aspek kunci pengawasan dan edukasi publik dalam mencapai keamanan, kualitas dan kemandirian sektor Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

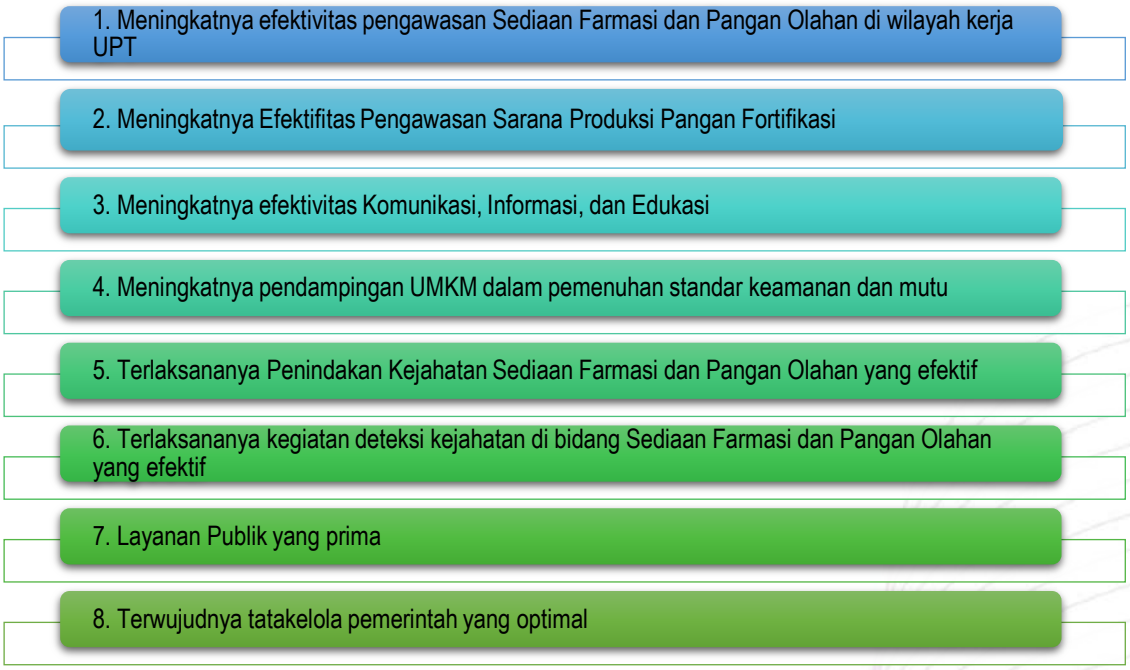

Gambar 6 Sasaran Kegiatan Balai POM di Kendari 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Kendari, maka Balai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POM di Kendari menetapkan 8 sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari 2025.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra; dan akan dilaksanakan oleh satker/UPT melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT Balai POM di Kendari Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, selanjutnya sebagai pedoman pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja Balai POM di Kendari Tahun 2025. RKT Balai POM di Kendari Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Kendari Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKT 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi	Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan	74,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKT 2025
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Laboratorium	
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Kendari	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	99,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	13 (100%)
		Jumlah desa pangan aman	4 (100%)
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 (100%)
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai POM di Kendari	14
10	Layanan Publik Balai POM di Kendari yang prima	Indeks Pelayanan Publik	4,65
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI	91,00
		Nilai AKIP	80,01
		Nilai Kinerja Anggaran	90,00
		Indeks Manajemen Risiko	3,20

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI).

Pada awal Tahun 2025, Balai POM di Kendari menetapkan Sembilan sasaran kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja. Pada Triwulan III (29 Agustus 2025) dilakukan perubahan terhadap PK awal Tahun 2025. Pada PK perubahan tersebut Balai POM di Kendari menetapkan delapan sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator. Rincian sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja Balai POM di Kendari digambarkan sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

SK	SASARAN KEGIATAN	IKSK	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET PK 2025
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5%
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26%
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89%
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87%
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5%
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.77%
		IKSK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80%
		IKSK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%
		IKSK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,5 Nilai
		IKSK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	9,09%
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67%
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86 Nilai
		IKSK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Jumlah
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	4 Jumlah
		IKSK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17.54%
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	IKSK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK	SASARAN KEGIATAN	IKSK	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET PK 2025
	wilayah kerja UPT			
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90%**
SK7	Layanan Publik yang prima	IKSK24	Indeks Pelayanan Publik	**4.6 Nilai**
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK25	Nilai Pembangunan ZI	**89 Nilai**
		IKSK26	Nilai AKIP	**81 Nilai**
		IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran	**5 Nilai**
		IKSK28	Indeks Manajemen Risiko	**2.9 Nilai**

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Kendari sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Balai POM di Kendari menetapkan perjanjian kinerja Tahun 2025 pada tanggal 12 Februari 2025. Selanjutnya pada Agustus 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan tersebut berupa penambahan tiga indikator kinerja dan penyederhanaan sasaran kegiatan dari semula 9 sasaran menjadi 8 sasaran kegiatan. Perjanjian Kinerja tahun 2025 baik target, indikator, dan sasaran kegiatan telah disesuaikan sesuai target Renstra periode 2025-2029. Selain itu penyusunan PK Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari selalu dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berikutnya. Dasar pemantauan dan evaluasi pada Tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja perbulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025 BPOM di Kendari

SK	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Sasaran Kegiatan	Target PK 2025	Target Bulanan RAPK (Kumulatif)												Anggaran Revisi 2025 (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	23,732,896,000
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**84.50**	-	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	**84.50**	**499,388,010**
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	**26.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	**26.00**	**42,650,000**
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80.00**		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**80**	**407,368,240**
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100.00**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**100**	**4,736,840**
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85.00**	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	**85**	**37,894,720**
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**89.00**	-	-	89	89	89	89	89	89	89	89	89	**89.00**	**14,137,400**
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**87.00**	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	**87.00**	**9,102,000**
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85.00**	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	**85.00**	**23,579,400**
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**95.50**	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	**95.50**	**308,630,000**
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80.00**	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**80.00**	**254,634,000**
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**86.57**	86.57	86.6	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	**86.57**	**11,754,000**
		IKSK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**80**	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	**80.00**	**15,444,990**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Sasaran Kegiatan	Target PK 2025	Target Bulanan RAPK (Kumulatif)												Anggaran Revisi 2025 (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	23,732,896,000
		IKSK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	**100.00**	**60,547,200**
		IKSK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**74.50**	-	-	71	71	71	72	72	72	73	73	73	**74.50**	**3,222,909,000**
		IKSK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**9.09**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.09	**9.09**	**23,684,200**
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**67.00**	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	**67.00**	**4,932,000**
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	**86.00**			86	86	86	86	86	86	86	86	86	**86.00**	**946,234,000**
		IKSK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**13**	5%	20%	30%	55%	55%	55%	55%	61,67%	80%	80%	100%	**13**	**490,400,000**
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	**4**	5%	5%	5%	25%	40%	55%	65%	70%	75%	85%	100%	**4**	**544,477,000**
		IKSK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1**	5%	25%	25%	55%	55%	65%	65%	75%	90%	90%	100%	**1**	**108,663,000**
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**80.00**	5	10	20	25	35	40	45	55	60	65	70	**17.54**	**37,617,000**
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	**80.00**	5	20	30	35	40	50	50	60	70	80	80	**80.00**	**470,300,000**
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90.00**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**90.00**	**81,422,000**
SK7	Layanan Publik yang prima	IKSK24	Indeks Pelayanan Publik	**4.60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.60	**4.60**	**58,228,000**
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK25	Nilai Pembangunan ZI	**89.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.00**	**10,996,694,000**
		IKSK26	Nilai AKIP	**81.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**81.00**	**29,200,000**
		IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran	**91.02**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**	**4,996,694,000**
		IKSK28	Indeks Manajemen Risiko	**2.9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.90**	**31,575,000**

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Balai POM di Kendari. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan) dan tahunan sesuai jenis indikator kinerjanya. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM. Setiap indikator kinerja memiliki metode dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja

a) Terdapat Perjanjian Kinerja;
b) Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
c) Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
d) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja;
e) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro;
f) Terdapat penanggung jawab data yang jelas;
g) Sumber data yang valid dan mudah telusur.
h) Dukungan sistem informasi

2. Capaian Indikator Kinerja

Balai Besar POM di Kendari secara periodik melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan untuk setiap indikator; sebagai berikut.

$$\%\ \boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100}\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan berikut:

a) Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori berikut



Gambar 7 Kriteria Nilai Indikator Kinerja

c) Capaian perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target tahunan dinyatakan dalam kategori berikut

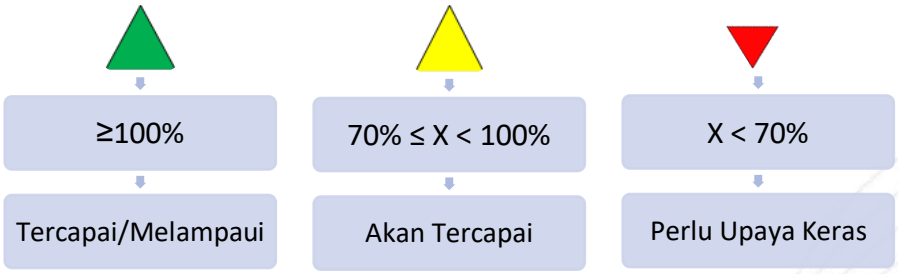

Gambar 8 Kriteria Capaian Kinerja Tahunan dibandingkan Target Jangka Menengah Renstra

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja. Adapun mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Balai Besar POM di Kendari menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh Kepala Balai POM di Kendari;
2. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (*Raw Data*) dengan tertib;
3. Penanggungjawab data setiap fungsi/bagian melalui Ketua Tim menginput data realisasi kinerja pada kertas kerja kinerja pada link SIMANJA;
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI yang akan terintegrasi pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas
5. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja terintegrasi (SIMETRIS) menu e-performance. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final berdasarkan hasil rapat evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal dan laporan kinerja, sehingga dipastikan tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja;
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan pada akhir tahun;
7. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
   a) Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator kinerja;
   b) Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
   c) Objektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
8. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Nilai Kinerja Oragnisasi dan Predikat Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Nilai Kinerja Organisasi terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periode tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari dua komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Hasil evaluasi AKIP pada BBPOM di Kendari merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Inspektorat yang ditunjuk menjadi evaluator internal. Koreksi normalisasi capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat AKIP yang bersumber dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama. Faktor koreksi dari capaian kinerja yang dinormalisasi sebagai berikut:

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NKO pada akhir tahun perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi dengan hasil pengurangan nilai koreksi. Selanjutnya hasil NKO dikelompokkan dalam predikat NKO dengan kriteria sebagai berikut.

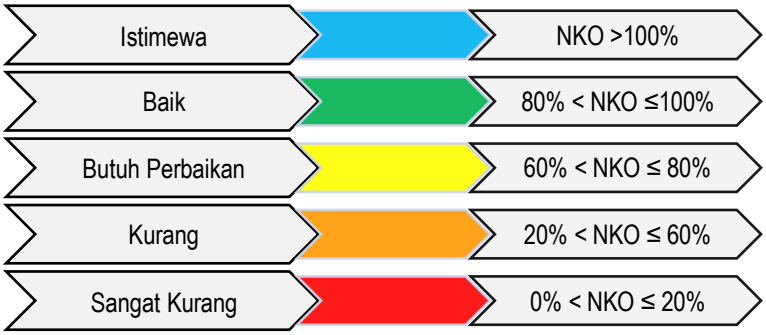

Gambar 9 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi

5. Penanggungjawab

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, ditetapkan Ketua Tim sebagai penanggungjawab data pada masing-masing tim/fungsi yang dikelolanya; melalui Penugasan Kepala Balai POM di Kendari nomor KP.09.01.6B.01.25.02 tentang Penunjukan Ketua Tim Kerja Balai POM di Kendari Tahun 2025.

No	Jabatan	Nama
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Abdul Hamid, S.Si.,Apt 2. Rizky Afdaliah, S.Farm.,Apt
2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Dra. Mirnawati Purba, Apt
3.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Jalidun, S.Si.,Apt.,MPPM 2. Rizky Afdaliah, S.Farm.,Apt
4.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	1. Sienny,S.Si.,Apt 2. Rizky Afdaliah, S.Farm.,Apt
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Jalidun,S.Si.,Apt.,MPPM 2. Rizky Afdaliah, S.Farm.,Apt
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Jalidun,S.Si.,Apt.,MPPM
7.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Suharni, S.Si.,Apt
8.	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Suharni, S.Si.,Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jabatan	Nama
9.	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jalidun, S.Si.,Apt
10.	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jalidun, S.Si.,Apt
11.	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Abdul Hamid, S.Si.,Apt
12.	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Abdul Hamid, S.Si.,Apt
13.	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Suharni, S.Si.,Apt
14.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Dra. Fausiah Idrus, Apt
15.	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Sienny, S.Si.,Apt
16.	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Suharni, S.Si.,Apt
17.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Ratna Palupi Fajarini, S.Farm., Apt
18.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Dra. Mirnawati Purba, Apt
19.	Jumlah desa pangan aman	Dewi Amni Idrus, S.Si.,Apt
20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Dra. Mirnawati Purba, Apt
21.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Sienny, S.Si.,Apt
22.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Wahyuddin Muis, S.Si, Apt, M.Sc
23.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Asmin Alwi, S.Si.,Apt
24.	Indeks Pelayanan Publik	Dra. Hasnah Nur, Apt.,MPH
25.	Nilai Pembangunan ZI	Nurhadia, S.Si
26.	Nilai AKIP	Nurhadia, S.Si
27.	Nilai Kinerja Anggaran	Nurhadia, S.Si
28.	Indeks Manajemen Risiko	Sienny, S.Si,Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Kendari guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi terhadap target Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 (PK 2025); membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya; membandingkan realisasi kinerja unit dengan balai lain yang setara; membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Tahun 2029; melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Kendari dievaluasi dan diukur pencapaiannya dengan hasil NKO sebesar 93,61% dengan predikat **"Baik".**

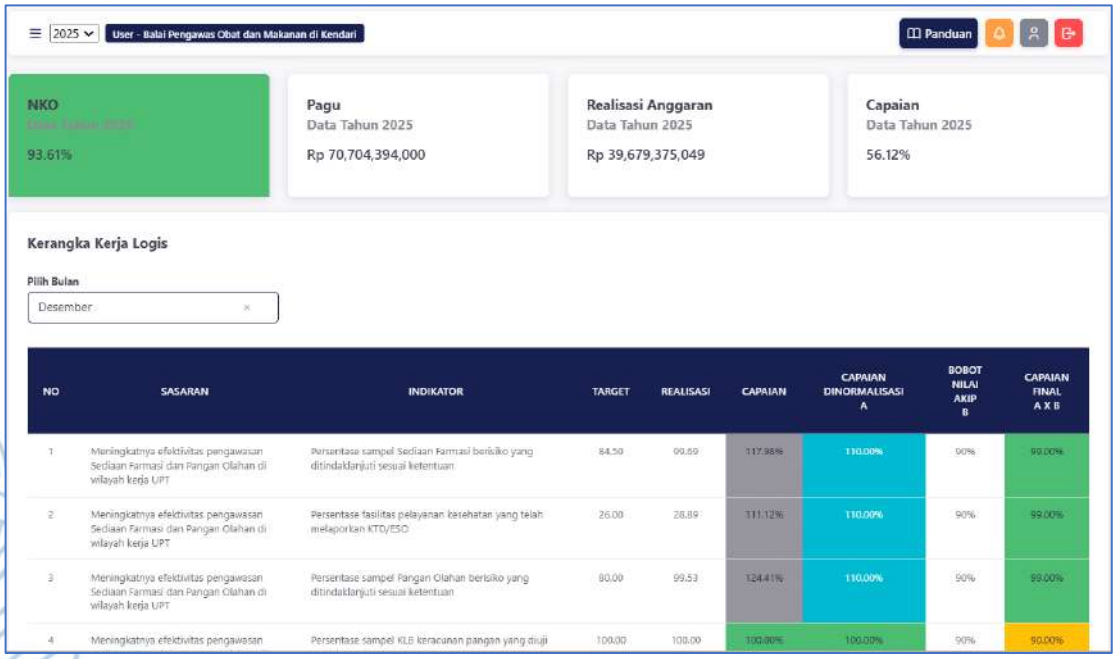

Gambar 10 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Tahun 2025 pada Aplikasi e-performance

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 11 Capaian Sasaran Kegiatan BPOM di Kendari Tahun 2025

Pada Tahun 2025, sasaran kegiatan dievaluasi dan diukur pencapaiannya; dengan hasil terdapat enam sasaran kegiatan dengan kriteria Baik; dan dua sasaran kegiatan dengan kriteria Cukup. Capaian nilai kinerja sasaran BPOM di Kendari Pada Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5 Hasil Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2025

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	BOBOT NILAI AKIP (BB)	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	CAPAIAN SASARAN
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.98	110.00	90%	99.00	96.03
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	111.12	110.00	90%	99.00	
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	124.41	110.00	90%	99.00	
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	90%	90.00	
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65	110.00	90%	99.00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	BOBOT NILAI AKIP (BB)	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	CAPAIAN SASARAN
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	102.18	102.18	90%	91.96	
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114.94	110.00	90%	99.00	
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65	110.00	90%	99.00	
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104.71	104.71	90%	94.24	
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	110.00	90%	99.00	
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	115.51	110.00	90%	99.00	
		IKSK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	107.63	107.63	90%	96.86	
		IKSK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	100.00	90%	90.00	
		IKSK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	105.91	105.91	90%	95.32	
		IKSK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100.00	100.00	90%	90.00	
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	90%	90.00	90.00
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	102.23	102.23	90%	92.01	90.50
		IKSK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00	100.00	90%	90.00	
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	100.00	100.00	90%	90.00	
		IKSK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100.00	90%	90.00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	BOBOT NILAI AKIP (BB)	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	CAPAIAN SASARAN
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	100	90%	90.00	90.00
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	116.96	110.00	90%	99.00	99.00
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	105.80	105.80	90%	95.22	95.22
SK7	Layanan Publik yang prima	IKSK24	Indeks Pelayanan Publik	105.65	105.65	90%	95.09	95.09
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK25	Nilai Pembangunan ZI	98.28	98.28	90%	88.45	87.34
		IKSK26	Nilai AKIP	97.19	97.19	90%	87.47	
		IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran	100.00	100	90%	90	
		IKSK28	Indeks Manajemen Risiko	92.69	92.69	90%	83.42	
NKO							**93.61**	

Nilai kinerja sasaran Tahun 2025 jika diperbandingkan dengan balai setara sesuai dengan klister yang ditetapkan melalui Nota Dinas Sestama Nomor PR.09.01.2.01.26.71 Tanggal 26 Januari 2026, adalah sebagai berikut.

SK	SASARAN KEGIATAN	BALAI POM DI PALU	BALAI POM DI KENDARI	BALAI POM DI BATAM	BALAI POM DI JAMBI
		NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.74	96.03	95.37	106.40
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	90.00	90.00	100.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK	SASARAN KEGIATAN	BALAI POM DI PALU	BALAI POM DI KENDARI	BALAI POM DI BATAM	BALAI POM DI JAMBI
		NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	100.76	90.50	90.42	100.15
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00	90.00	90.00	110.00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	95.51	99.00	84.97	110.00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	97.31	95.22	99.00	108.80
7	Layanan Publik UPT yang prima	107.61	95.09	95.03	104.68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	94.58	87.34	88.14	94.68
NKO		**101.89**	**93.61**	**92.99**	**103.80**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tertinggi adalah BPOM di Jambi mencapai 103,80 dengan kriteria Istimewa. Dari keempat balai yang diperbandingkan, NKO pada BPOM di Jambi dan BPOM di Palu mendapat predikat Istimewa, sedangkan BPOM di Kendari dan BPOM di Batam mendapat predikat Baik.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Sasaran kegiatan Balai POM di Kendari ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2025 pada tanggal 12 Februari 2025 sebanyak 9 sasaran dengan 25 indikator. Selanjutnya pada Agustus 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan tersebut berupa penambahan tiga indikator kinerja dan penyederhanaan sasaran kegiatan sehingga menjadi 8 sasaran dengan 28 indikator kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, telah diperjanjikan 8 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja kegiatan; dengan pencapaian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6 Hasil Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	99.69	117.98	Tidak dapat disimpulkan
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	28.89	111.12	Tidak dapat disimpulkan
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	99.53	124.41	Tidak dapat disimpulkan
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	Tidak dapat disimpulkan
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89	90.94	102.18	Sangat baik
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94	Tidak dapat disimpulkan
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	Tidak dapat disimpulkan
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	100	104.71	Sangat baik
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00	Tidak dapat disimpulkan
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57	100	115.51	Tidak dapat disimpulkan
		IKSK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	86.1	107.63	Sangat Baik
		IKSK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100.00	Baik
		IKSK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.5	78.9	105.91	Sangat baik
		IKSK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	9.09	9.09	100.00	Baik
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	100.00	Baik
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86	87.92	102.23	Sangat baik
		IKSK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	13	100.00	Baik
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	4	4	100.00	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA
		IKSK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	Baik
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17.54	17.54	100.00	Baik
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80	93.57	116.96	Tidak dapat disimpulkan
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95.22	105.80	Baik
SK7	Layanan Publik yang prima	IKSK24	Indeks Pelayanan Publik	4.6	4.86	105.65	Baik
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK25	Nilai Pembangunan ZI	89	87.47	98.28	Baik
		IKSK26	Nilai AKIP	81	78.72	97.19	Baik
		IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100.00	Baik
		IKSK28	Indeks Manajemen Risiko	2.9	2.688	92.69	Baik

Pada Tahun 2025, capaian terhadap dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan menunjukkan sebanyak 5 indikator dengan kategori “Sangat Baik”; sebanyak 14 indikator dengan kategori “Baik”; dan 9 indikator “Tidak Dapat Disimpulkan”.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPOM di kendari sebagai berikut:

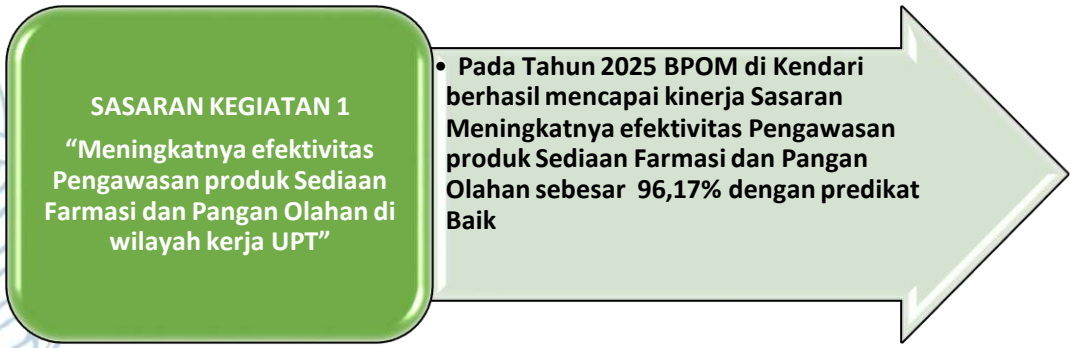

Gambar 12 Sasaran Kegiatan 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pencapaian Sasaran Kegiatan pertama didukung oleh 15 indikator yaitu:

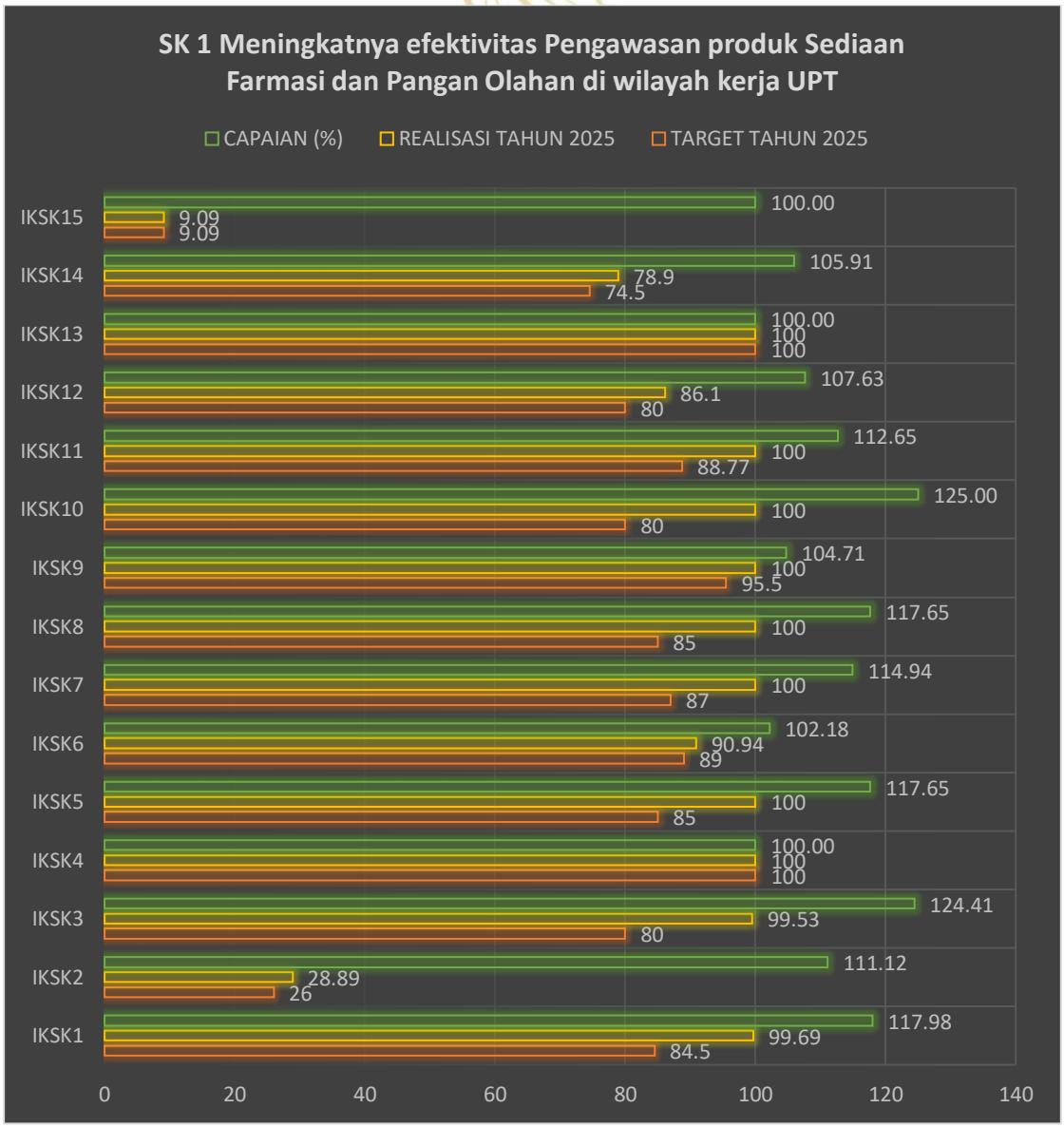

1] Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 7 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	99,69	117,98	Tidak Dapat Disimpulkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

* Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: (A+B+C+D)/4;

A. = Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan:
   a) Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot 30%)
   b) Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot 30%)
   c) Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (bobot 30%)
   d) Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot 10%)

B. = Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan;
   a) Pemenuhan target pengawasan OBA
   b) Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
   c) Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
   d) Kesesuaian parameter uji
   e) Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
   f) Tanggapan atas surat tindak lanjut

C. = Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
   a) Pemenuhan target pengawasan SK
   b) Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
   c) Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
   d) Kesesuaian parameter uji
   e) Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
   f) Tanggapan atas surat tindak lanjut

D. = Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan;
   a) Pemenuhan target pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
c) Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
d) Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan
e) Tanggapan atas surat tindak lanjut

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pemilihan kategori sediaan farmasi tersebut sebagai sampel menitikberatkan pada produk-produk yang memiliki resiko tinggi berdasarkan Analisa resiko serta produk dengan riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau yang terkait kasus tertentu.

Untuk mengakomodir pengawasan berbasis resiko, Balai POM melakukan sampling secara targeted atau purposive sampling, dengan fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat resiko lebih tinggi. Agar kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi dapat terlaksana dengan baik, Balai POM di Kendari menerapkan langkah-langkah berikut: Pertama, Balai POM melakukan perencanaan yang matang, menyusun rencana sampling dan pengujian secara terperinci. Kedua, pengambilan sampel dilakukan dengan akura dan sesuai pedoman, guna memastikan bahwa hasil yang diperoleh representative. Ketiga, Pengujian terhadap produk dilaksanakan secara teliti dan menggunakan metode yang sesuai standar mutu. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Pada beberapa tahun terakhir, Badan POM menerapkan regionalisasi laboratorium. Sistem ini memerlukan koordinasi antar UPT Bala POM dalam satu region dalam perencanaan waktu/periode sampling sehingga tidak terjadi kekosongan atau kelebihan beban pengujain sampel. Diperlukan penetapan kesepakatan UPT Balai POM dalam satu region terkait waktu penerimaan sampel di UPT Balai POM penguji. Waktu penerimaan sampel dsesuaikan denhan kesiapan masing-masing UPT Balai POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2025, realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah melampaui target sebesar >110% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Jumlah sampel Jumlah sampel Sediaan Farmasi yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2025 sebanyak 1015 sampel, terdiri dari: 287 sampel Obat; 232 Sampel Obat Tradisional, 59 Sampel Suplemen Kesehatan dan Kuasi, dan 437 Sampel Kosmetik; yang seluruhnya telah diuji sesuai standar.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Renstra 2025-2029 dengan indikator kinerja yang berbeda dari tahun sebelumnya. Indikator kinerja hanya dapat diperbandingkan bila persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memiliki indikator kinerja yang sama. Sehingga perubahan indikator kinerja tahun 2025 menyebabkan realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 8 Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan Target Tahun 2029

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,05	99,69	110,15	Tercapai/ Melampaui ▲

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 telah melewati target jangka menengah tahun 2029. Demikian juga capaian yang telah mencapai 110,15%, melewati batas yang dapat diukur sebesar 110%. Kondisi ini memungkinkan realisasi pada tahun berikutnya melebihi target 2029 serta capaiannya akan melewati 110%. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian target jangka menengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Realisasi kinerja balai perlu diperbandingkan denan realisasi kinerja balai lain yang setara untuk mengukur efektifitas kinerja balai. Perbandingan kinerja Balai POM di Kendari terhadap balai yang setara dapat dilihat pada gambar berikut.

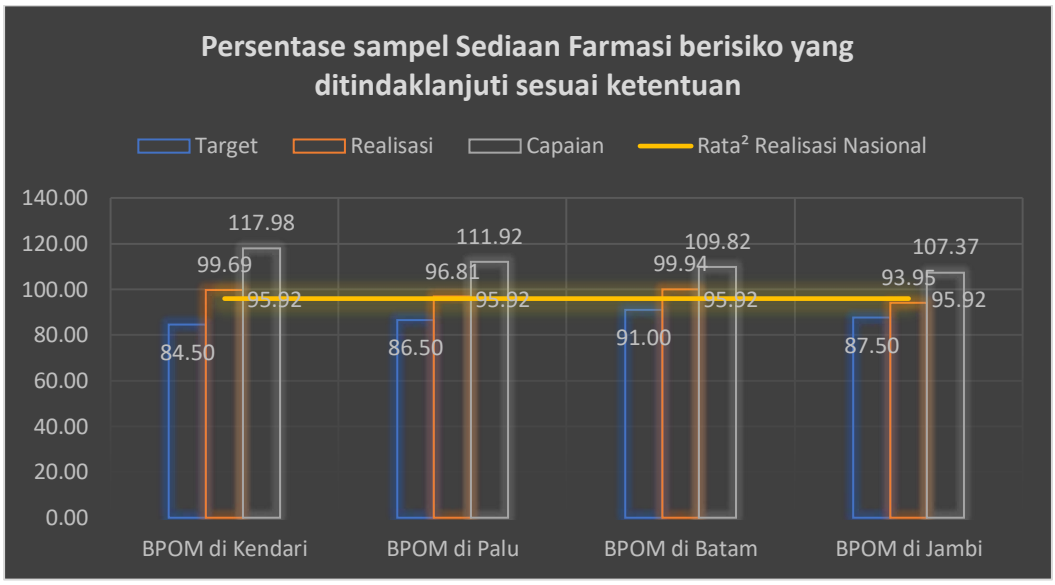

Gambar 13 Perbandingan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara

Grafik di atas menggambarkan bahwa Balai POM di Batam memiliki realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi sebesar 99,94%, sedangkan Balai POM di Jambi memiliki realisasi terendah. Balai POM di Kendari sendiri memiliki realisasi 99,67% yang nilainya di atas rata-rata realisasi nasional sebesar 95,92%. Pada keempat balai yang diperbandingkan, hanya BPOM di Jambi yang capaian kinerjanya msih berada dibawah rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Tahun 2025 telah melampaui target tahunan. Hal ini menunjukkan kinerja BPOM di Kendari dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan produk Sediaan Farmasi baik dari pengawasan hingga pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan indikator yaitu:

1) Konsisten terhadap kesepakatan yang telah dilakukan bersama antara substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Subbag TU (sebagai TPC) dalam pelaksanaan sampling, distribusi sampel dan pengujian agar tidak melewati timeline yang telah disepakati bersama dan yang telah ditetapkan dalam SOP;
2) Koordinasi secara aktif dalam regionalisasi laboratorium, untuk mengawal penyelesaian pengujian secara tepat waktu.

Tabel 9 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Konsistensi terhadap kesepakatan yang telah dilakukan (Pemeriksaan, Pengujian dan Subbag TU) dalam pelaksanaan sampling dan distribusi sampel	Agar membuat perencanaan sampling berdasar analisa risiko	Melakukan perencanaan sampling berdasar analisa risiko	TW I 2026	Y	O-13	Sampel masuk tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati
2	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaporan Pengawasan dan Pengujian Obat dan Makanan melalui Aplikasi SIPT sampai Operator Pusat tidak tepat waktu	Perlu dilakukan koordinasi secara aktif dengan Tim TI Pusdatin dan PPPOMN terkait gangguan SIPT	1. Petugas melakukan monitoring rutin status aplikasi SIPT 2. Koordinasi aktif antara Pengguna Aplikasi, Tim TI dan Pusat (Pusdatin maupun PPPOMN) melalui Aplikasi KATALISTIK	TW I 2026	Y	IT-01	Hasil Pengawasan dan Pengujian Obat dan Makanan melalui Aplikasi SIPT sampai Operator Pusat tidak tepat waktu
3	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pengadaan reagen/media terhambat	Tim pengujian berkoordinasi aktif dengan Subbag TU (Penganggaran, Pengadaan) dalam perencanaan pengadaan reagen/media laboratorium	1. Tim Pengujian membuat perencanaan kebutuhan secara rutin 2. Pengusulan penambahan anggaran melalui revisi anggaran	TW I 2026	Y	O-14	Proses pengujian sampel terhambat
4	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target melampaui 110%, dikarenakan penetapan target terlalu rendah	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	Perlu dilakukan reviu terhadap target indikator tahun 2026, pada penyusunan PK 2026	Jan-Feb 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari berhasil mencapai target Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025. Tagging anggaran indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada RO QIA.002 sebesar 97% dari total anggaran pada RO QIA.002. Realisasi anggaran pada RO QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Tahun 2025 sebesar 98,80% dengan capaian output 100,40%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Tahun 2025 didukung komitmen petugas untuk melaksanakan sampling dan pengujian tepat waktu. Selain itu koordinasi secara aktif dengan *supporting system* bagian pengadaan terkait pemenuhan kebutuhan laboratorium (pengadaan reagan/media pengujian sampel) juga menjadi pendukung keberhasilan kegiatan pada RO QIA.002.

2] Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 10 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	28,89	111,12	Tidak Dapat Disimpulkan

* Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur dengan rumus: (A/B) x 100%

A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 11 Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dibandingkan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	28,89	96,30	Akan Tercapai

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan tercapai. Namun diperlukan Upaya untuk dapat minimal tercapai sesuai target Tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

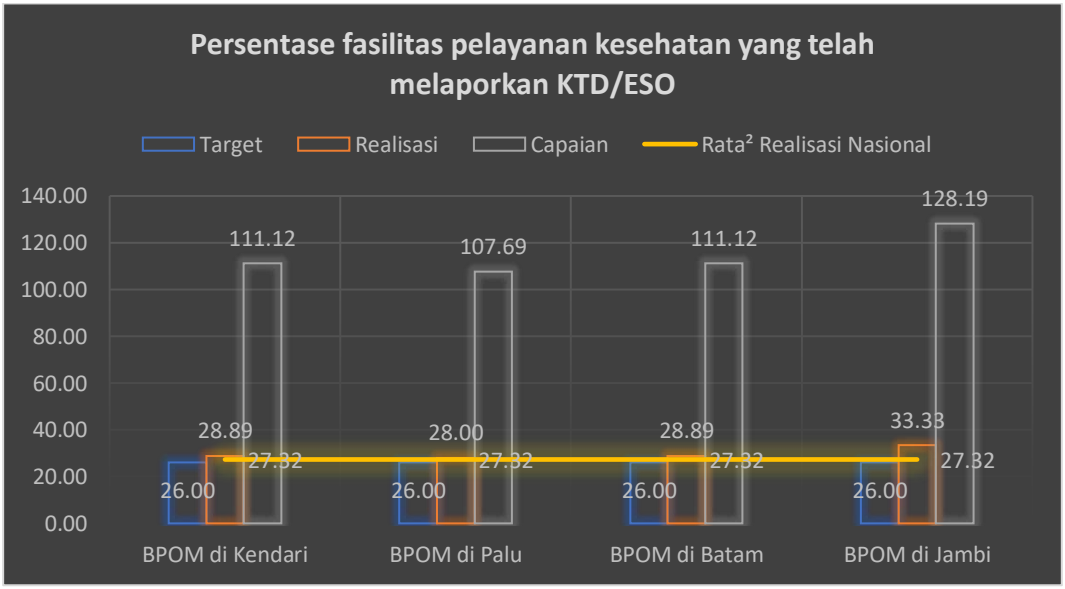

Gambar 14 Perbandingan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tertinggi adalah BPOM di Jambi mencapai 33,33%, sedangkan realisasi terendah BPOM di Palu sebesar 28%. Pada keempat balai yang diperbandingkan, dengan target yang sama sebesar 26%, capaian kinerja telah melampaui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

targetnya. Pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasi Tahun 2025 telah melebihi rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM di Kendari pada Tahun 2025 telah mencapai targetnya. Hal ini berkat upaya proaktif petugas BPOM di Kendari dalam menindaklanjuti kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigillance agar aktif melaporkan KTE/ESO. Pelaporan KTD/ESO belum menjadi kegiatan prioritas sarana pelayanan Kesehatan, sehingga BPOM di Kendari harus konsisten untuk menindaklanjuti fasilitas pelayanan kesehatan, terutama yang telah mendapatkan KIE Farmakovigillance.

Tabel 12 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Pelaporan KTD/ESO tidak menjadi kegiatan prioritas sarana pelayanan kesehatan	Agar prokatif melakukan koordinasi untuk pelaporan KTD/MESO melalui aplikasi e-MESO	Petugas BPOM melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk pelaporan KTD/MESO melalui aplikasi e-MESO	Jan-Feb 2026	Y	S-08	Fasilitas pelayanan kesehatan tidak patuh dalam melakukan pelaporan KTD/ESO

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari berkomitmen untuk mencapai Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan farmakovigilance kepada petugas layanan Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Tagging anggaran indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada kegiatan RO QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans. Pada Tahun 2025, BPOM di Kendari melaksanakan kegiatan KIE farmakovigillance secara hybrid dikarenakan keterbatasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

anggaran akibat efisiensi. Hal ini juga menjadi kendala petugas untuk menindaklanjuti kepada sarana dalam pelaporan KTD/ESO.

3] Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1) kesesuaian target sampel UPT;
2) kesesuaian parameter uji;
3) ketepatan pengambilan kesimpulan;
4) ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5) ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 13 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	99,53	124,41	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan menggunakan rumus:

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A merupakan Kesesuaian Target Sampel; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling x 100%;

B merupakan Kesesuaian Parameter Uji; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji x 100%;

C merupakan Ketepatan Pengambilan Kesimpulan; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji x 100%;

D merupakan Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa x 100%;

E merupakan Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji x 100%;

F merupakan Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya; dihitung berdasarkan Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian) x 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada indikator kinerjanya.

c) Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	98,55	113,10	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan melampaui target.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

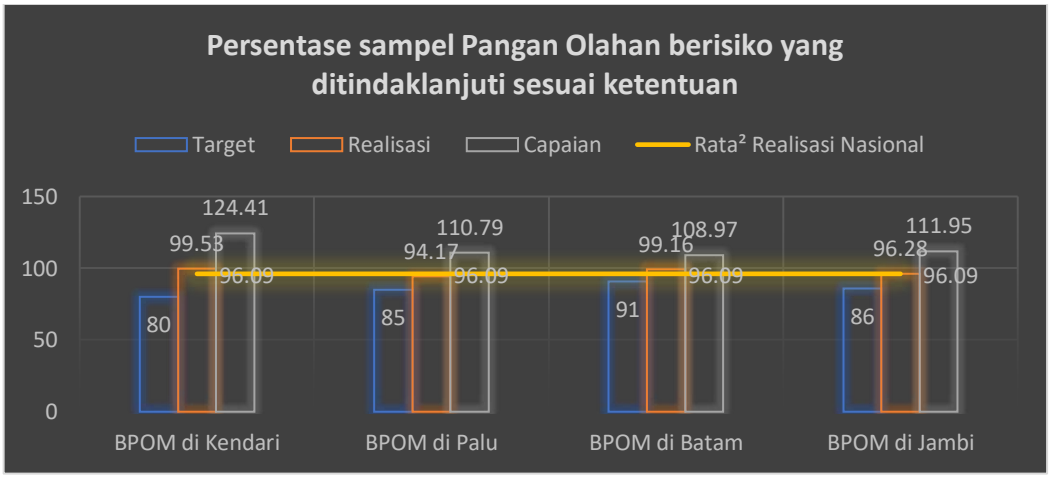

Gambar 15 Perbandingan Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi adalah BPOM di Kendari mencapai 99,53%, sedangkan realisasi terendah BPOM di Palu sebesar 94,17%. Pada keempat balai yang diperbandingkan, hanya capaian kinerja BPOM di Palu yang berada dibawah rata-rata realisasi Nasional.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah melampaui target tahunan. Hal ini menunjukkan kinerja BPOM di Kendari dalam pengawasan produk Pangan Olahan baik dari pengawasan hingga pengujian sesuai pedoman sampling. Selain itu, keberhasilan ini juga diupayakan melalui koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan, pengujian, dan Subbag TU. Substansi pemeriksaan menyerahkan sampel ke laboratorium sesuai kesepakatan yang tertuang dalam SOP. Sehingga ketika waktu pelaporan, sampel yang masuk di laboratorium telah selesai diuji. Koordinasi secara aktif dengan *supporting system* bagian pengadaan terkait pemenuhan kebutuhan laboratorium juga menjadi pendukung keberhasilan capaian. Selain itu melalui upaya koordinasi secara aktif dalam regionalisasi laboratorium, untuk mengawal penyelesaian pengujian secara tepat waktu.

Tabel 15 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Konsistensi terhadap kesepakatan yang telah dilakukan (Pemeriksaan, Pengujian dan Subbag TU) dalam pelaksanaan sampling dan distribusi sampel	Agar membuat perencanaan sampling berdasar analisa risiko	Melakukan perencanaan sampling berdasar analisa risiko	TW I 2026	Y	O-13	Sampel masuk tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaporan Pengawasan dan Pengujian Obat dan Makanan melalui Aplikasi SIPT sampai Operator Pusat tidak tepat waktu	Perlu dilakukan koordinasi secara aktif dengan Tim TI Pusdatin dan PPPOMN terkait gangguan SIPT	1. Petugas melakukan monitoring rutin status aplikasi SIPT 2. Koordinasi aktif antara Pengguna Aplikasi, Tim TI dan Pusat (Pusdatin maupun PPPOMN) melalui Aplikasi KATALISTIK	TW I 2026	Y	IT-01	Hasil Pengawasan dan Pengujian Obat dan Makanan melalui Aplikasi SIPT sampai Operator Pusat tidak tepat waktu
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pengadaan reagen/media terhambat	Tim pengujian berkoordinasi aktif dengan Subbag TU (Penganggaran, Pengadaan) dalam perencanaan pengadaan reagen/media laboratorium	1. Tim Pengujian membuat perencanaan kebutuhan secara rutin 2. Pengusulan penambahan anggaran melalui revisi anggaran	TW I 2026	Y	O-14	Proses pengujian sampel terhambat
4	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	Target melampaui 110%, dikarenakan penetapan target terlalu rendah	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat	Perlu dilakukan reviu terhadap target indikator tahun 2026, pada penyusunan PK	Jan-Feb 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ketentuan		capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	2026				

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

BPOM di Kendari telah mencapai realisasi maksimal terhadap indikator Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini yaitu konsisten terhadap kesepakatan yang telah dilakukan bersama antara substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Subbag TU (sebagai TPC) dalam pelaksanaan sampling, distribusi sampel dan pengujian agar tidak melewati timeline yang telah disepakati bersama dan yang telah ditetapkan dalam SOP. Tagging anggaran indikator Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada RO QIA.001 sebesar 86% dari total anggaran pada RO QIA.001. Realisasi anggaran pada RO QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 98,20% dengan capaian output 100,61%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 didukung komitmen petugas untuk melaksanakan sampling dan pengujian tepat waktu. Selain itu koordinasi secara aktif dengan supporting system bagian pengadaan terkait pemenuhan kebutuhan laboratorium (pengadaan reagan/media pengujian sampel) juga menjadi pendukung keberhasilan kegiatan pada RO QIA.001.

4] Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 16 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{Jumlah\ Sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ yang\ diuji\ sesuai\ standar}{Total\ jumlah\ sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ dikirim\ atau\ diuji\ ke\ BPOM\ di\ Kendari} x\ 100\%$$

Keterangan:

1) Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
2) Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
4) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
5) Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
6) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
7) Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
   - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
   - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
   - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
8) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
   - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
   - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
   - ✓ Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
9) Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
   - ✓ Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

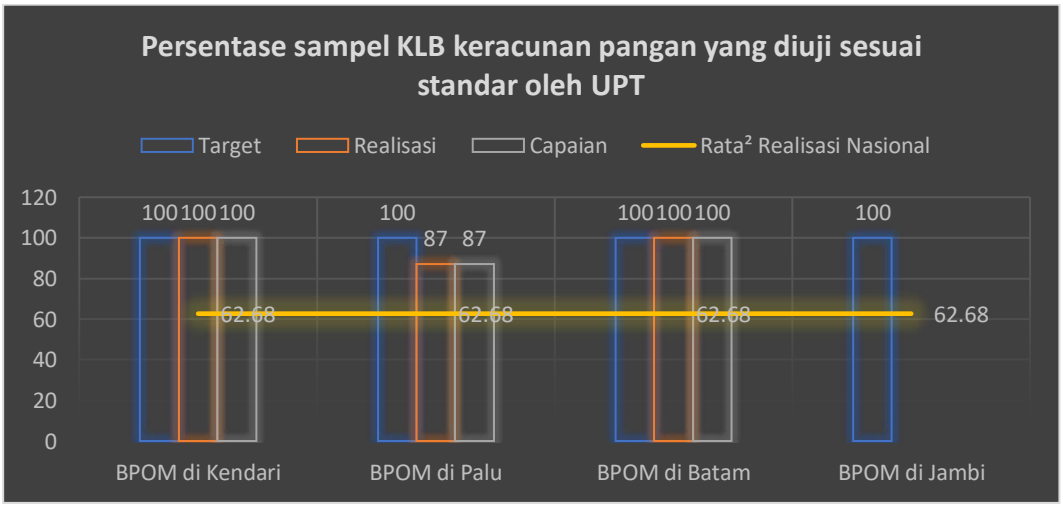

Gambar 16 Perbandingan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada BPOM di Kendari dan BPOM di Batam capaian sebesar 100%. Pada BPOK di Jambi, tidak ada kasus keracunan KLB sehingga tidak ada realisasi. Pada ketiga balai yang ter

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar telah melampaui target Tahun 2025. Hal ini menunjukkan kinerja BPOM di Kendari yang baik dalam pengawasan Makanan di Sulawesi Tenggara. Selain itu, keberhasilan ini juga diupayakan melalui koordinasi yang baik lintas sektor terkait dengan Balai POM di Kendari.

Tabel 18 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pengadaan reagen/media terhambat	Tim pengujian berkoordinasi aktif dengan Subbag TU (Penganggaran, Pengadaan) dalam perencanaan pengadaan reagen/media laboratorium	1. Tim Pengujian membuat perencanaan kebutuhan secara rutin 2. Pengusulan penambahan anggaran melalui revisi anggaran	TW I 2026	Y	O-14	Proses pengujian sampel terhambat

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

BPOM di Kendari telah mencapai realisasi terhadap indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar. Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini yaitu koordinasi yang baik lintas sektor terkait dengan Balai POM di Kendari. Tagging anggaran indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada RO QIA.001 sebesar 1% dari total anggaran pada RO QIA.001. Realisasi anggaran pada RO QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 98,20% dengan capaian output 100,61%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 terhadap tagging indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan berkat koordinasi secara aktif dengan supporting system bagian pengadaan terkait pemenuhan kebutuhan laboratorium (pengadaan reagan/media pengujian sampel) juga menjadi pendukung keberhasilan kegiatan pada RO QIA.001.

5] Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 19 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tidak Dapat DIsimpulkan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus:

10%A + 60%B + 5%C + 5%D + 20%E

Keterangan:

A = Target sampel PIRT

Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling dihitung berdasarkan:

(Capaian sampel PIRT UPT (Jumlah sampel yang kategori pangannya sesuai dengan pedoman sampling)/Target PIRT UPT setahun sesuai Pedoman Sampling) x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B = Kesesuaian Parameter Uji

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan waktu pengambilan sampel

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

D = Ketepatan waktu pelaporan

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya; dihitung berdasarkan (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan mencapai target jangka menengahnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

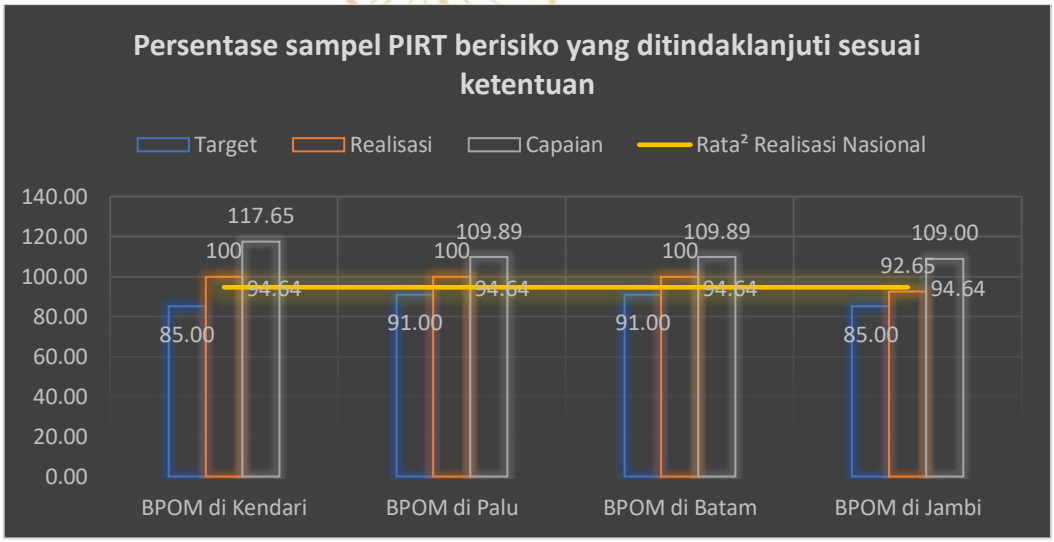

Gambar 17 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi adalah BPOM di Kendari, BPOM di Palu dan BPOM di Batam sedangkan realisasi terendah BPOM di Jambi. Pada keempat balai yang diperbandingkan realisasi kinerja telah melampaui targetnya, tetapi hanya BPOM di Jambi yang realisasinya berada dibawah rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target Tahun 2025. Hal ini menunjukkan kinerja BPOM di Kendari dalam pengawasan produk Pangan Olahan baik dari pengawasan hingga pengujian sesuai pedoman sampling. Selain itu, keberhasilan ini juga diupayakan melalui koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan, pengujian, dan Subbag TU. Substansi pemeriksaan menyerahkan sampel ke laboratorium sesuai kesepakatan yang tertuang dalam SOP. Sehingga ketika waktu pelaporan, sampel yang masuk di laboratorium telah selesai diuji. Koordinasi secara aktif dengan *supporting system* bagian pengadaan terkait pemenuhan kebutuhan laboratorium juga menjadi pendukung keberhasilan capaian. Selain itu melalui upaya koordinasi secara aktif dalam regionalisasi laboratorium, untuk mengawal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyelesaian pengujian secara tepat waktu.

Tabel 21 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Konsistensi terhadap kesepakatan yang telah dilakukan (Pemeriksaan, Pengujian dan Subbag TU) dalam pelaksanaan sampling dan distribusi sampel	Agar membuat perencanaan sampling berdasar analisa risiko	Melakukan perencanaan sampling berdasar analisa risiko	TW I 2026	Y	O-13	Sampel masuk tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati
2	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaporan Pengawasan dan Pengujian Obat dan Makanan melalui Aplikasi SIPT sampai Operator Pusat tidak tepat waktu	Perlu dilakukan koordinasi secara aktif dengan Tim TI Pusdatin dan PPPOMN terkait gangguan SIPT	1. Petugas melakukan monitoring rutin status aplikasi SIPT 2. Koordinasi aktif antara Pengguna Aplikasi, Tim TI dan Pusat (Pusdatin maupun PPPOMN) melalui Aplikasi KATALISTIK	TW I 2026	Y	IT-01	Hasil Pengawasan dan Pengujian Obat dan Makanan melalui Aplikasi SIPT sampai Operator Pusat tidak tepat waktu
3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pengadaan reagen/media terhambat	Tim pengujian berkoordinasi aktif dengan Subbag TU (Penganggaran, Pengadaan) dalam perencanaan pengadaan reagen/media laboratorium	1. Tim Pengujian membuat perencanaan kebutuhan secara rutin 2. Pengusulan penambahan anggaran melalui revisi anggaran	TW I 2026	Y	O-14	Proses pengujian sampel terhambat
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target melampaui 110%, dikarenakan penetapan target terlalu rendah	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	Perlu dilakukan reviu terhadap target indikator tahun 2026, pada penyusunan PK 2026	Jan-Feb 2026	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

BPOM di Kendari telah mencapai realisasi terhadap indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan capaian indikator ini dimasa mendatang adalah melaksanakan kegiatan sesuai renlak yang telah disusun. Tagging anggaran indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada RO QIA.001 sebesar 8% dari total anggaran pada RO QIA.001. Realisasi anggaran pada RO QIA.001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 98,20% dengan capaian output 100,61%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 didukung komitmen petugas untuk melaksanakan sampling dan pengujian tepat waktu. Selain itu koordinasi secara aktif dengan supporting system bagian pengadaan terkait pemenuhan kebutuhan laboratorium (pengadaan reagan/media pengujian sampel) juga menjadi pendukung keberhasilan kegiatan pada RO QIA.001.

6] Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- ✓ Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- ✓ Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tindak lanjut pengawasan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 22 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89	90,94	102,18	Sangat Baik

*Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan = (A+B)/2

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti lintas sektor = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

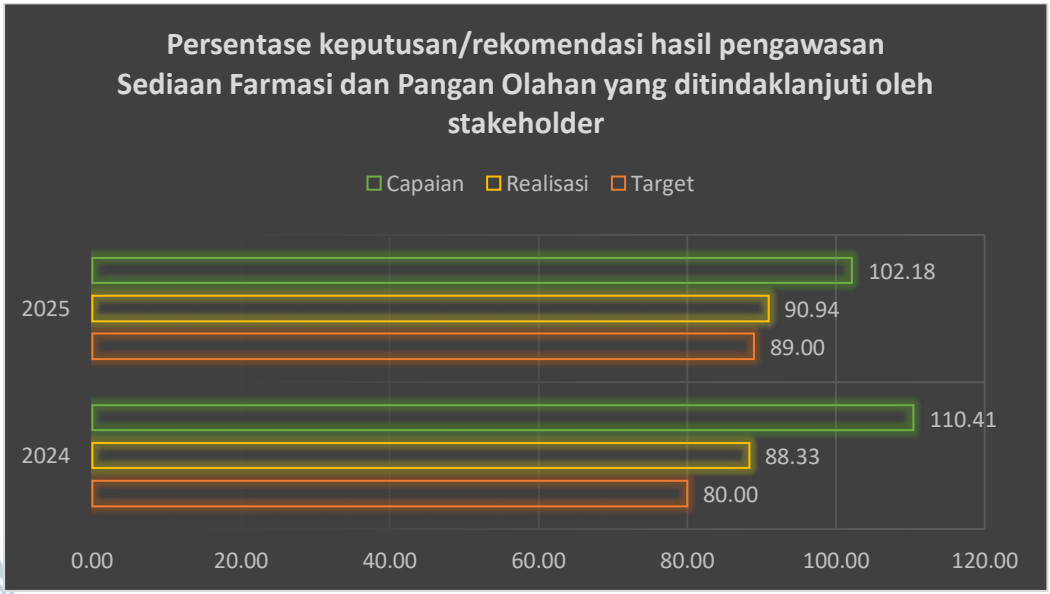

Gambar 18 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025 dibandingkan Tahun sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai POM di Kendari Tahun 2025 sebesar 90,94%; lebih tinggi dibanding Tahun 2024 sebesar 88,3%. Sedangkan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai POM di Kendari Tahun 2025 sebesar 102,18%; lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 sebesar 110,41%. Penurunan capaian ini dikarenakan adanya kenaikan target yang signifikan pada Tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	93	90,94	97,78	▲ Akan Tercapai

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2025 mendekati target jangka menengah tahun 2029. Dan berdasarkan tren peningkatan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya maka target jangka menengah tahun 2029 sebesar 93% dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Realisasi kinerja balai perlu diperbandingkan denan realisasi kinerja balai lain yang setara untuk mengukur efektifitas kinerja balai. Perbandingan kinerja Balai POM di Kendari terhadap balai yang setara terhadap persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

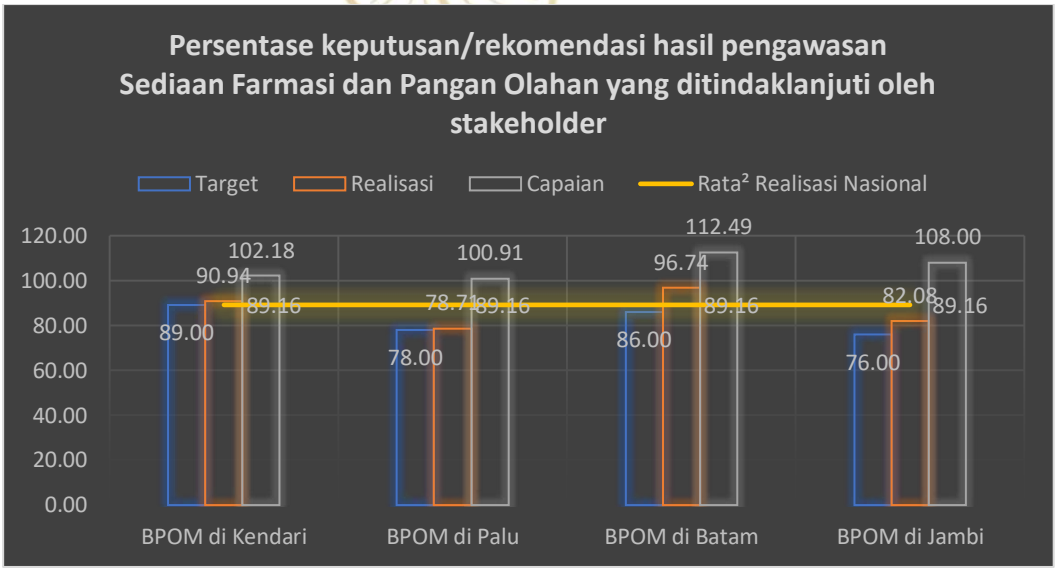

Gambar 19 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025 dengan Balai setara

Grafik di atas menggambarkan bahwa Balai POM di Batam memiliki realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tertinggi sebesar 96,74%, sedangkan Balai POM di Palu memiliki realisasi terendah 78,7%. Balai POM di Kendari sendiri memiliki realisasi 90,94% yang nilainya di atas rata-rata realisasi nasional sebesar 89,16%. Pada keempat balai yang diperbandingkan, Balai POM di Jambi dan Balai POM di Palu capaian kinerjanya msih berada dibawah rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target tahunan. Realisasi ini tercapai karena Balai POM di Kendari selalu berkoordinasi dengan lintas sektor, penerima surat tindak lanjut untuk segera menyelesaikan perbaikan CAPA. Dalam Upaya tersebut, Balai POM di Kendari memberi kesempatan kepada pelaku untuk memghubungi petugas Balai POM bla kesulitan dalam dalam menyusun CAPA. Hubungan seperti ini akan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan semakin tanggap/responsif terhadap rekomendasi hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

inspeksi yang diberikan. Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan capaian indikator ini dimasa mendatang adalah komunikasi yang aktif kepada pemilik/ penanggung jawab sarana dan stakeholder.

Tabel 24 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Pemberian sanksi kepada pelaku usaha tidak menimbulkan efek jera	Petugas lebih proaktif kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti perbaikan CAPA	Mengingatkan ke pelaku usaha terkait perbaikan CAPA melalui pesan Whatsapp	TW I 2026	Y	S-04	Feedback pelaku usaha dalam pembuatan CAPA belum sesuai time line
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kurangnya pemahaman pemilik sarana dalam memahami dampak/risiko dari produk TMK	Koordinasi dengan pihak berwenang dan kepolisian dalam pemeriksaan sarana yang dinilai tidak kooperatif	Petugas perlu didampingi pihak kepolisian untuk pemilik sarana yang tidak kooperatif	TW I 2026	Y	S-06	Petugas pemeriksaan kesulitan menindaklanjuti hasil temuan produk tidak memenuhi ketentuan di sarana
3	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Petugas memiliki beban kinerja yang cukup padat	Agar rutin melakukan monitoring terhadap tindaklanjut hasil pengawasan Sarana/ Fasilitas produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	Monitoring Surat Tindak Lanjut hasil pemeriksaan oleh Petugas secara konsisten	TW I 2026	Y	SDM-13	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan tidak mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU).
4	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kurangnya integritas pegawai dalam menjalankan tugas	Peningkatan pembudayaan CoreValue ASN BerAKHLAK dan perbaikan pola rotasi internal BPOM di Kendari	1.Pelaporan ke Sang Integritas setiap triwulan; 2. Pelaporan melalui Kanal Pengaduan BPOM di Kendari secara berkala (WBS, Waras); 3. Membuat Pakta Integritas; 4. Rotasi petugas pemeriksaan	TW I 2026	Y	R-04	Hasil pemeriksaan/tindak lanjut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan atau tidak sesuai ketentuan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

BPOM di Kendari telah mencapai realisasi terhadap indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Tagging indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada kegiatan RO QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebesar 2% dan QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebesar 1%. Realisasi anggaran Tahun 2025 pada RO QIC.001 sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

100% dengan capaian output 100%; sedangkan realisasi anggaran QIC.004 sebesar 99,98% dengan capaian output sebesar 110,64%. Pencapaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan merupakan satu bagian dengan kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIC.001 dan QIC.004 didukung upaya kerjasama/komitmen dengan pemangku kepentingan yang baik diharapkan pemangku kepentingan menjadi semakin tanggap/responsif terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diberikan.

7] Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi (1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit); (2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen Kesehatan; dan (3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 25 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa	87	100	114,94	Tidak Dapat Disimpulkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

   = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

   = (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi

   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

   = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

   = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

   = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

   Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain:

A. Pemenuhan target sarana produksi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%

B. Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

C. Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan tercapai sesuai target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada ketiga balai yaitu BPOM di Kendari, BPOM di Palu dan BPOM di Batam telah mencapai maksimal 100%. Pada keempat balai yang diperbandingkan realisasi kinerja telah melampaui targetnya, namun hanya BPOM di Jambi yang realisasinya masih dibawah rata-rata realisasi Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

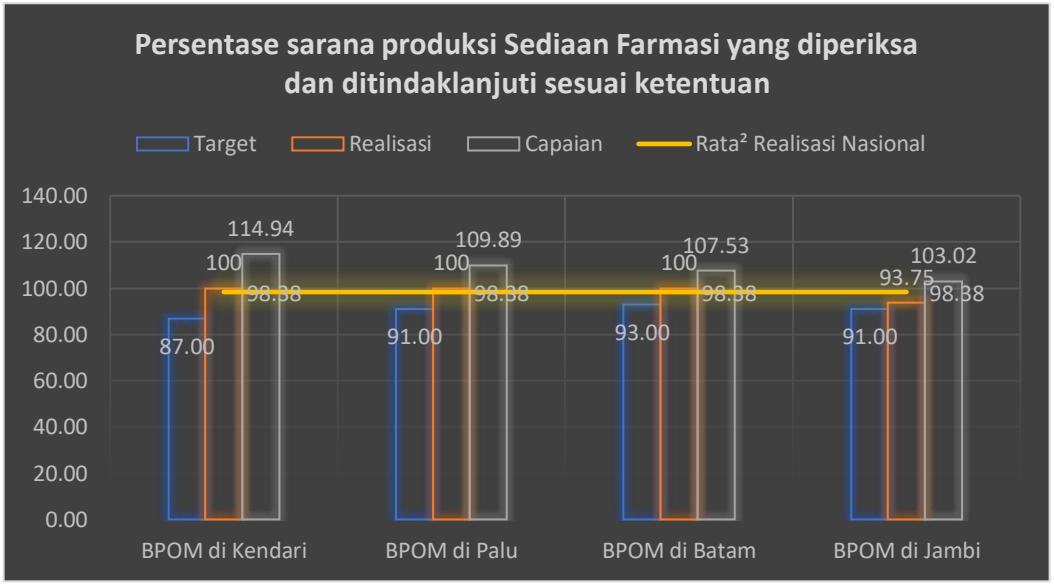

Gambar 20 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target Tahun 2025. Sarana produksi Sediaan Farmasi di Sulawesi Tenggara berupa Usaha Mikro-Kecil Obat Tradisional (UMOT dan UKOT). Pemeriksaan terakhir untuk sarana produksi UKOT dilakukan pada bulan November 2024, dan UMOT pada Oktober 2024, sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT tersebut dilakukan pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

September 2025.

Tabel 27 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemberian sanksi kepada pelaku usaha tidak menimbulkan efek jera	Petugas lebih proaktif kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti perbaikan CAPA	Mengingatkan ke pelaku usaha terkait perbaikan CAPA melalui pesan Whatsapp	TW I 2026	Y	S-04	Feedback pelaku usaha dalam pembuatan CAPA belum sesuai time line
2	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kurangnya pemahaman pemilik sarana dalam memahami dampak/risiko dari produk TMK	Koordinasi dengan pihak berwenang dan kepolisian dalam pemeriksaan sarana yang dinilai tidak kooperatif	Petugas perlu didampingi pihak kepolisian untuk pemilik sarana yang tidak kooperatif	TW I 2026	Y	S-06	Petugas pemeriksaan kesulitan menindaklanjuti hasil temuan produk tidak memenuhi ketentuan di sarana
3	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Petugas memiliki beban kinerja yang cukup padat	Agar rutin melakukan monitoring terhadap tindaklanjut hasil pengawasan Sarana/ Fasilitas produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	Monitoring Surat Tindak Lanjut hasil pemeriksaan oleh Petugas secara konsisten	TW I 2026	Y	SDM-13	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan tidak mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU).
4	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target melampaui 110%, dikarenakan penetapan target terlalu rendah	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	Perlu dilakukan reviu terhadap target indikator tahun 2026, pada penyusunan PK 2026	Jan-Feb 2026	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

BPOM di Kendari telah mencapai realisasi terhadap indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; dengan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap UKOT dan UMOT dilakukan September 2025. Tagging indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada kegiatan RO QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebesar 20% dari total anggaran pada RO QIC.001. Realisasi anggaran pada RO QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian output 100%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 terhadap tagging indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berkat komitmen petugas dalam melaksanakan renlak yang telah ditetapkan.

8] Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- ✓ Ketepatan waktu tindak lanjut
- ✓ Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 28 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung berdasarkan:

$$\frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Seluruh\ Sarana\ yang\ Diperiksa}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- ✓ Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- ✓ Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman meliputi aspek:
- ✓ ketepatan waktu: pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;
  a) kesesuaian tindak lanjut: kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

     kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk: surat dinas, rapat/FGD, advokasi.
  b) Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas

     Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:
     - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit;
     - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

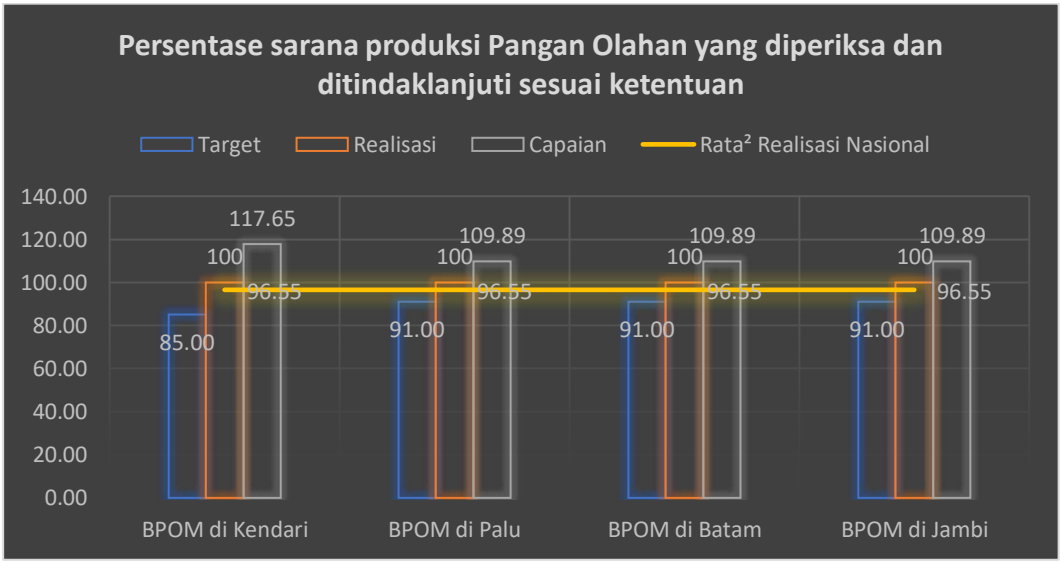

Gambar 21 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada keempat balai telah mencapai maksimal 100% dan melampaui rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Tahun 2025 telah mencapai target. Hal ini menunjukkan kinerja BPOM di Kendari dalam pengawasan sarana produksi makanan. Selain itu hal ini juga menunjukkan peningkatan pengetahuan dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Namun demikian, BPOM di Kendari juga menghadapi beberapa kendala dalam pencapaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diantaranya:

- Pemeriksaan sarana produksi masih beririsan dengan pemeriksaan distribusi, dikarenakan adanya pembukaan anggaran (relaksasi) pada TW II sehingga yang menjadi prioritas pada pemeriksaan sarana distribusi;
- Perbedaan persepsi (kompetensi) petugas dalam pemeriksaan sarana produksi pangan.

Tabel 30 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemberian sanksi kepada pelaku usaha tidak menimbulkan efek jera	Petugas lebih proaktif kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti perbaikan CAPA	Mengingatkan ke pelaku usaha terkait perbaikan CAPA melalui pesan Whatsapp	TW I 2026	Y	S-04	Feedback pelaku usaha dalam pembuatan CAPA belum sesuai time line
2	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kurangnya pemahaman pemilik sarana dalam memahami dampak/risiko dari produk TMK	Koordinasi dengan pihak berwenang dan kepolisian dalam pemeriksaan sarana yang dinilai tidak kooperatif	Petugas perlu didampingi pihak kepolisian untuk pemilik sarana yang tidak kooperatif	TW I 2026	Y	S-06	Petugas pemeriksaan kesulitan menindaklanjuti hasil temuan produk tidak memenuhi ketentuan di sarana
3	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Petugas memiliki beban kinerja yang cukup padat	Agar rutin melakukan monitoring terhadap tindaklanjut hasil pengawasan Sarana/ Fasilitas produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	Monitoring Surat Tindak Lanjut hasil pemeriksaan oleh Petugas secara konsisten	TW I 2026	Y	SDM-13	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan tidak mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU).
4	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target melampaui 110%, dikarenakan penetapan target terlalu rendah	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu	Perlu dilakukan reviu terhadap target indikator tahun 2026, pada penyusunan PK 2026	Jan-Feb 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pesimis)					

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai POM di Kendari berhasil mencapai target Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Tagging indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada kegiatan RO QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebesar 78% dari total anggaran pada RO QIC.001. Realisasi anggaran pada RO QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian output 100%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 terhadap tagging indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berkat komitmen petugas dalam melakukan pendampingan dan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memperoleh izin edar produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan. Pendampingan terhadap UMKM pangan melalui Inovasi “SiPINTAR” dengan memfasilitasi PIRT untuk memperoleh sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Inovasi ini di kembangkan menjadi Inovasi Pintar Plus dengan melakukan pendampingan UMKM Pangan Olahan untuk naik kelas dari PIRT menjadi produk Pangan dengan registrasi MD.

9] Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- ✓ Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- ✓ Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
- ✓ Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- ✓ Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 31 Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	100	104,71	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung sebesar= (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %
2) Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%
3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut)

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Target Target Jangka Menengah

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,5	100	101,52	▲ Tercapai/ Melampaui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

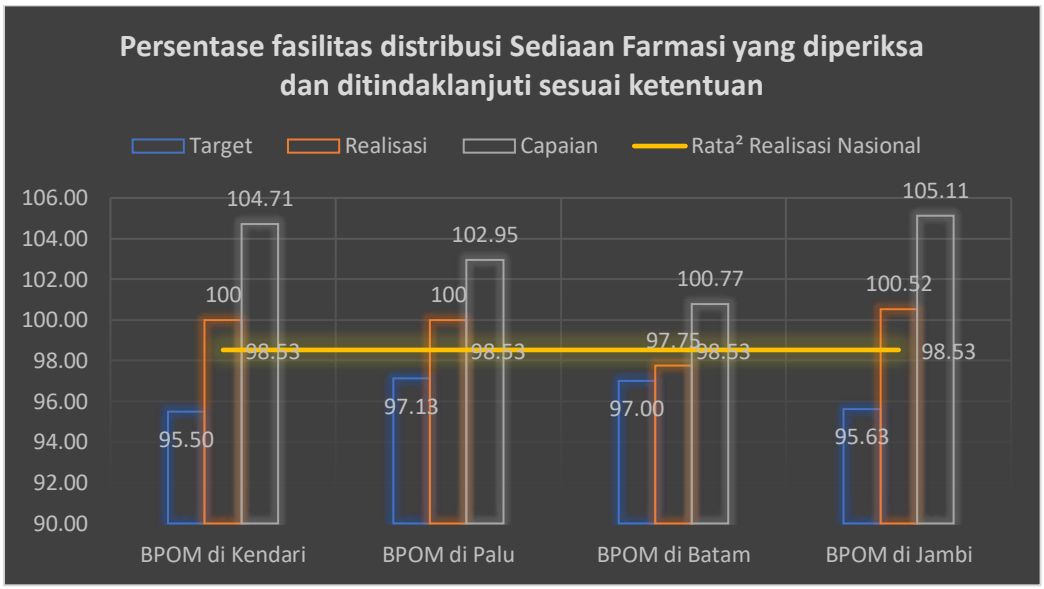

Gambar 22 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada BPOM di Kendari, BPOM di Palu dan BPOM di Jambi telah mencapai maksimal 100%. Pada keempat balai, realisasi telah melampaui target, tetapi hanya BPOM di Batam yang realisasinya berada dibawah rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari telah mencapai target Tahun 2025. Hal ini menunjukkan peningkatan tingkat kepatuhan pelaku usaha terkait penerapan cara distribusi obat yang baik sehingga berdampak pada sarana distribusi obat yang memenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketentuan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator diantaranya:

1) Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan Farmasi secara optimal;
2) Monitoring dan reviu secara berkala terkait adanya perubahan target sarana;
3) Pemerataan kompetensi dan pengetahuan kepada petugas melalui pelatihan/bimbingan teknis;
4) Pendampingan dari petugas pengawas senior yang kompeten kepada personil baru;
5) sosialisasi/bimbingan teknis kepada sarana distribusi sediaan Farmasi tentang cara distribusi obat yang baik

Tabel 33 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemberian sanksi kepada pelaku usaha tidak menimbulkan efek jera	Petugas lebih proaktif kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti perbaikan CAPA	Mengingatkan ke pelaku usaha terkait perbaikan CAPA melalui pesan Whatsapp	TW I 2026	Y	S-04	Feedback pelaku usaha dalam pembuatan CAPA belum sesuai time line
2	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kurangnya pemahaman pemilik sarana dalam memahami dampak/risiko dari produk TMK	Koordinasi dengan pihak berwenang dan kepolisian dalam pemeriksaan sarana yang dinilai tidak kooperatif	Petugas perlu didampingi pihak kepolisian untuk pemilik sarana yang tidak kooperatif	TW I 2026	Y	S-06	Petugas pemeriksaan kesulitan menindaklanjuti hasil temuan produk tidak memenuhi ketentuan di sarana
3	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Petugas memiliki beban kinerja yang cukup padat	Agar rutin melakukan monitoring terhadap tindaklanjut hasil pengawasan Sarana/ Fasilitas produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	Monitoring Surat Tindak Lanjut hasil pemeriksaan oleh Petugas secara konsisten	TW I 2026	Y	SDM-13	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan tidak mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU).
4	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target melampaui 110%, dikarenakan penetapan target terlalu rendah	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	Perlu dilakukan reviu terhadap target indikator tahun 2026, pada penyusunan PK 2026	Jan-Feb 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari telah mencapai target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025. Tagging indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada kegiatan RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebesar 47% dari total anggaran pada RO QIC.004. Realisasi anggaran pada RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 99,98% dengan capaian output 110,64%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 terhadap tagging indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berkat komitmen petugas dalam melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada sarana distribusi sediaan Farmasi tentang penerapan cara distribusi obat yang baik sehingga berdampak pada sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan.

10] Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2) Ketepatan waktu pelaporan
3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 34 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

$$\frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa\ Sesuai\ Ketentuan}{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A = pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

B = Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

C = Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

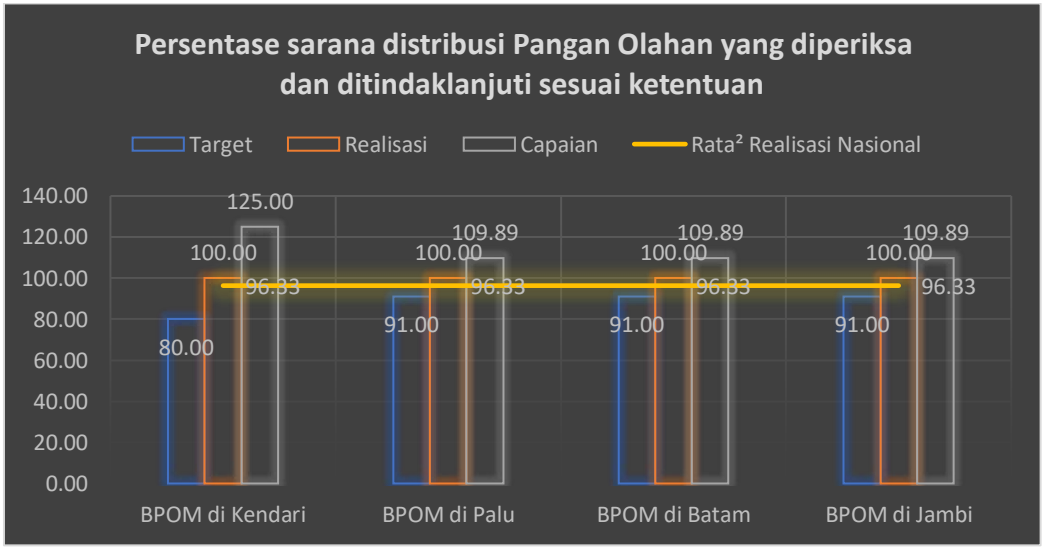

Gambar 23 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada keempat balai telah mencapai maksimal 100% dan melampaui target, dan rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari telah mencapai target Tahun 2025. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang meningkat terkait penerapan cara distribusi makanan yang baik sehingga berdampak pada sarana distribusi Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator diantaranya:

1) Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan secara optimal;
2) Monitoring dan reviu secara berkala terkait adanya perubahan target sarana;
3) Pemerataan kompetensi dan pengetahuan kepada petugas melalui pelatihan/bimbingan teknis;
4) Pendampingan dari petugas pengawas senior yang kompeten kepada personil baru;
5) Sosialisasi/bimbingan teknis kepada sarana distribusi Pangan Olahan tentang cara distribusi makanan yang baik.

Tabel 36 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemberian sanksi kepada pelaku usaha tidak menimbulkan efek jera	Petugas lebih proaktif kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti perbaikan CAPA	Mengingatkan ke pelaku usaha terkait perbaikan CAPA melalui pesan Whatsapp	TW I 2026	Y	S-04	Feedback pelaku usaha dalam pembuatan CAPA belum sesuai time line
2	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kurangnya pemahaman pemilik sarana dalam memahami dampak/risiko dari produk TMK	Koordinasi dengan pihak berwenang dan kepolisian dalam pemeriksaan sarana yang dinilai tidak kooperatif	Petugas perlu didampingi pihak kepolisian untuk pemilik sarana yang tidak kooperatif	TW I 2026	Y	S-06	Petugas pemeriksaan kesulitan menindaklanjuti hasil temuan produk tidak memenuhi ketentuan di sarana
3	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Petugas memiliki beban kinerja yang cukup padat	Agar rutin melakukan monitoring terhadap tindaklanjut hasil pengawasan Sarana/ Fasilitas produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	Monitoring Surat Tindak Lanjut hasil pemeriksaan oleh Petugas secara konsisten	TW I 2026	Y	SDM-13	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan tidak mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU).
4	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	Target melampaui 110%, dikarenakan penetapan target terlalu rendah	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah	Perlu dilakukan reviu terhadap target indikator tahun 2026, pada penyusunan PK 2026	Jan-Feb 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ketentuan		melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)					

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai POM di Kendari berhasil mencapai target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025. Tagging indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada kegiatan RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebesar 42% dari total anggaran pada RO QIC.004. Realisasi anggaran pada RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 99,98% dengan capaian output 110,64%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 terhadap tagging indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berkat komitmen petugas dalam melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada sarana distribusi Pangan Olahan tentang cara distribusi makanan yang baik sehingga berdampak pada sarana distribusi makanan yang memenuhi ketentuan.

11] Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 37 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,77	100	112,65	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan **= (A+B+C+D+E)/5**

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan = $\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} x100\%$

b. Ketepatan waktu pelaporan = $\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} x100\%$

B. Persentase Iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a) Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target =

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b) Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%.

C. Persentase Iklan OBA yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a) Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

b) Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

c) Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%

b. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) X 40%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Pada 29 Agustus 2025 terdapat perubahan PK dan RAPK Tahun 2025. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan pada target indiaktor iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sesuai desk yang dilaksanakan sebelumnya (sebelum penetapan PK revisi), telah disepakati kenaikan target iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dari semula 86,57% menjadi 88,77%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 38 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,37	100	104,85	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

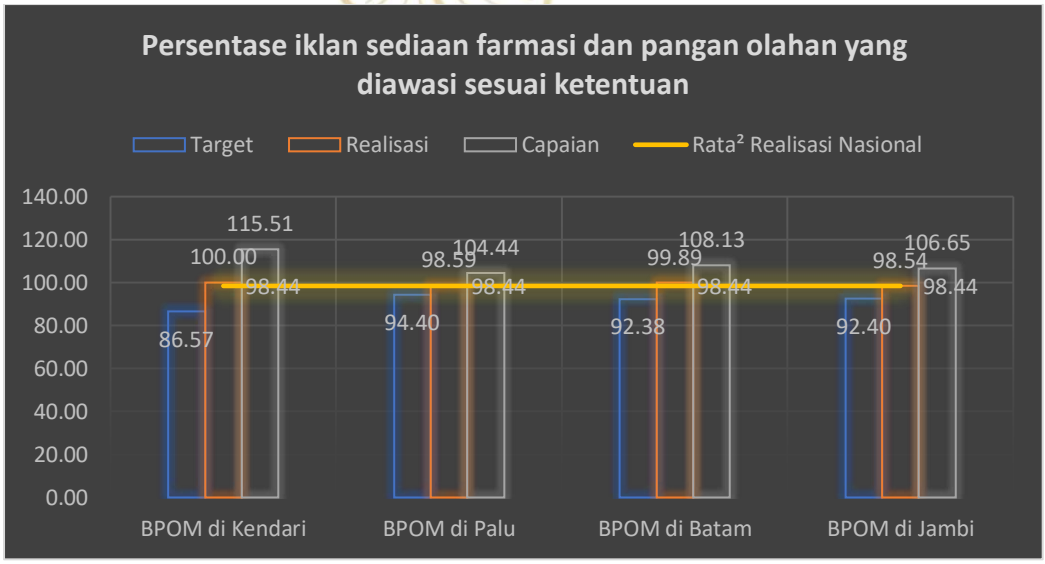

Gambar 24 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, BPOM di Kendari mencapai realisasi maksimal sebesar 100%. Pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasi indikator telah melampaui target dan rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Tahun 2025 telah melampaui target. Hal ini menunjukkan komitmen petugas BPOM di Kendari dalam meningkatkan kinerja pengawasan produk beredar, termasuk pengawasan penandaan produk.

Tabel 39 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target melampaui 110%, dikarenakan penetapan target terlalu rendah	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih	Perlu dilakukan reviu terhadap target indikator tahun 2026, pada penyusunan PK 2026	Jan-Feb 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			realistis (tidak terlalu pesimis)					

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai POM di Kendari berhasil mencapai target Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Tahun 2025. Tagging indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada kegiatan RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebesar 1% dari total anggaran pada RO QIC.004. Realisasi anggaran pada RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 99,98% dengan capaian output 110,64%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 terhadap tagging indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan berkat komitmen petugas dalam meningkatkan kinerja pengawasan produk beredar, termasuk pengawasan penandaan produk.

12] Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: rokok; cerutu; rokok daun; tembakau iris; tembakau padat dan cair; dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 40 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	86.1	107.63	Sangat Baik

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dihitung **= (A+B)/2**

A. Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B. Persentase Iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodic setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

Nilai komponen Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar BPOM di Kendari Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

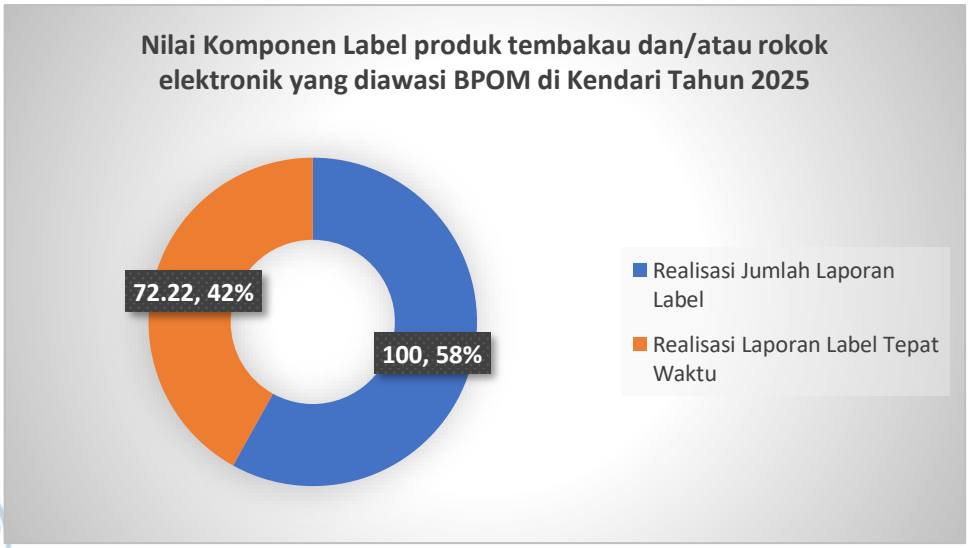

Gambar 25 Komponen Nilai Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 BPOM di Kendari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama Renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 41 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian	Kriteria
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84	86,1	102,50	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

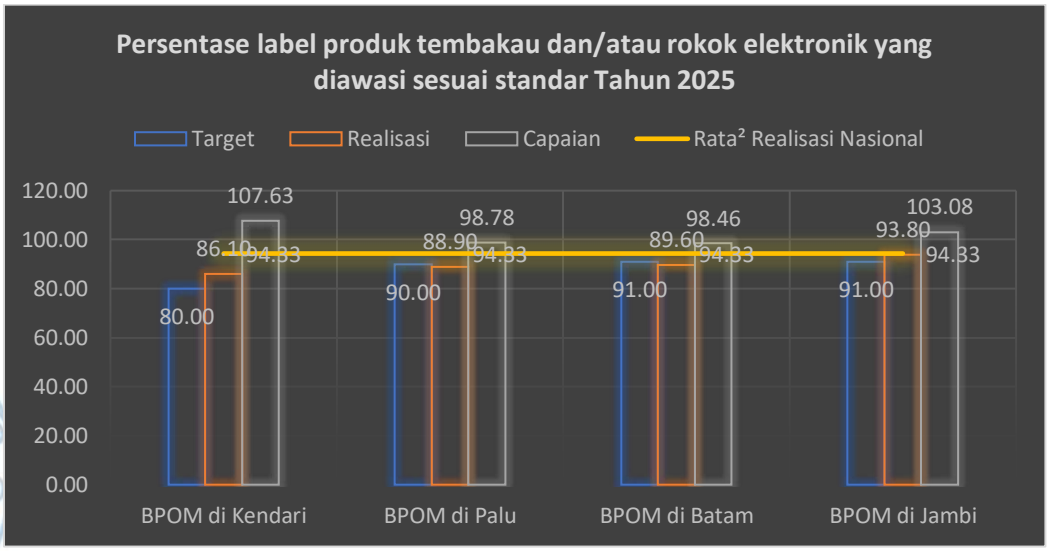

Gambar 26 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan Balai setara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasi indikator telah melampaui targetnya. BPOM di Jambi mencapai realisasi tertinggi sebesar 93,80%. Pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasinya masih berada dibawah rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar BPOM di Kendari pada Tahun 2025 telah mencapai target. Hal ini menunjukkan komitmen petugas BPOM di Kendari dalam meningkatkan kinerja pengawasan penandaan produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Namun, BPOM di Kendari belum maksimal dalam komponen pelaporan label tepat waktu, dengan nilai realisasi sebesar 72,22% dibawah rata-rata nasional sebesar 77,4% (Sumber: Paparan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif, pada Bimtek SAKIP 6 Februari 2026). Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan keberhasilan capaian kinerja indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah:

1) Peningkatan komitmen petugas dalam pemenuhan ketepatan waktu pelaporan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilakukan melalui SIPT;
2) Melakukan monitoring terhadap laporan pengawasan label yang dikirimkan melalui SIPT ke Pusat agar dapat terlaporkan sesuai target jumlah dan tepat waktu;
3) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 42 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pelaporan Pengawasan dan Pengujian Obat dan Makanan melalui Aplikasi SIPT sampai Operator Pusat tidak tepat waktu	Perlu dilakukan koordinasi secara aktif dengan Tim TI Pusdatin dan PPPOMN terkait gangguan SIPT	1. Petugas melakukan monitoring rutin status aplikasi SIPT 2. Koordinasi aktif antara Pengguna Aplikasi, Tim TI dan Pusat (Pusdatin maupun PPPOMN) melalui Aplikasi KATALISTIK	TW I 2026	Y	IT-01	Hasil Pengawasan dan Pengujian Obat dan Makanan melalui Aplikasi SIPT sampai Operator Pusat tidak tepat waktu

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai POM di Kendari berhasil mencapai target Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Tahun 2025. Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator adalah pelaksanaan kegiatan Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (RO QIA.002). Tagging anggaran indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Pada RO QIA.002 sebesar Rp.15.259.340,00 (3%) dari total anggaran pada RO QIA.002. Realisasi anggaran pada RO QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Tahun 2025 sebesar 98,80% dengan capaian output 100,40%. Diharapkan pada Tahun 2026, indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tert*agging* pada kegiatan (RO) tersendiri.

13] Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Resistensi Antimikroba (AMR) merupakan ancaman serius akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional. BPOM melalui UPT memiliki peran strategis dalam mendukung pengendalian AMR, khususnya pada aspek pengawasan peredaran dan penggunaan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 43 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	100	100	100	Baik

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dihitung **= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D**

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotic terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 44 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	Akan Tercapai

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan tercapai sesuai target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Berdasarkan grafik berikut ini diketahui bahwa realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasi indikator telah melampaui targetnya. NAmun, hanya BPOM di Kendari yang realisasinya masih berada dibawah rata-rata realisasi Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

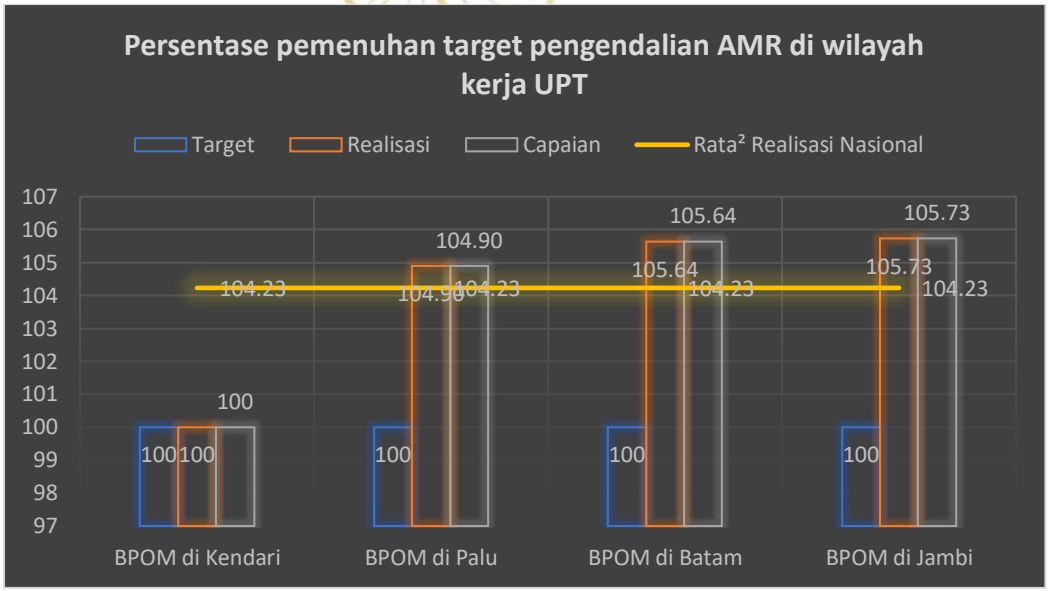

Gambar 27 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dengan Balai setara

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Resistensi Antimikroba (AMR) merupakan ancaman serius akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Presentase Kesesuaian UPT dalam Melaksanakan Rencana Aksi Pengendalian AMR merupakan alat ukur untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR di UPT secara komprehensif. Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT BPOM di Kendari pada Tahun 2025 telah mencapai target. Hal ini berkat komitmen petugas dalam mengawal pengendalian AMR di wilayah UPT BPOM di Kendari. Beberapa hal yang menjadi evaluasi dalam pencapaian indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimtek belum sepenuhnya difokuskan pada kriteria penerima bimtek sesuai juknis. Pada tahun 2026, diharapkan pelaksanaan bimtek difokuskan kepada APJ pada apotek yang masih menyerahkan antibiotika tanpa resep dokter;
2. Pelaksanaan publikasi belum sesuai dengan juknis. Publikasi hasil pengawasan seharusnya dilakukan dengan mekanisme n+1, yaitu menyampaikan hasil pengawasan periode sebelumnya. Sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

contoh, publikasi pada TW IV seharusnya memuat hasil pengawasan TW III dan dilaksanakan pada awal TW, bukan menyampaikan hasil pengawasan TW IV pada akhir TW;

3. Diharapkan dapat menggaet Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) sehingga dapat memanfaatkan SE tersebut secara optimal sebagai instrumen pendukung pengendalian AMR di wilayah; serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya.

a. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai POM di Kendari telah mencapai target indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada Tahun 2025. Tagging indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada kegiatan RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebesar 9% dari total anggaran pada RO QIC.004. Realisasi anggaran pada RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 99,98% dengan capaian output 110,64%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 terhadap tagging indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT berkat komitmen petugas dalam mengawal pengendalian AMR di wilayah UPT BPOM di Kendari.

14] Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional**

  Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi**

  Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota**

  Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota**

  Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- ✓ SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1) Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;
  3) Standar Kompetensi Laboratorium;
  4) Standar Metode yang terverifikasi.
- ✓ SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;
  3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 45 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,50	78,90	105,91	Sangat Baik

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 =

(50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dari nilai asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Detail Nilai pemenuhan Lab BPOM di Kendari Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

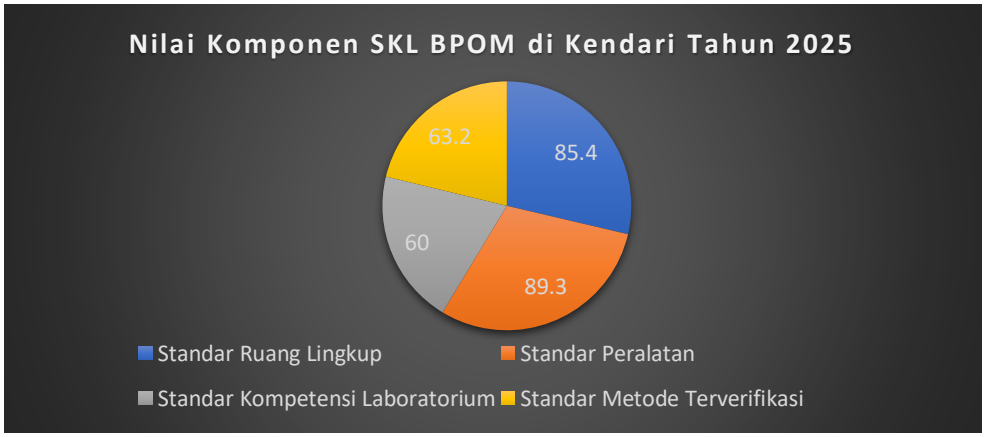

Gambar 28 Nilai komponen pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai SKL Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Komponen penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) 2025-2029 berjumlah 4 (empat) komponen, berbeda dari periode 2020-2024 berjumlah 3 (tiga) komponen. Terdapat penyesuaian pada komponen Standar Kompetensi Personel menjadi Standar Kompetensi Laboratorium serta penambahan 1 (satu) komponen baru yaitu Standar Metode Terverifikasi. Sehingga, secara spesifik (per komponen pembentuk indikator) nilai SKL Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan.

Jika nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai SKL Tahun 2025 diperbandingkan dengan Tahun 2024, menunjukkan penurunan. Tetapi penurunan realisasi tersebut jika diperhitungkan penetapan target sesuai dengan manual indikator pada Tahun 2025, realisasi telah melampaui target sangat baik (capaian >100%).

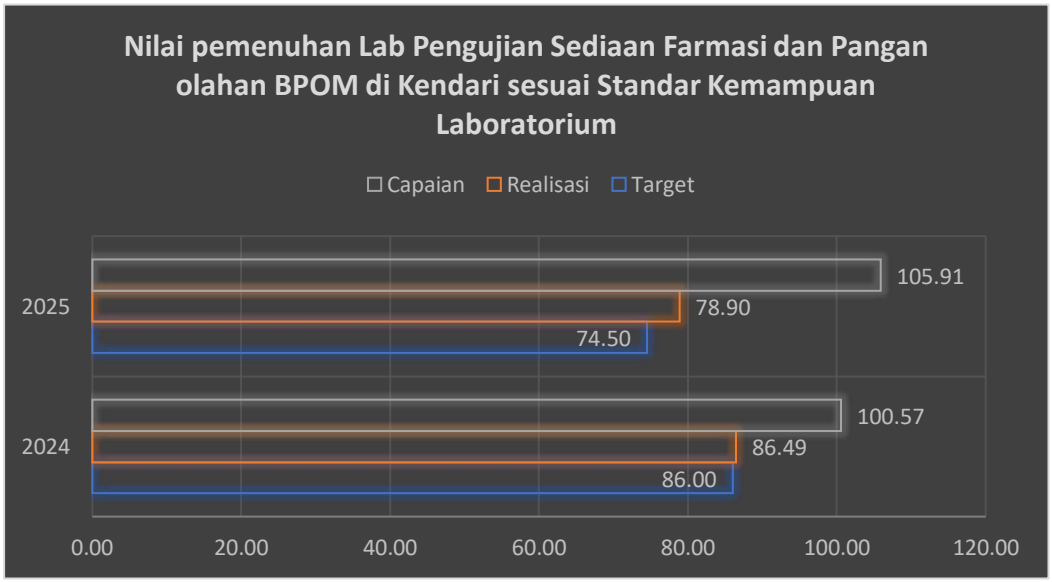

Gambar 29 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan table berikut ini diketahui bahwa realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2029, diproyeksikan akan tercapai dengan baik.

Tabel 46 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87	78,9	90,69	Akan Tercapai

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

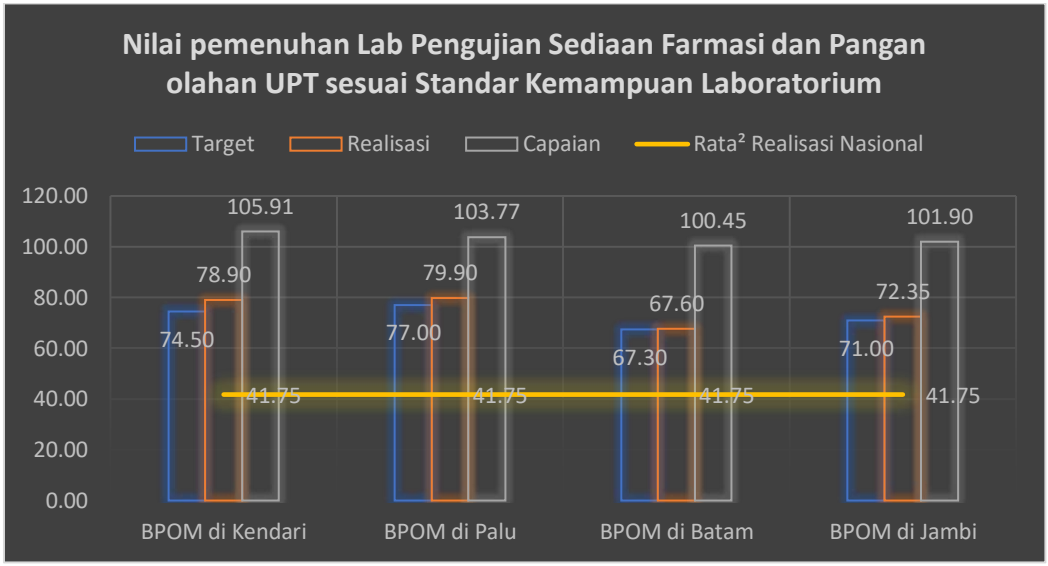

Gambar 30 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada keempat balai yang diperbandingkan, telah melampaui targetnya. BPOM di Palu mencapai realisasi nilai pemenuhan lab tertinggi sebesar 79,90. Pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasinya berada diatas rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium BPOM di Kendari pada Tahun 2025 telah mencapai target.

Beberapa program kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Tahun 2025 antara lain:

1) Penerapan integrasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 di setiap laboratorium pengujian
2) Melakukan kaji ulang dokumen mutu secara periodik, terutama terkait kalibrasi dan pemeriksaan antara
3) Kalibrasi dan verifikasi alat secara berkala setiap tahun untuk memastikan hasil pengujian tetap valid dan akurat
4) *Maintenance* alat rutin dilakukan guna memastikan kondisi laboratorium dalam kondisi terbaik
5) Pengadaan suku cadang, baku pembanding, reagensia, dilakukan dengan perencanaan yang baik

Dalam pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, BPOM di Kendari mengalami kendala diantaranya pada beberapa peralatan mengalami kerusakan, memerlukan perawatan namun terkendala anggaran.

Tabel 47 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Adanya mutasi internal dan penambahan pegawai baru sehingga mempengaruhi persentase pemenuhan standar kompetensi	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas laboratorium	1. Melaksanakan pelatihan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan 2. Melakukan uji banding antar personil dan perpenyeliaan	TW I 2026	Y	SDM-14	Pemenuhan Standar Kompetensi tidak terpenuhi
2	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Lantai epoksi Lab. Mikrobiologi tidak memenuhi standar KAN-BSN	Koordinasi dengan Tim Penganggaran (Subbag TU) terkait renovasi Laboratorium	Permintaan renovasi lantai Lab. Mikrobiologi	TW I 2026	Y	O-01	Kualitas hasil pengujian mikrobiologi tidak optimal
3	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan	Terjadi efisiensi anggaran	Koordinasi dengan Tim Penganggaran (Subbag TU) terkait	Pengusulan pengadaan peralatan	TW I 2026	Y	O-15	Pemenuhan standar peralatan tidak terpenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		pengadaan peralatan Laboratorium					
4	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Metode yang ada pada ruang lingkup tidak menjadi parameter uji kritis di pedoman sampling	Melakukan perencanaan pemenuhan ruang lingkup	Perencanaan pemenuhan ruang lingkup	TW I 2026	Y	O-16	Pemenuhan standar ruang lingkup tidak terpenuhi

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai POM di Kendari telah mencapai target Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Tahun 2025. Tagging indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada kegiatan RO PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice sebesar 100% dan RO RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice sebesar 100%. Realisasi anggaran pada RO PDD.001 sebesar 99,32% dengan capaian output 100% sedangkan RO RAB.001 sebesar 96,11% dengan capaian output 100%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO PDD.001 dan RAB.001 Tahun 2025 terhadap tagging indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; berkat upaya Tim Pengujian dalam mencapai pemenuhan Nilai pemenuhan Laboratorium sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, melalui:

1. Pengusulan anggaran Peningkatan kompetensi secara kontinyu baik eksternal maupun internal;
2) Pengusulan anggaran pengadaan, pemeliharaan dan suku cadang peralatan untuk memenuhi standar SKL sesuai GLP;
3) Peningkatan Kerjasama Substansi Pemeriksaan dan pengujian dalam pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL);
4) Melakukan koordinasi dengan Laboratorium sesama Region untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemenuhan sampel dalam rangka penambahan Ruang Lingkup.

15] Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a) Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah;
b) Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;
c) Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi adalah:

a) Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan;
b) Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 48 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	9,09	9,09	100	Baik

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dihitung:

$$\frac{Jumlah\ Kab/Kota\ yang\ BerhasilDidampingi\ Sesuai\ Pedoman}{Jumlah\ Kab/Kota\ di\ Wilayah\ Kerja\ UPT}\ x100\%$$

Jumlah target Kab/Kota di wilayah kerja UPT dihitung secara kumulatif.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 49 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	90,91	9,09	10,00	▼ Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 diperlukan upaya keras untuk mencapai target Tahun 2029. Target indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan target kumulatif dari jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja UPT selama lima tahun periode Renstra 2025-2029. Target Kabupaten/Kota yang didampingi BPOM di Kendari pada Tahun 2025 sebanya 1 Kabupaten dengan total jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 11; sehingga perlu upaya untuk dapat melakukan pendampingan dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

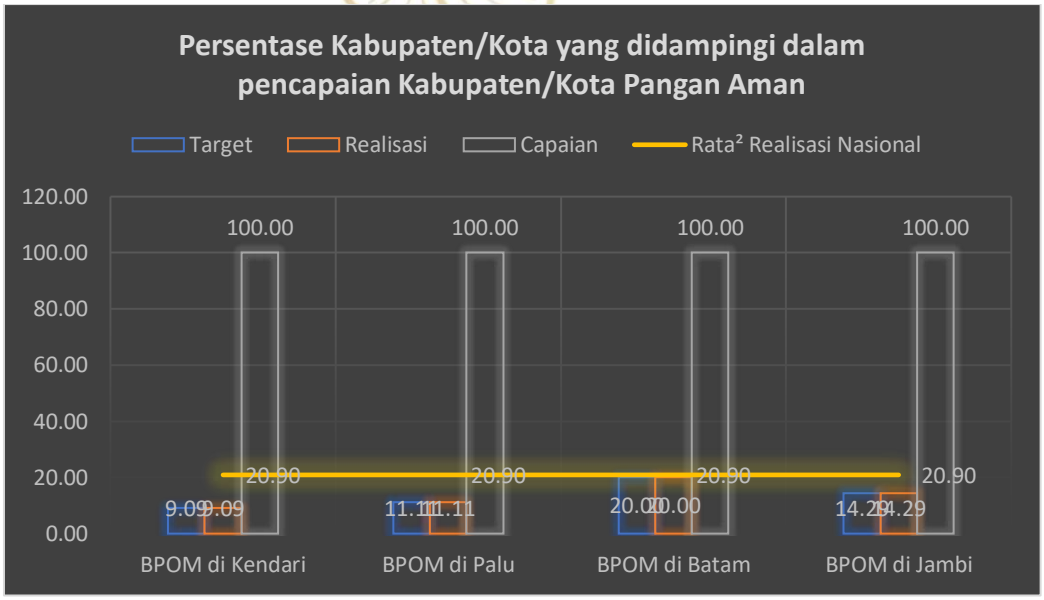

Gambar 31 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada keempat balai yang diperbandingkan, telah mencapai targetnya sebesar 100%, namun realisasinya masih berada dibawah rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman BPOM di Kendari pada Tahun 2025 telah mencapai target 9,09 atau 100%. Indikator ini mengukur persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dan menunjukkan kemajuan dalam implementasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Keberhasilan pencapaian indikator ini merupakan upaya yang telah dilakukan oleh BPOM di Kendari dalam melakukan audiensi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terkait koordinasi peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Capaian keberhasilan ini juga dipengaruhi dan didukung oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

beberapa faktor seperti:

1. Koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan oleh BPOM di Kendari berjalan efektif. Sebagai bentuk hasil koordinasi tersebut adalah komitmen pemerintah daerah berupa dukungan kepala daerah melalui SK, regulasi, atau alokasi anggaran terkait program keamanan pangan.
2. Sinergitas dan kolaborasi lintas OPD (Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, PMD dll) dalam pengawasan bersama dan rapat pembahasan perencanaan dan tindak lanjut dari implementasi tersebut.
3. Strategi Pendampingan Efektif yang dilakukan oleh BPOM di Kendari secara intensif dan terjadwal, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan pendekatan berbasis advokasi dan penguatan kapasitas.
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPOM di Kendari secara intensif dan berkala.

Tabel 50 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Keterbatasan komitmen daerah dalam regulasi atau pendukung kebijakan	Penguatan advokasi ke kepala daerah dan DPRD untuk dukungan regulasi dan anggaran	Penguatan advokasi ke kepala daerah dan DPRD untuk dukungan regulasi dan anggaran	TW I 2026	T		
2	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Pergantian pejabat atau rotasi ASN dalam lingkup OPD yang mempengaruhi keberlanjutan program	Penguatan advokasi ke kepala daerah dan DPRD untuk dukungan regulasi dan anggaran	Penguatan advokasi ke kepala daerah dan DPRD untuk dukungan regulasi dan anggaran	TW I 2026	T		
3	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Keterbatasan anggaran daerah atau tidak tersedianya alokasi APBD untuk mendukung intevensi dan penerapan berkelanjutan serta adanya efisiensi anggaran	Penguatan advokasi ke kepala daerah dan DPRD untuk dukungan regulasi dan anggaran	Penguatan advokasi ke kepala daerah dan DPRD untuk dukungan regulasi dan anggaran	TW I 2026	T		
4	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Masih kurangnya tenaga pengawas di daerah dan tingkat pengetahuan keamanan pangan yang masih rendah	Penguatan advokasi ke kepala daerah dan DPRD untuk dukungan regulasi dan anggaran	Penguatan advokasi ke kepala daerah dan DPRD untuk dukungan regulasi dan anggaran	TW I 2026	T		
5	Persentase Kabupaten/Kota	Program belum terintegrasi dalam	Integrasi program Kabupaten/Kota	Integrasi program Kabupaten/Kota	TW I 2026	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	perencanaan daerah, dan masih bersifat seremonial, belum sistemik	Pangan Aman dalam RPJMD dan RKPD	Pangan Aman dalam RPJMD dan RKPD				

Capaian persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam Program Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah daerah, efektivitas strategi pendampingan, ketersediaan sumber daya, serta dukungan lintas sektor. Keberlanjutan program sangat bergantung pada integrasi kebijakan daerah dan penguatan kapasitas kelembagaan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kendari telah mencapai target indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada Tahun 2025. Tagging anggaran indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada RO QIA.001 sebesar 5% dari total anggaran pada RO QIA.001. Realisasi anggaran pada RO QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 98,20% dengan capaian output 100,61%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT Tahun 2025 didukung komitmen petugas untuk melaksanakan sampling dan pengujian tepat waktu.

Capaian keberhasilan ini didukung upaya yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dalam mengawal program kab/kota pangan aman dengan mengkolaborasikan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD kab/kota. Hal-hal yang menjadi factor keberhasilan adalah:

1. Perencanaan dan agenda implementasi keamanan pangan disusun bersama OPD terkait di awal tahun.
2. Rapat Pembahasan secara teknis Pengawasan obat dan makanan baik secara offline maupun online serta pendampingan yang dilakukan secara intensif dan terjadwal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Komitmen Daerah dalam pelaksanaan keamanan pangan dengan melibatkan seluruh OPD terkait
4. Dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam bentuk Regulasi /SK seperti SK Tim Koordinasi Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), SK Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalaui Sadar Pangan Aman (Germas SAPA), SK Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)
5. Pengawasan Pre Market dan Post Market Industri Pangan Rumah Tangga (PIRT)
6. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis keamanan pangan yang diselenggarakan oleh OPD terkait baik melalui anngaran daerah
7. Monitoring dan evaluasi program pelaksanaan sinergitas dan kolaborasi keamanan pangan.



Gambar 32 Sasaran Kegiatan 2

Pencapaian Sasaran Kegiatan Kedua didukung oleh indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

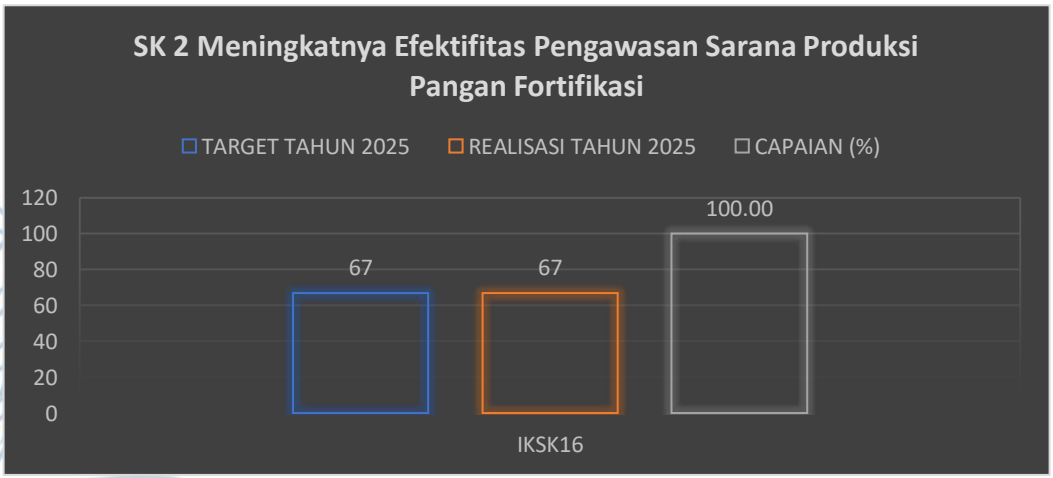

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16] Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah satu produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 51 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	100	Baik

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

$$\frac{Jumlah\ Sarana\ Produksi\ Pangan\ Fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Sarana\ Produksi\ Pangan\ Fortifikasi\ Keseluruhan\ yang\ berada\ di\ wilayah\ UPT} \ x\ 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 52 Perbandingan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	67	67	▼ Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan belum mencapai target jangka menengahnya. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan pada target perencanaan untuk tahun 2029 agar diperoleh capaian sesuai target jangka menengahnya dengan memperhatikan *baseline* data sarana produksi pangan fortifikasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada keempat balai yang diperbandingkan, telah mencapai targetnya sebesar 100%. Realisasi pada BPOM di Kendari dan BPOM di Jambi masih berada dibawah rata-rata realisasi Nasional (76,56%). Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

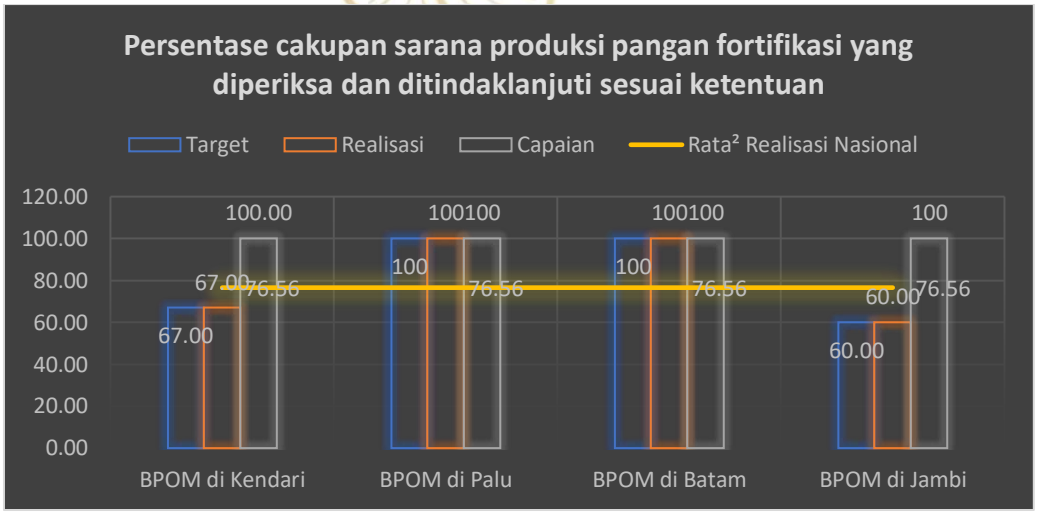

Gambar 33 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai setara

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BPOM di Kendari pada Tahun 2025 mencapai sesuai target 67% atau capaian 100% menunjukkan kinerja Balai POM di Kendari baik. Tercapainya target presentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 secara umum, capaian tersebut dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pengawasan, koordinasi pelaksanaan, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Hasil pengukuran dengan basis data target jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah sarana yang terdapat di provinsi Sulawesi Tenggara wilayah cakupan pengawasan Balai POM di Kendari dari hasil data sebelumnya yaitu 6 sarana sehingga perhitungan target adalah 4/6 x 100% = 67 % (sesuai target Perencanaan).

Dalam melakukan penilaan terhadap capaian tersebut juga perlu memperhatikan penetapan baseline data sarana, dimana pada penetapan target tahun sebelumnya ditetapkan target berdasarkan data sarana yang telah dipeiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, yang seharusnya penetapan target didasarkan pada jumlah sarana produksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

fortifikasi yang di wilayah cakupan pengawasan Balai POM di Kendari. Tahun 2025, hasil monitoring sarana Fortifikasi yang telah tersertifikasi terdapat 10 sarana, sehingga terdapat gap sebesar 4 sarana. Jumlah target volume pada DIPA untuk pemeriksaan sarana fortifikasi tahun 2025 adalah 4 sarana, maka perhitungan dengan berdasarkan jumlah sarana yang terdapat di wilayah cakupan pengawasan BPOM di Kendari tersebut 4/10 X100 % = 40 %, dengan demikian, capaian yang diperoleh dengan kategori baik belum menunjukkan sebagai peningkatan kinerja substantif secara menyeluruh, karena terdapat kesenjangan (gap)/data yang bias dalam aspek perencanaan dan pengukuran kinerja. Kondisi ini akan dapat mempengaruhi indikator capaian lebih mencerminkan perubahan volume kegiatan dibandingkan peningkatan efektivitas kinerja.

Dari analisa tersebut terdapat beberapa kondisi akar penyebab yang teridentifikasi antara lain:

1. Pemutakhiran database sarana belum dilakukan secara periodic;
2. Perbedaan Interpretasi dan pemahaman standar baku terkait definisi operasional indikator;
3. Perubahan kebijakan teknis pengukuran kinerja di tengah periode berjalan; dan
4. Kurangnya proses validasi dan rekonsiliasi data antar unit pelaksana.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan mekanisme perencanaan dan pengukuran kinerja melalui penetapan target yang lebih realistis dan berbasis data aktual agar hasil capaian dapat menggambarkan kinerja organisasi secara lebih objektif dan akuntabel sesuai prinsip pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM.

Tabel 53 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tingkat kepedulian pemilik sarana produksi pangan fortifikasi terhadap mutu dan keamanan produk masih rendah	Peningkatan pemberian bimbingan/sosialisasi/ pengawasan petugas kepada pemilik sarana produksi pangan fortifikasi agar peduli terhadap mutu dan keamanan produk	Melakukan pengawasan rutin dan memantau perbaikan CAPA kepada kepada sarana yang berisiko	TW I 2026	Y	S-10	Laboratorium internal sarana produksi tidak berfungsi optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat atau menyebabkan ketidaktepatan dalam pencapaian kinerja:

1. Ketidak sesuaian baseline data sarana: Perbedaan antara jumlah sarana pada dokumen perencanaan dengan kondisi riil di lapangan menyebabkan target menjadi kurang representative;
2. Kesalahan input dan validasi data: kesalahan penginputan hasil pemeriksaan pada sistem pelaporan berdampak pada distorsi capaian kinerja.
3. Kendala Operasional di lapangan: beberapa sarana tidak beroperasi, tutup sementara, atau berpindah alamat sehingga tidak dapat diperiksa sesuai rencana;
4. Perubahan kebijakan: Adanya perubahan metode atau pengalihan kegiatan yang berfokus pada sumber daya.

Penyesuaian Analisis Kinerja:

Dalam kondisi terdapat bias data, interpretasi capaian kinerja perlu dilakukan dengan pendekatan berikut:

1. Capaian tahun 2025 tidak dapat sepenuhnya dibandingkan secara langsung dengan periode selanjutnya tanpa normalisasi data dan perbaikan target.
2. Evaluasi kinerja lebih menekankan pada:
   1) jumlah pemeriksaan riil yang dilakukan,
   2) kualitas tindak lanjut,
   3) tingkat kepatuhan sarana, dibanding hanya persentase capaian indikator.

Rekomendasi Perbaikan

Keberhasilan pencapaian kinerja sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan berbasis data yang akurat, efektivitas koordinasi, serta ketepatan pengelolaan sistem pelaporan. Sebaliknya, ketidaksesuaian baseline, kelemahan validasi data, serta kendala operasional menjadi faktor dominan yang berpotensi menyebabkan ketidaktepatan capaian. Oleh karena itu, diperlukan:

1) Pemutakhiran database sarana fortifikasi secara berkala dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menetapkan baseline tahunan yang telah diverifikasi lintas unit.

2) Penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data sebelum finalisasi laporan.
3) Penyelarasan antara target perencanaan dan kondisi riil lapangan.
4) Standardisasi Metodologi Pengukuran dan interpretasi pemahaman bersama terkait definisi operasional indikator secara tertulis dan konsisten
5) Menyajikan data pembanding setelah dilakukan normalisasi

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai POM di Kendari telah mencapai target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025. Tagging anggaran indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada RO QIC.003 sebesar 5% dari total anggaran pada RO QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT. Realisasi anggaran pada RO QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT Tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian output 100%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT Tahun 2025 didukung komitmen petugas untuk melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai renlak yang disusun. Capaian kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi tersebut mendukung pencapaian indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 67%.

Berdasarkan analisis gap yang telah dilakukan, ditemukan adanya perbedaan antara jumlah sarana fortifikasi yang tercantum pada baseline awal dengan data riil di lapangan. Ketidaksesuaian baseline ini menyebabkan target indikator yang ditetapkan menjadi lebih rendah dibandingkan potensi sasaran aktual, sehingga realisasi terlihat dalam kondisi yang sesuai. Kondisi ini menunjukkan perlunya:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Validasi dan pemutakhiran baseline data sarana fortifikasi secara berkala;
2. Penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data input sebelum finalisasi pelaporan;
3. Peningkatan koordinasi antara tim perencanaan dan pelaksana pengawasan dalam penyusunan target berbasis data yang akurat.

Dengan dilakukan perbaikan pada aspek pengelolaan data dan penyusunan baseline, diharapkan capaian kinerja ke depan dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan serta menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel.



Gambar 34 Sasaran Kegiatan 3

Pencapaian Sasaran Kegiatan ketiga didukung oleh empat indikator, yaitu:

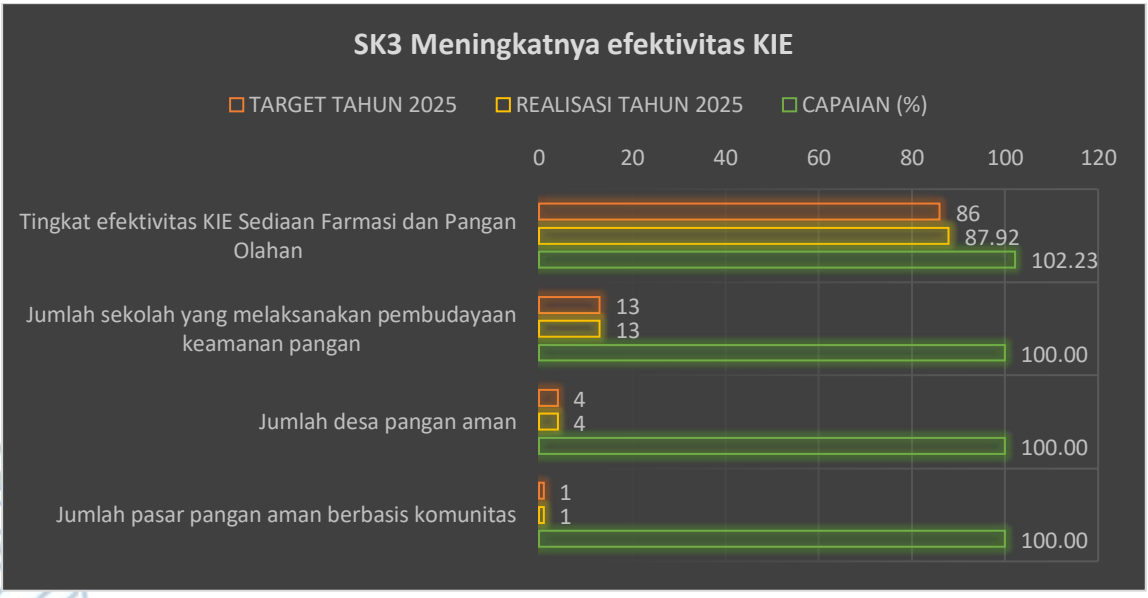

17] Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuisioner dan *online survey*. Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 54 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86	87,92	102,23	Sangat Baik

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

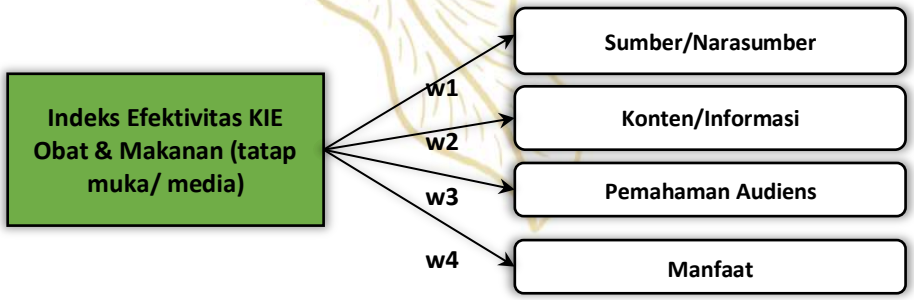

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Responden yang menjadi target adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai metode pada tahun berjalan. Pada pengisian survei, disesuaikan jenis kuesioner yang akan diisi oleh peserta KIE, yaitu Kuesioner KIE Tatap Muka atau Kuesioner KIE Media. Khusus untuk pengisian Kuesioner KIE Media diperuntukan kepada responden yang pernah melihat materi KIE BPOM melalui media.

Survei online dapat dilakukan secara mandiri oleh responden melalui gawai masing-masing; Wawancara dilakukan oleh petugas secara langsung dengan responden, yang kemudian jawaban responden diinput ke dalam aplikasi; dan Survei manual melalui kuesioner cetak dapat dilakukan apabila wilayah kegiatan KIE sulit untuk mendapatkan akses internet. Hasil pengisian kuesioner cetak harus langsung diinput ke dalam aplikasi oleh petugas. Pengolahan data indeks efektivitas KIE dapat dimonitor pada dashboard aplikasi evaluasikie.pom.go.id yang dievaluasi oleh KIE HDSP (Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan) Badan POM.

Kriteria dalam penilaian efektifitas KIE adalah sebagai berikut

Tabel 55 Kriteria Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
< 65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

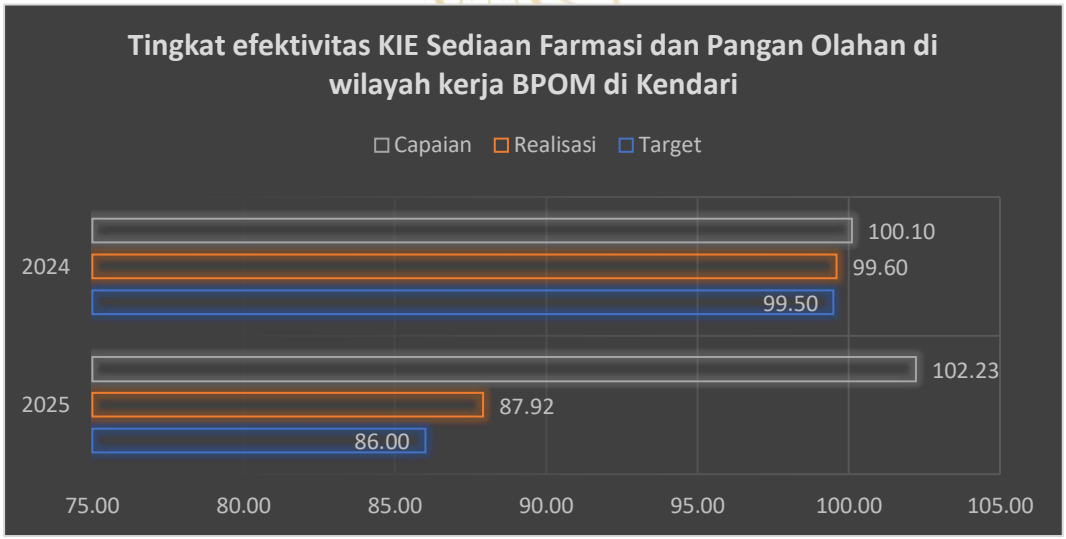

Gambar 35 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Kendari jika diperbandingkan dengan Tahun 2024, menunjukkan penurunan realisasi. Namun, dengan penetapan target menyesuaiakan manual indikator dan perhitungan pencapaian pada Tahun 2025, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 56 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,44	87,92	98,30	▲ Akan Tercapai

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan akan tercapai. Diharapkan dengan upaya keras, pada akhir periode renstra Tahun 2029 akan tercapai Tingkat efektifitas KIE yang sangat baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tertinggi diraih BPOM di Palu sebesar 90,11; dan realisasi paling rendah diraih BPOM di Batam sebesar 87,78. Pada keempat balai, realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah melampaui target yang ditetapkan. Hanya BPOM di Palu yang realisasinya berada diatas rata-rata realisasi Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

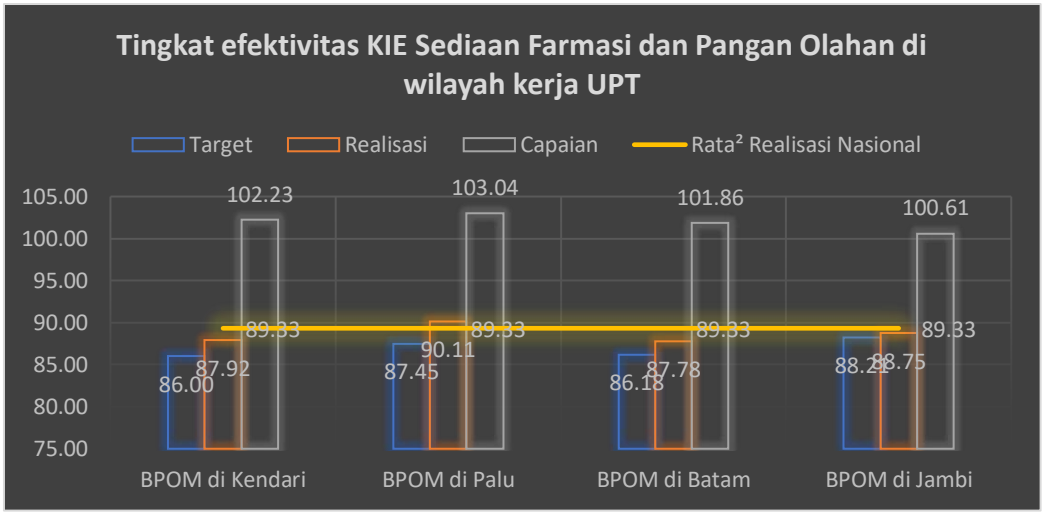

Gambar 36 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Balai setara

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman, Balai POM di Kendari sebagai salah satu UPT Badan POM telah melaksanakan Sosialisasi, KIE (Komunikasi, informasi dan Edukasi) kepada masyarakat tentang obat dan makanan aman. Hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan KIE tersebut dievaluasi melalui survei Efektivitas KIE untuk melihat keberhasilan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam rencana Strategi BPOM yaitu Indeks Efektivitas KIE.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi BPOM dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan KIE dalam rangka pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan dan konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan aman dan bermutu.

Masyarakat menjadi mitra BPOM dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak dan risiko mengonsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Sistem pengawasan oleh masyarakat sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan. Melalui peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat, diharapkan tercipta budaya sadar obat dan makanan aman sebagai upaya perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

Sistem pengawasan oleh masyarakat sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai kualitas produk yang digunakannya serta cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedangkan di sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

Capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Kendari mencapai target triwulanan maupun tahunan. BPOM di Kendari menyadari pelaksanaan kegiatan KIE masih perlu tingkatkan secara dinamis melakukan penyesuaian kebutuhan informasi masyakat dan peredaran obat dan makanan di Sulawesi Tenggara yang terus berkembang. Perlu dilakukan penguatan strategi segmentasi sasaran yang tepat, pengemasan materi yang menarik dan kontekstual, identifikasi peran stakeholder dan pelibatan peran serta masyarakat yang memiliki pengaruh seperti tokoh masyarakat sehingga kesadaran dan pemahaman akan pentingnya tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan meningkat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, penyampaian informasi melalui media sosial perlu terus dioptimalkan dengan konten yang informatif, edukatif, dan didesain secara menarik, sehingga pesan KIE dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda, serta menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Tabel 57 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pelaksanaan KIE kurang efektif karena kurang optimalnya sarana dan prasarana di Lokasi KIE	Tim Infokom berkoordinasi aktif dengan stakeholder di daerah penyelenggaraan KIE, sehingga dapat meningkatkan kualitas KIE yang dilaksanakan	1. Pelatihan dan pendampingan narasumber 2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan peserta kegiatan 3. Pemantauan sarana dan prasarana yang akan digunakan 4. Kontrol waktu pelakasanaan kegiatan 5. Penyesuaian materi terhadap audience	TW I 2026	Y	S-01	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhdap keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan aman kurang

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil evaluasi internal Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian indikator tingkat Efektivitas KIE telah memenuhi target. Rekomendasi untuk meningkatkan capaian efektivitas KIE pada periode berikutnya melalui upaya perbaikan kualitas KIE dan upaya meningkatkan kesadaran peserta KIE untuk menyebarkan informasi yang diperolah kepada masyarakat lingkungan sekitarnya. Selain itu rekomendasi dalam perbaikan kualitas KIE melalui penyajian materi, informasi melalui media sosial dan alat bantu KIE berupa leafleat, poster serta informasi media online yang didukung dengan anggaran yang memadai.

Tagging anggaran indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada RO BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE sebesar 100% dan RO BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT sebesar 100%. Realisasi anggaran Tahun 2025 pada RO BDC 99,92% dengan capaian output mencapai 120,41% dan RO BMB.001 sebesar 98,41%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan capaian output 136,36%%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO BDC.001 dan RO BMB.001 Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan kegiatan KIE Tokoh Masyarakat dan pelayanan publikasi yang optimal oleh petugas BPOM di Kendari.

18] Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang dikonsumsi komunitas sekolah dapat berupa pangan jajanan yang tersedia di dalam maupun diluar lingkungan sekolah. Umumnya terdiri dari pangan siap saji, pangan segar dan pangan olahan terkemas. Pangan olahan yang beredar saat ini, dihasilkan oleh produsen pangan, diantaranya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Jasa Boga. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, praktek keamanan pangan pengelola kantin sekolah dan penjaja pangan di sekitar lingkungan sekolah, kesadaran memilih pangan dari komunitas sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif OPD terkait.

Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus bangsa, dimulai dengan Aksi Nasional PJAS Tahun 2011-2014, dilanjutkan tahun 2017-2019 sebagai bagian dari program Germas dan menjadi Proyek Prioritas Nasional. Program PJAS ini berlanjut hingga tahun 2024. Penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, harus tetap menjadi prioritas. Oleh sebab itu dilakukan pentahapan kegiatan dalam rangka mencapai predikat Sekolah dengan PJAS aman melalui Sertifikasi. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan kader keamanan pangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 58 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	13	100	Baik

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria: (1) Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024; (2) Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi
6. keamanan

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

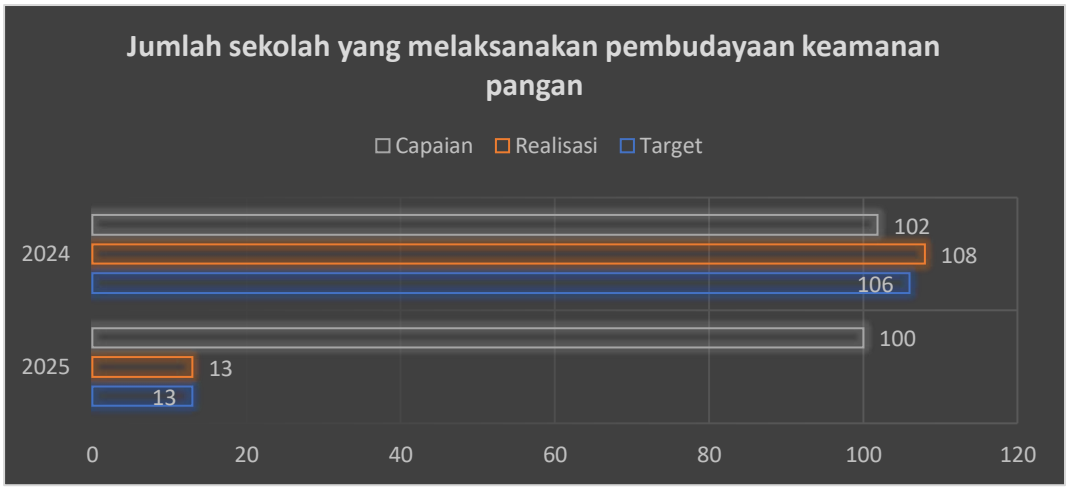

Gambar 37 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan BPOM di Kendari jika diperbandingkan dengan Tahun 2024, menunjukkan penurunan realisasi. Namun, dengan penetapan target menyesuaiakan manual indikator dan perhitungan pencapaian pada Tahun 2025, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target. Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada Triwulan I akibat penyesuaian renlak pelaksanaan kegiatan. Pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan advokasi secara terpadu dengan intervensi Desa dan Pasar. Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan III adalah Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader dan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 59 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	22	13	59,09	▼ Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan belum tercapai. BPOM di Kendari perlu mengerahkan upaya keras untuk dapat meningkatkan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada akhir periode renstra di Tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

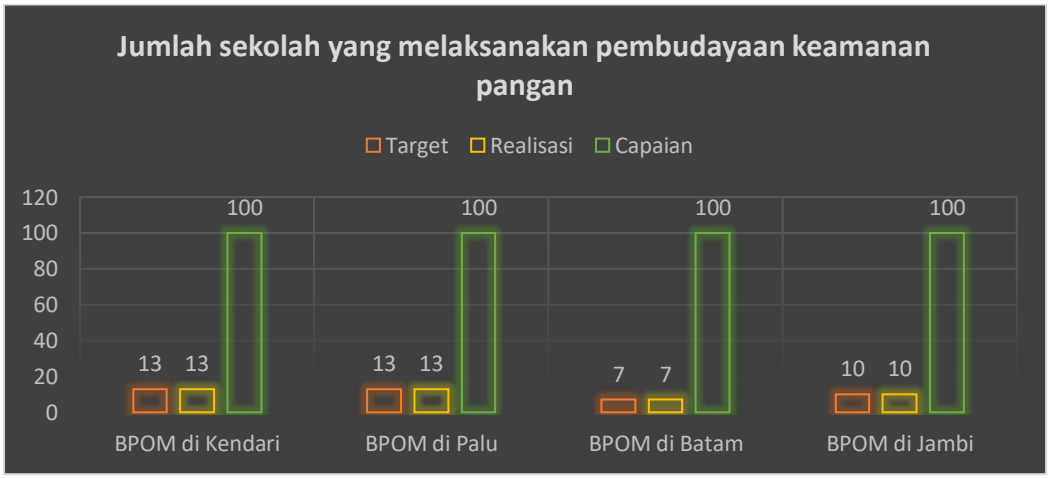

Gambar 38 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada keempat balai telah mencapai targetnya. BPOM di Kendari dan BPOM di Palu memiliki target jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan paling banyak diantara keempat balai yang diperbandingkan, yaitu 13 sekolah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adanya penyesuaian sumberdaya (anggaran) pada awal Tahun 2025, menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan kegiatan intervemsi Sekolah. Kegiatan advokasi yang dijadwalkan pada bulan Januari, berubah menjadi April 2025 bersamaan dengan advokasi Desa dan Pasar. Hal ini menjadi penyebab tidak tercapaianya progress kegiatan pada indikator pada Triwulan I. Pada Triwulan II terdapat kebijakan relaksasi Sebagian anggaran, sehingga kegiatan advokasi dapat dilaksanakan. Pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader dan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, sehingga progress menjadi meningkat. Kebijakan efisiensi anggaran menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pencapaian indikator kinerja pada Tahun 2025.

Tabel 60 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kurangnya komitmen sekolah dalam melaksanakan program keamanan pangan secara mandiri	Agar dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara intensif	TW I 2026	Y	S-03	Sekolah intervensi tidak melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 telah tercapai sesuai target. Namun, terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaiannya, yaitu adanya kebijakan efisiensi terhadap kegiatan RO QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman selama periode Tahun 2025. Realisasi anggaran Tahun 2025 pada RO QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 99,97% dengan capaian output mencapai 100%. Dalam upaya pemenuhan target sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada periode mendatang, beberapa hal yang dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2) Sumber daya yang optimal
3) Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat berjalan dengan baik

19] Jumlah desa pangan aman

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa.

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- ✓ kader keamanan pangan desa yang aktif
- ✓ Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- ✓ Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 61 Jumlah desa pangan aman Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	2025	2025	2025 (%)	
Jumlah desa pangan aman	4	4	100	Baik

Realisasi kegiatan intervensi desa pangan aman pada Tahun 2025 telah memenuhi target dengan predikat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

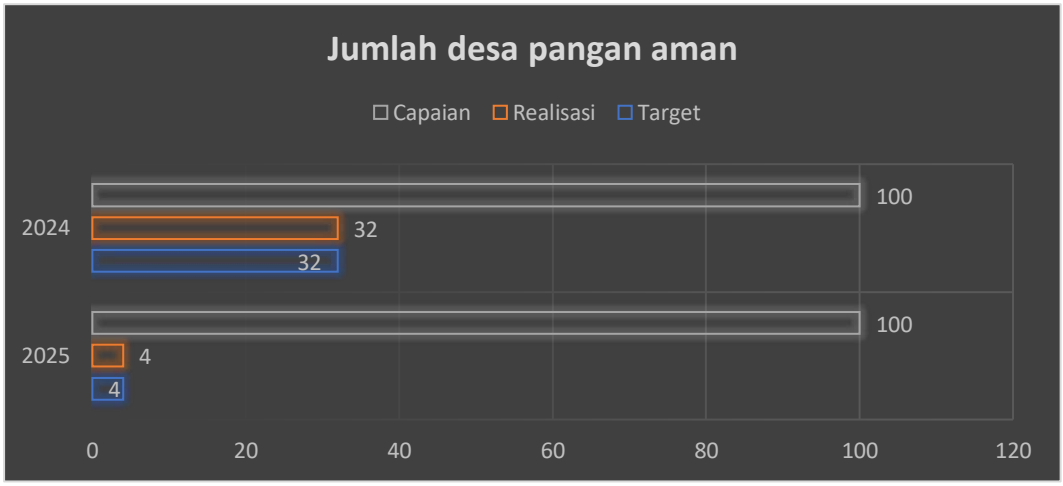

Gambar 39 Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi indikator Jumlah desa pangan aman yang diintervensi BPOM di Kendari jika diperbandingkan dengan Tahun 2024, menunjukkan penurunan realisasi. Namun, dengan penetapan target menyesuaiakan manual indikator dan perhitungan pencapaian pada Tahun 2025, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target. Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat penyesuaian renlak pelaksanaan kegiatan, sehingga capaian Triwulan I masih belum terealisasi. Pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan advokasi secara terpadu dengan intervensi Sekolah dan Pasar. Selain itu pada Triwulan II telah dilaksanakan pelatihan kader, sehingga realisasi semakin meningkat. Pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan Bimtek komunitas, sehingga realisasi meningkat.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 62 Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	2029	2025	(%)	
Jumlah desa pangan aman	7	4	57,14	▼ Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, BPOM di Kendari perlu upaya keras untuk dapat mencapai target Jumlah desa pangan aman yang optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)



Gambar 40 Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Jumlah desa pangan aman pada keempat balai telah mencapai targetnya. BPOM di Kendari memiliki target jumlah desa pangan aman paling banyak diantara keempat balai yang diperbandingkan, yaitu 4 desa.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adanya penyesuaian sumberdaya (anggaran) pada awal Tahun 2025, menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan kegiatan intervemsi Desa. Kegiatan advokasi yang dijadwalkan pada bulan Januari, berubah menjadi April 2025 bersamaan dengan advokasi Sekolah dan Pasar. Hal ini menjadi penyebab tidak tercapaianya progress kegiatan pada indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jumlah desa pangan aman pada Triwulan I. Pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan advokasi secara terpadu dengan intervensi Sekolah dan Pasar. Selain itu pada Triwulan II telah dilaksanakan pelatihan kader, sehingga realisasi semakin meningkat. Pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan Bimtek komunitas, sehingga realisasi meningkat dengan capaian baik. Kebijakan efisiensi anggaran menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pencapaian indikator kinerja pada Tahun 2025.

Tabel 63 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah desa pangan aman	Komitmen tim keamanan pangan desa (TKPD) dalam menjalankan dan melanjutkan rencana aksi program Desa Pangan Aman masih kurang; sehingga Program Desa Pangan Aman tidak berkelanjutan	Tim Infokom perlu melaksanakan pengawalan melalui refreshment pengetahuan dan materi terkait kemanan pangan desa secara berkala	Intens melaksanakan pengawalan melalui refreshment pengetahuan dan materi terkait kemanan pangan desa melalui luring atau daring	TW I 2026	Y	S-05	Desa yang telah diintervensi tidak melanjutkan rencana aksi keamanan pangan desa secara mandiri

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 telah tercapai sesuai target. Namun, terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaiannya, yaitu adanya kebijakan efisiensi terhadap kegiatan RO QDB.002 Desa Pangan Aman selama periode Tahun 2025. Realisasi anggaran Tahun 2025 pada RO QDB.002 Desa Pangan Aman mencapai 99,79% dengan capaian output mencapai 100%. Dalam upaya pemenuhan target Jumlah desa pangan aman pada tahun mendatang beberapa hal yang dilakukan BPOM di Kendari anatra lain antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2) Sumber daya yang optimal
3) Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat berjalan dengan baik

20] Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 64 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Baik

Realisasi kegiatan intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas pada Tahun 2025 telah memenuhi target. Pada Triwulan III telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dilaksanakan semua tahapan intervensi pasar panga naman dari kegiatan Advokasi hingga pengawalan, sehingga realisasi telah memenuhi target tahunan sebesar 100%.

Berdasarkan table diketahui bahwa target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas telah selesai sesuai target Tahun 2025. Target bulanan indikator pasar pangan aman berbasis komunitas mengukur persentase progress tahapan intervensi, sedangkan pada target tahunan mengukur jumlah pasar yang diintervensi. Dengan diselesaikannya semua tahapan intervensi pasar pada Triwulan III, maka indikator jumlah pasar pangan naman berbasis komunitas telah selesai 100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

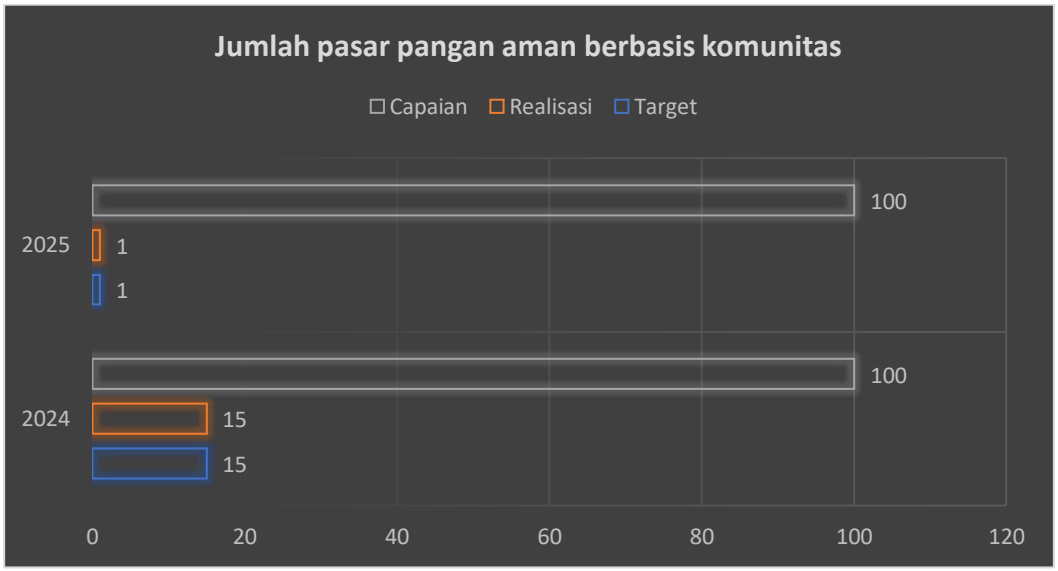

Gambar 41 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang diintervensi BPOM di Kendari jika diperbandingkan dengan Tahun 2024, menunjukkan penurunan realisasi. Namun, dengan penetapan target menyesuaiakan manual indikator dan perhitungan pencapaian pada Tahun 2025, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target. Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat penyesuaian renlak pelaksanaan kegiatan intervensi pasar, yaitu kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan intervensi Sekolah dan Desa yang dilaksanakan pada April 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selanjutnya, kebijakan relaksasi pada April memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan Bimtek Penyuluhan dan Sosialisasi yang diselenggarakan pada Juni 2025.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 65 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	1	33,33%	▼ Perlu Upaya Keras

.Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029, BPOM di Kendari perlu upaya keras untuk dapat mencapai target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

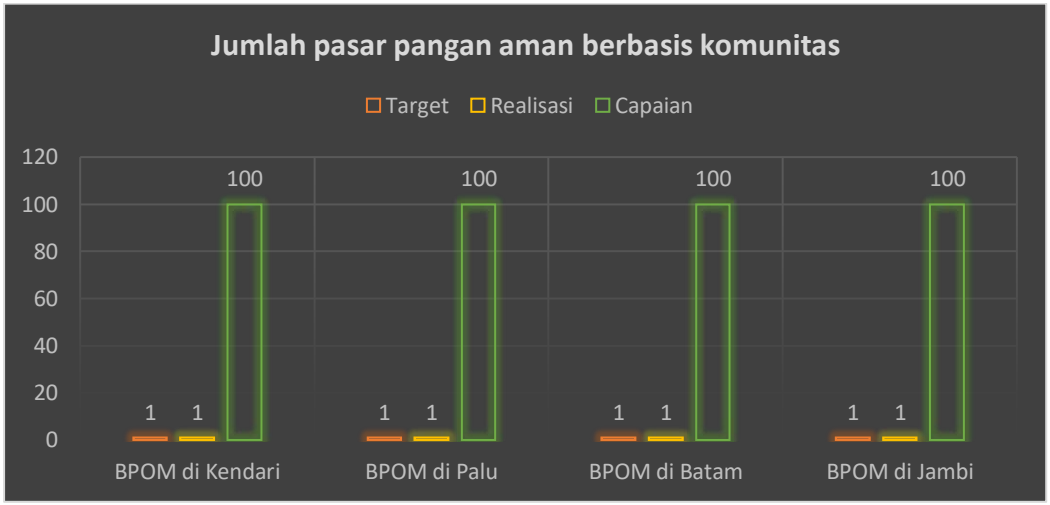

Gambar 42 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada keempat balai dengan jumlah target yag sama, telah mencapai targetnya100%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adanya penyesuaian sumberdaya (anggaran) pada awal Tahun 2025, menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan kegiatan intervemsi Pasar. Kegiatan advokasi yang dijadwalkan pada bulan Januari, berubah menjadi April 2025 bersamaan dengan advokasi Sekolah dan Desa. Hal ini menjadi penyebab tidak tercapaianya progress kegiatan pada indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan I. Namun, seiring dibukanya Sebagian anggaran melalui kebijakan relaksasi, pada Triwulan II beberapa kegiatan telah dilaksanakan sehingga terjadi peningkatan realisasi. Pada Triwulan III tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas telah diselesaikan dengan realisasi 100%. Kebijakan efisiensi anggaran menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pencapaian indikator kinerja pada Tahun 2025.

Tabel 66 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Komitmen petugas pasar dalam menjalankan dan melanjutkan rencana aksi program pasar pangan aman berbasis kominitas secara mandiri masih kurang	Tim Infokom agar melaksanakan pengawalan melalui refreshment pengetahuan dan materi terkait kemanan pangan desa secara berkala	Intens melaksanakan pengawalan melalui refreshment pengetahuan dan materi terkait program pasar pangan aman berbasis kominitas melalui luring atau daring	TW I 2026	Y	S-07	Pasar yang telah diintervensi tidak melanjutkan rencana aksi pasar pangan aman berbasis komunitas secara mandiri

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BPOM di Kendari telah mencapai pemenuhan target 100% Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Tahun 2025. Namun, terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaiannya, yaitu adanya kebijakan efisiensi terhadap kegiatan RO QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya selama periode Tahun 2025. Realisasi anggaran Tahun 2025 pada RO QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya mencapai 99,96% dengan capaian output mencapai 100%. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2) Sumber daya yang optimal
3) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

melaksanakan keberlanjutan program pasar pangan aman berbasis komunitas dan melakukan replikasi terhadap program tersebut.

4) Monitoring dan evaluasi pemberdayaan petugas pasar.
5) Memotivasi pasar yang diintervensi untuk mengikuti kegiatan lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

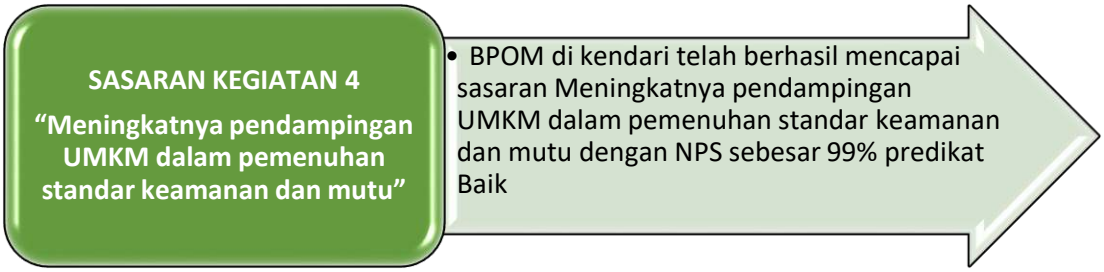

Gambar 43 Sasaran Kegiatan 4

Pencapaian Sasaran Kegiatan keempat didukung oleh indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

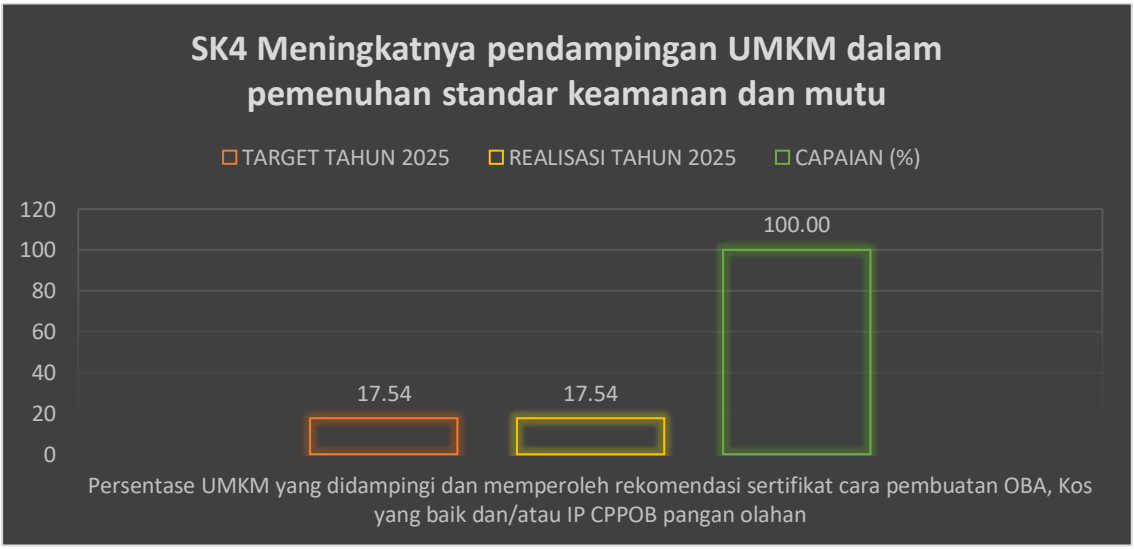

21] Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

UMKM yang memenuhi standar adalah UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

UMK. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3). UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Ruang Lingkup UMKM terdiri dari:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
   b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Kriteria UMKM yang didampingi yaitu:

1. Untuk UMK Pangan Olahan:

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: (1) Penetapan target UMK Pangan Olahan, (2) Bimtek CPPOB, (3) Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, (4) penerbitan IP CPPOB, serta (5) Monev dan pelaporan.

2. Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 67 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,54	17,54	100	Baik

*Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada B01-B11; dihitung sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ progress\ tahapan\ pendampingan\ UMK\ Pangan\ Olahan, UMKM\ OBA\ dan\ UMKM\ Kosmetik}{Jumlah\ Target\ tahapan\ pendampingan\ UMK\ Pangan\ Olahan, UMKM\ OBA\ dan\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ didampingi\ di\ tahun\ berjalan}$$

Perhitungan realisasi tahunan (B12) dihitung:

$$\frac{(A+B+C)}{Jumlah\ Target\ UMK\ Pangan\ Olahan, UMKM\ OBA, dan\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ didampingi\ selama\ 2025-2029} x100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB;

B = Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap

C = Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada Tahun 2025 telah melampaui target sehingga capaian tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tidak dapat diperbandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan terdapat perubahan perhitungan dalam manual indikator. Pada Tahun 2024 Persentase pendampingan UMKM menghitung progress dari tahapan pendampingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang dilakukan. Tahun 2025, perhitungan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan menghitung jumlah sarana UMKM yang didampingi pada tahun berjalan dibandingkan dengan target sarana UMKM selama lima tahun periode renstra 2025-2029. Perbedaan dalam definisi dan cara pencapaiannya, menyebabkan indikator tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 68 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	17,54	17,54	▼ Perlu Upaya Keras

Berdasarkan table diketahui bahwa Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan telah mencapai target Tahun 2025. Pada target bulanan mengukur persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang dilakukan BPOM di Kendari. Sedangkan pada target tahunan mengukur persentase jumlah UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 dibandingkan dengan target selama lima tahun renstra. Jika dikonversikan terhadap target Tahun 2029, maka realisasi indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan diproyeksikan masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target sebanyak 57 UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Pada akhir periode renstra (2029) diharapkan sebanyak 57 sarana akan didampingi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan keberhasilan mencapai 100%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, capaian BPOM di Jambi melampaui targetnya melebihi 110%. Pada keempat balai yang diperbandingkan, hanya BPOM di Batam yang realisasinya berada dibawah rata-rata realisasi Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

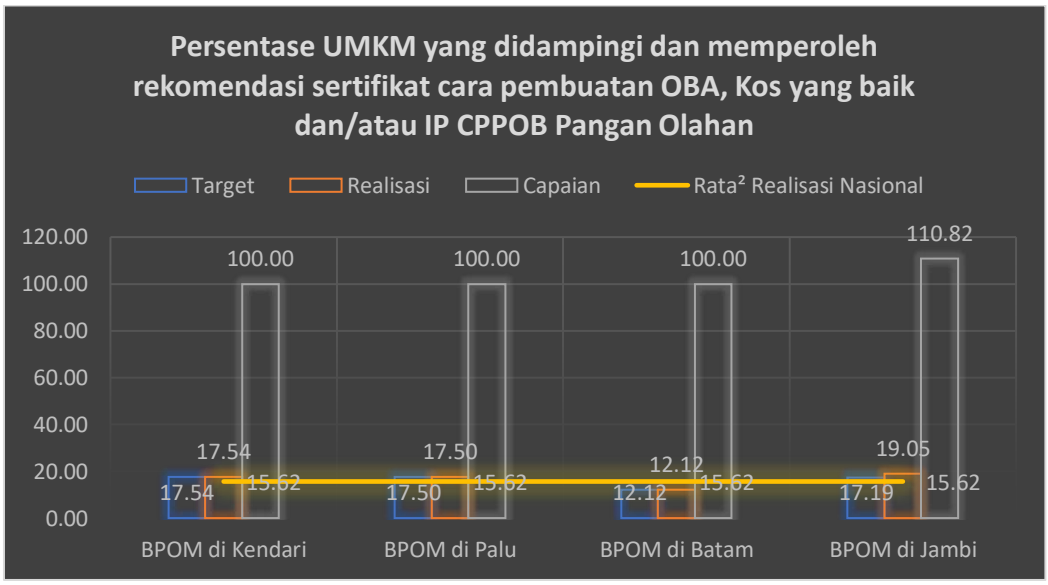

Gambar 44 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan Balai setara

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target pendampingan UMKM Balai POM di Kendari tahun 2025 sebanyak 10 UMKM yang terdiri dari 8 UMKM-Pangan, 8 UMKM-Kosmetik dan 1 UMKM-OBA. Sampai dengan Triwulan I realisasi proses pendampingan UMKM sebanyak 20% terdiri dari proses pendampingan UMKM-Pangan sebesar 15%; pendampingan UMKM-Kosmetik sebesar 30%; dan pendampingan UMKM-OBA sebesar 30%. Pada Triwulan II realisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

proses pendampingan UMKM sebanyak 20% terdiri dari proses pendampingan UMKM-Pangan sebesar 70% meningkat dengan dilaksanakannya Bimtek CPPOB dan Fasilitasi Pendampingan; pendampingan UMKM-Kosmetik sebesar 30%; dan pendampingan UMKM-OBA sebesar 30%. Pada Agustus 2025 terdapat perubahan metode penilaian, dimana masing-masing UMKM dihitung progresnya (tahapan) dan dibagi sebanyak target UMKM pada Tahun berjalan. Pada Triwulan III Progres pendampingan UMKM meningkat sebesar 94%.

Kendala yang dialami pada Tahun 2025 adalah komitmen pelaku usaha UMKM-Kosmetik dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh sertifikat CPKB. Sehingga pada Triwulan IV dilakukan pengalihan target UMKM yang didampingi, dari UMKM Kosmetik menjadi UMKM Obat Tradisional melalui Surat Kepala BPOM di Kendari nomor PR.06.01.5B.11.25.200 perihal Permohonan Perubahan Target Komoditi Pendampingan UMKM Balai POM di Kendari.

Pada UMKM-Pangan program yang menunjang keberhasilan capaian UMKM yang memenuhi standar adalah pelaksanaan inovasi Sipintar dan Pintar Plus. Inovasi Sipintar merupakan pendampingan UMKM Pangan sampai penerbitan sertifikasi PIRT secara terpadu dengan stakeholder terkait dengan waktu satu hari. Inovasi Pintar Plus merupakan pendampingan terhadap UMKM Pangan dalam rangka penerbitan izin edar MD. Pelaksanaan inovasi tersebut meningkatkan capaian indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik.

Beberapa kendala yang dihadapi BPOM di Kendari dalam mencapai target indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan diantaranya:

- UMKM PO= Proses pembuatan dokumen yang kurang dipahami oleh pelaku usaha (tidak memiliki PC/komputer, pelaku usaha berharap petugas yg buatkan);
- UMKM OBA= Pelaku usaha akan mengubah NIB pribadi menjadi PT; dan sampai saat ini belum ada feedback kembali dari pelaku usaha;
- UMKM KOS= Telah dilakukan pendampingan denah, tetapi sampai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

saat ini belum ada perbaikan terhadap masukan dari fasilitator dan PMPU UMKM yg telah dilakukan pada pelaku usaha.

Tabel 69 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap arti gratifikasi	Peningkatan komitmmen Bersama terkait integritas dan pembudayaan CoreValues ASN BerAKHLAK	Melaporkan kegiatan gratifikasi melalui aplikasi SANG INTEGRITAS dan SINGA. Komitmen dalam pelaksanaan Pakta Integritas	TW I 2026	Y	F-04	Adanya pemberian gratifikasi oleh pihak ke-3 karena telah mendapatkan Sertifikat hasil audit
2	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Kurangnya fasilitas pembuatan dokumen pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan panduan mutu	Pendampingan secara aktif oleh petugas BPOM di Kendari	Menyediakan fasilitas di kantor agar pelaku usaha dapat memenuhi panduan mutu	TW I 2026	Y	O-12	Pelaku usaha terhambat dalam memenuhi persyaratan panduan mutu Sarana dan Produk obat dan makanan
3	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Keterbatasan modal untuk memenuhi persyaratan sarana dan prasarana	Pendampingan secara aktif oleh petugas BPOM di Kendari	Melakukan pendampingan pelaku usaha pangan olahan secara terpadu dengan direktorat registrasi pangan olahan	TW I 2026	Y	O-19	Sarana pelaku usaha belum memenuhi ketentuan persyaratan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tagging anggaran indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada RO QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT sebesar 100%. Realisasi anggaran Tahun 2025 pada QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT sebesar 100% dengan capaian output mencapai 100%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO QDG.001 Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM secara optimal oleh petugas BPOM di Kendari. Beberapa hal yang dilakukan untuk memenuhi target tahun mendatang antara lain:

1. Memberikan pemahaman dan pendampingan secara intensif kepada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan minat pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan CPPOB, CPOTB dan CPKB;

2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk melakukan pendampingan terutama pelaku usaha mikro; dan
3. Meminta komitmen dari pelaku usaha untuk meluangkan waktu dalam mempelajari hasil pendampingan agar dapat diterapkan.

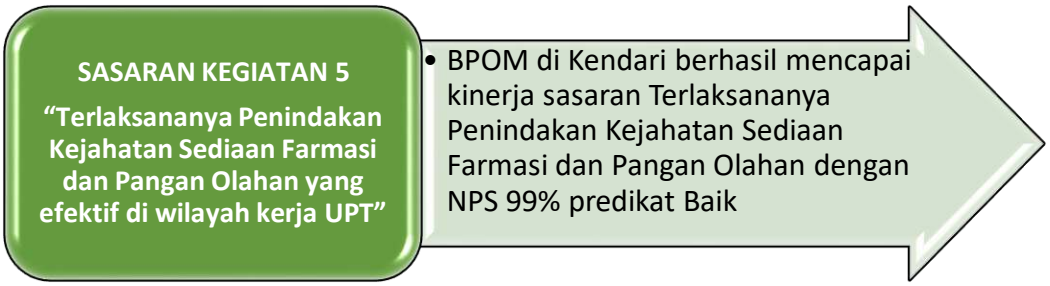

Gambar 45 Sasaran Kegiatan 5

Pencapaian Sasaran Kegiatan kelima didukung oleh indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

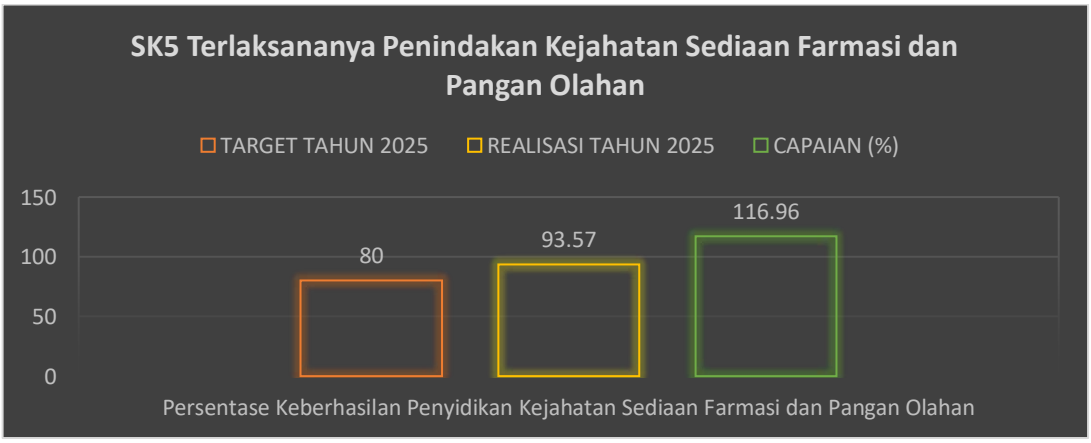

22] Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 70 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80	93,57	116,96	Tidak Dapat Disimpulkan

*Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 46 Capaian Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Kendari Tahun 2025

Pada Tahun 2025 BPOM di Kendari telah mencapai target jumlah perkara sebanyak 5 perkara dengan realisasi indikator kinerja melampaui target. Namun, terhadap capaian jumlah 5 perkara tersebut, tidak semuanya masuk ke Tahap II. Sehingga Pada Tahun 2026 BPOM di Kendari memiliki tiga percara *carryover*; yaitu satu perkara Tahun 2024 dan dua perkara Tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

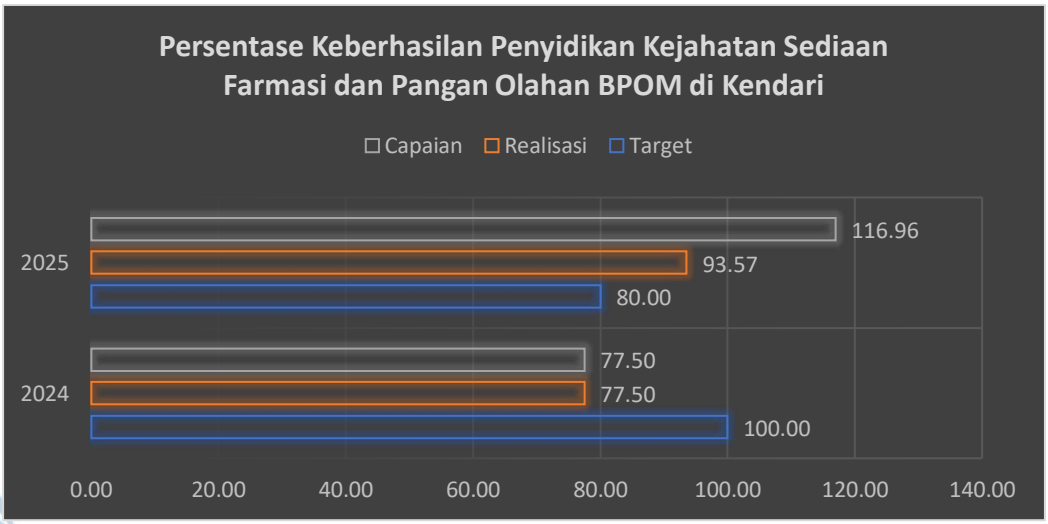

Gambar 47 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPOM di Kendari jika diperbandingkan dengan Tahun 2024, menunjukkan peningkatan realisasi hingga melampaui target Tahun 2025. Namun, terhadap perkara *carryover* Tahun 2024, BPOM di Kendari hanya mampu menyelesaikan 1 perkara sampai Tahap II. Sedangkan 1 perkara masih P21.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 71 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	84	95,22	111,39	▲ Akan Tercapai

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025; jika diperbandingkan dengan target Tahun 2029 diproyeksikan mampu melampaui target jangka menengahnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

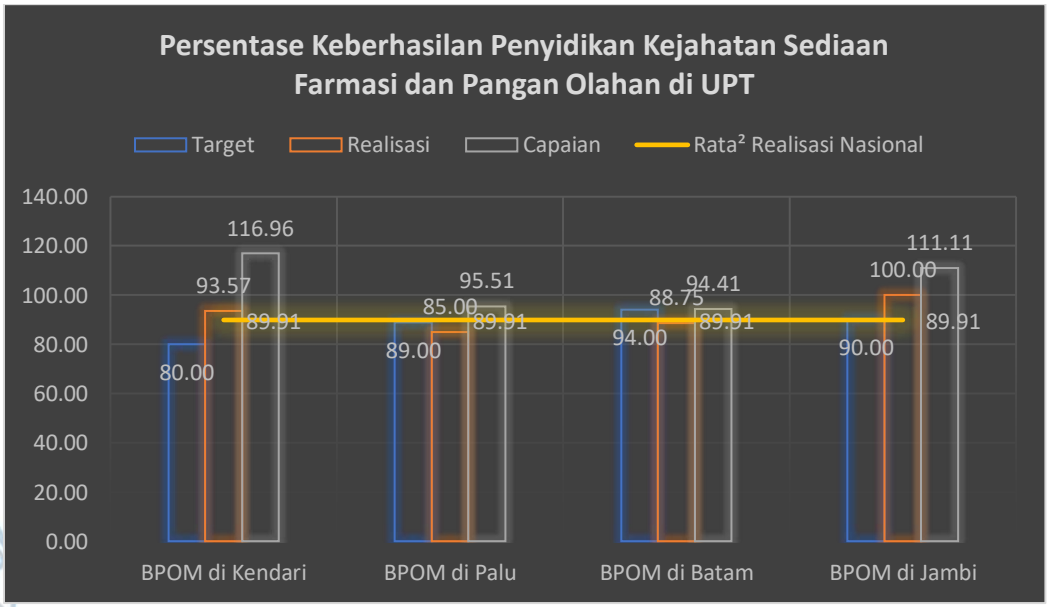

Gambar 48 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Balai setara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hanya pada BPOM di Kendari dan BPOM di Jambi yang telah melampaui targetnya. Sedangkan BPOM di Palu dan BPOM di Batam, realisasi belum mencapai target. Pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasinya berada diatas rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target perkara pada Tahun 2025 sebanyak 4 perkara dengan realisasi sebanyak 5 perkara. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Kendari Tahun 2025 telah memenuhi targetnya. Namun, masih terdapat 1 perkara *carryover* Tahun 2024 dan 2 perkara Tahun 2025 yang masih belum sampai pada Tahap II.

Tabel 72 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Informasi yang didapat dari sumber tidak valid	Tim Penindakan melaksanakan pendalaman informasi dan analisis yang akurat serta membuat perencanaan matang dalam melaksanakan tugas penindakan	Agen intelejen melakukan verfikasi infomasi	TW I 2026	Y	H-01	Kegagalan operasi intelejen
2	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Kesalahan Perencanaan dan Analisis	Tim Penindakan melaksanakan pendalaman informasi dan analisis yang akurat serta membuat perencanaan matang dalam melaksanakan tugas penindakan	Agen intelejen melakukan perencanaan dan analisis informasi	TW I 2026	Y	H-02	Kegagalan operasi intelejen
3	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Adanya kebocoran informasi saat akan dilakukannya operasi penindakan	Tim Penindakan melaksanakan pendalaman informasi dan analisis yang akurat serta membuat perencanaan matang dalam melaksanakan tugas penindakan	1. Membatasi informasi terkait target operasi kepada eksternal penindakan 2. Penyusunan rencana kontijensi	TW I 2026	Y	H-03	Kegagalan operasi Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Kesalahan Perencanaan dan Analisis	Tim Penindakan melaksanakan pendalaman informasi dan analisis yang akurat serta membuat perencanaan matang dalam melaksanakan tugas penindakan	Melakukan rapat perencanaan operasi penindakan	TW I 2026	Y	H-04	Kegagalan operasi Penindakan
5	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Masih terdapat 3 perkara (2 perkara 2025 dan 1 perkara 2024) yang belum sampai Tahap II	Tim Penindakan agar menyelesaikan perkara carryover di Tahun 2026	- Penyelesaian 1 Perkara carryover Tahun 2024 sampai Tahap II - Penyelesaian target 2 perkara pada 2025 sampai Tahap II	TW I 2026	T		

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tangging indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah pada kegiatan RO QCD.U46 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT sebesar 100%. Realisasi anggaran Tahun 2025 pada QCD.U46 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT sebesar 99.64% dengan capaian output mencapai 100%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada QCD.U46 Tahun 2025 didukung oleh komitmen petugas BPOM di Kendari dalam melaksanakan operasi intelijen, gelar kasus dan operasi penindakan.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025 maka beberapa hal yang akan direkomendasikan dalam upaya perbaikan capaian di masa mendatang adalah:

1) Terhadap perkara *carryover* Tahun 2024 dilakukan koordinasi dengan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk membahas penyelesaian berkas perkara tersebut. Selain itu BPOM di Kendari perlu mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa dilakukan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan melalui korwas POLDA Sulawesi Tenggara tepat waktu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Koordinasi aktif dengan Criminal Justice System (CJS) terkait dengan penyelesaian perkara sehingga mempercepat proses penyelesaian berkas perkara;
3) Melakukan pendalaman informasi terkait informasi intelijen yang didapatkan melalui patroli siber, informasi/pengaduan masyarakat maupun informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM RI dan ditindaklanjuti dengan proses pro justitia.
4) Koordinasi aktif dengan meminta bantuan direktur Cyber BPOM untuk melakukan akuisisi alat komunikasi berupa HP dalam penerapan pasal pidana.
5) Pendalaman dan analisis informasi yang akurat dalam rangka penetapan target operasi penindakan

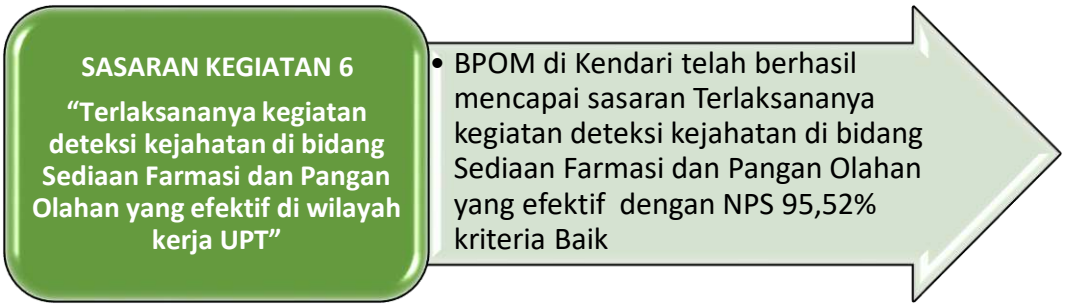

Gambar 49 Sasaran Kegiatan 6

Pencapaian Sasaran Kegiatan keenam didukung oleh indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

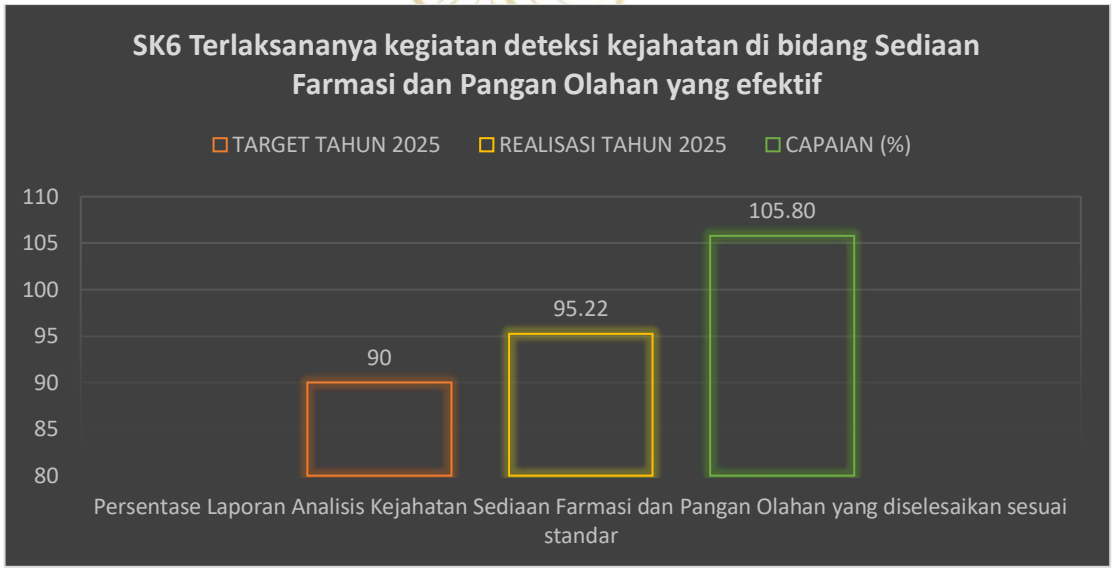

23] Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 73 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95,22	105,80	Sangat Baik

*Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai komponen Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar BPOM di Kendari Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

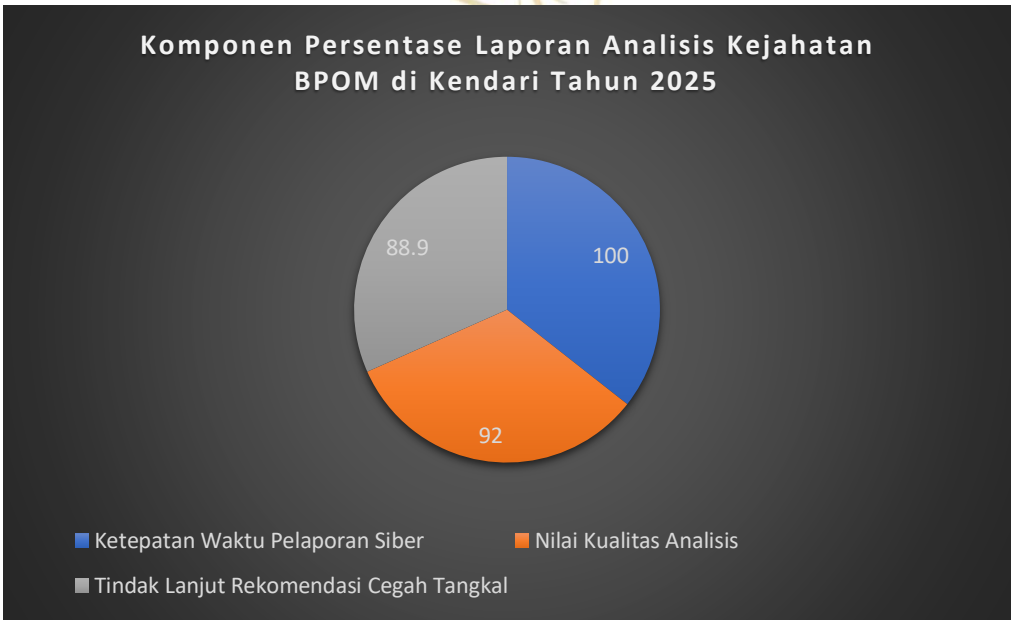

Gambar 50 Komponen Nilai Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tidak dapat diperbandingkan dengan periode (tahun) sebelumnya, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama renstra 2025-2029 dengan perubahan pada indikator kinerjanya.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 74 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan Target 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	95,22	101,30	▲ Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan table diketahui bahwa realisasi Persentase Laporan Analisis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar BPOM di Kendari diproyeksikan mencapai target Tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan target sama pada keempat balai, hanya pada BPOM di Palu yang belum memenuhi targetnya. Namun pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasinya berada diatas rata-rata realisasi Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

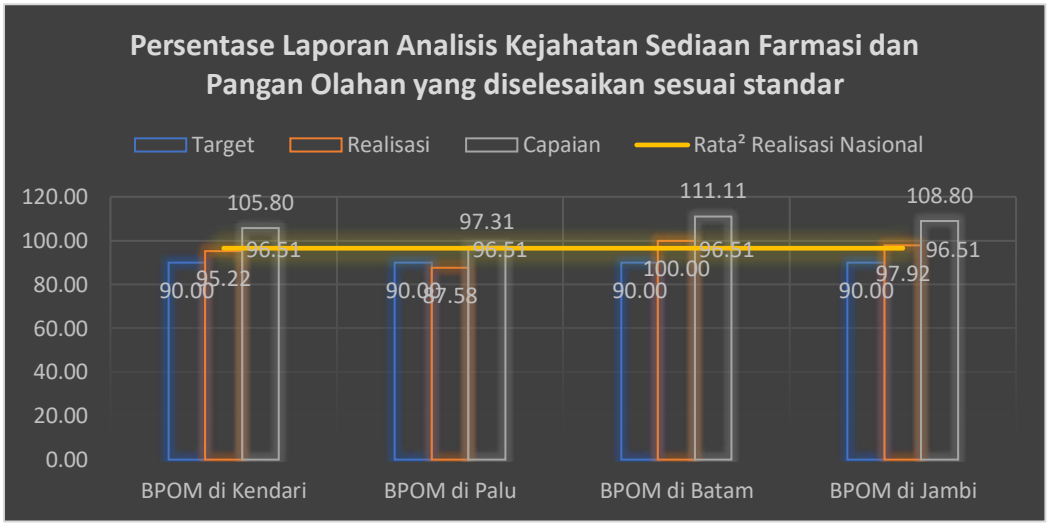

Gambar 51 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan Balai setara

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar BPOM di Kendari Tahun 2025 telah memenuhi targetnya. Upaya yang mendukung keberhasilan indikator Tahun 2025 diantaranya penyelesaian laporan siber dan tindaklanjut analisis kejahatan sesuai ketentuan (tepat waktu dan standar).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 75 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pelaku usaha memiliki produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak menaati ketentuan pemasaran produk secara online	Tim Penindakan secara intensif dan massif melaksanakan terkait pengawasan penjualan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online	Intensif dalam melakukan pengawasan penjualan secara online produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	TW I 2026	Y	S-09	Banyaknya tautan penjualan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online yang tidak sesuai ketentuan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar BPOM di Kendari telah memenuhi target. Tangging indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada kegiatan RO AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT. Realisasi anggaran Tahun 2025 pada RO AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT sebesar 100% dengan capaian output mencapai 100%. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan (anggaran) pada RO AEA.001 Tahun 2025 didukung komitmen petugas untuk konsisten dalam pelaporan siber dan TL analisis kejahatan sesuai ketentuan.

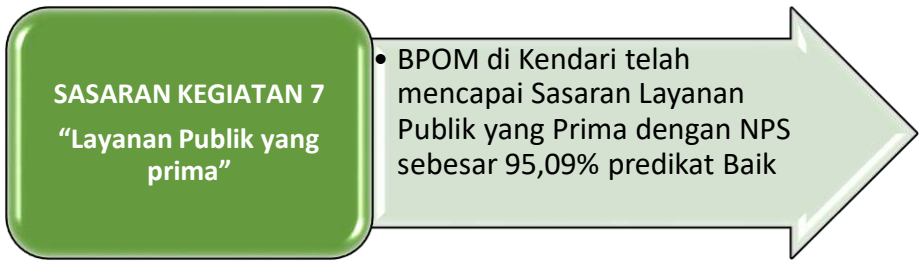

Gambar 52 Sasaran Kegiatan 7

Pencapaian Sasaran Kegiatan ketujuh didukung oleh indikator Indeks Pelayanan Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

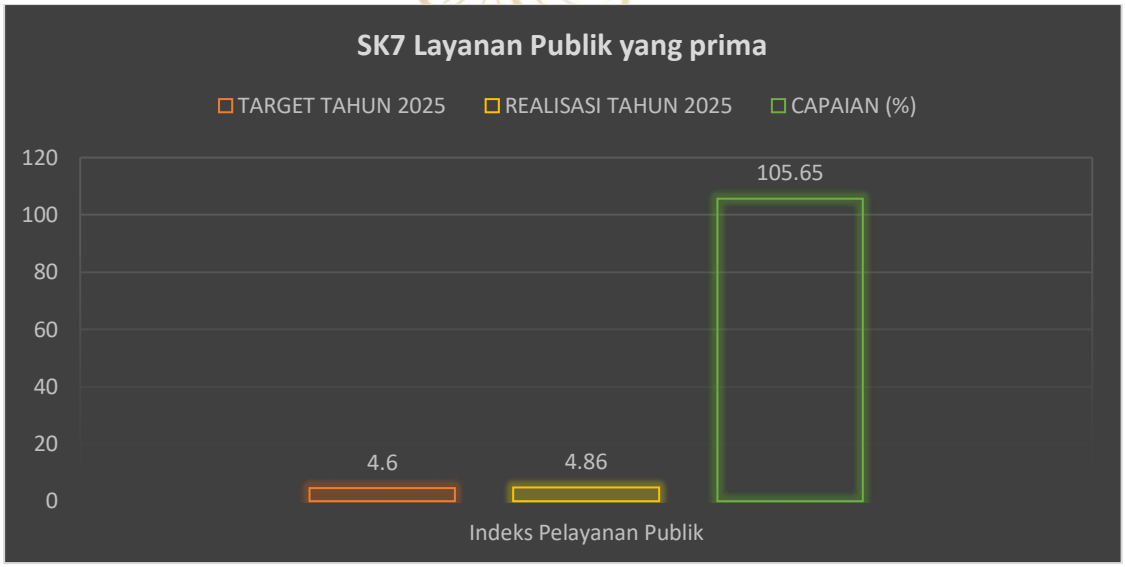

24] Indeks Pelayanan Publik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas–asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, diperlukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodic

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 76 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,6	4,86	105,65	Sangat Baik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Cara perhitungan indikator ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama).

Tabel 77 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Hasil penilaian IPP pada Tahun 2025 oleh Tim Penilai UPP BPOM, Balai POM di Kendari mendapatkan nilai sebesar 4,86 dengan kategori Pelayanan Prima.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

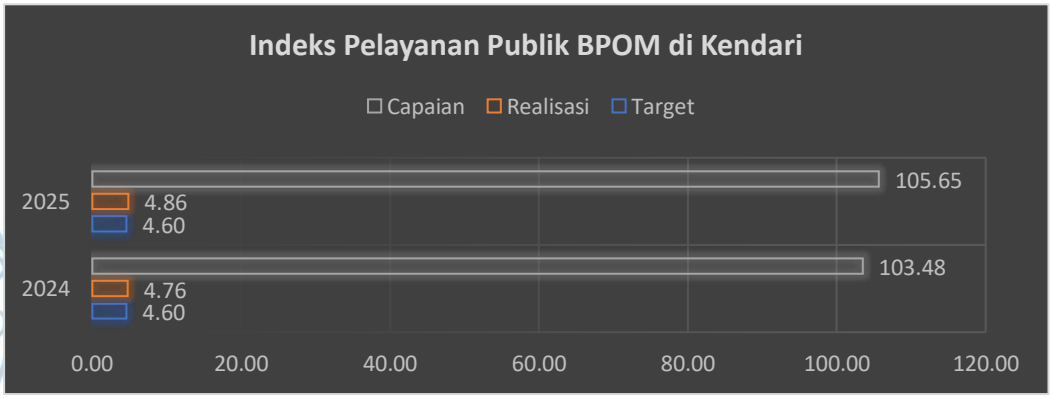

Gambar 53 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik BPOM di Kendari jika diperbandingkan dengan Tahun 2024, menunjukkan peningkatan realisasi hingga melampaui target Tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 78 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,8	4,86	101,25	▲ Tercapai/ Melampaui

Nilai Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2025 diproyeksikan mampu mencapai target Tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

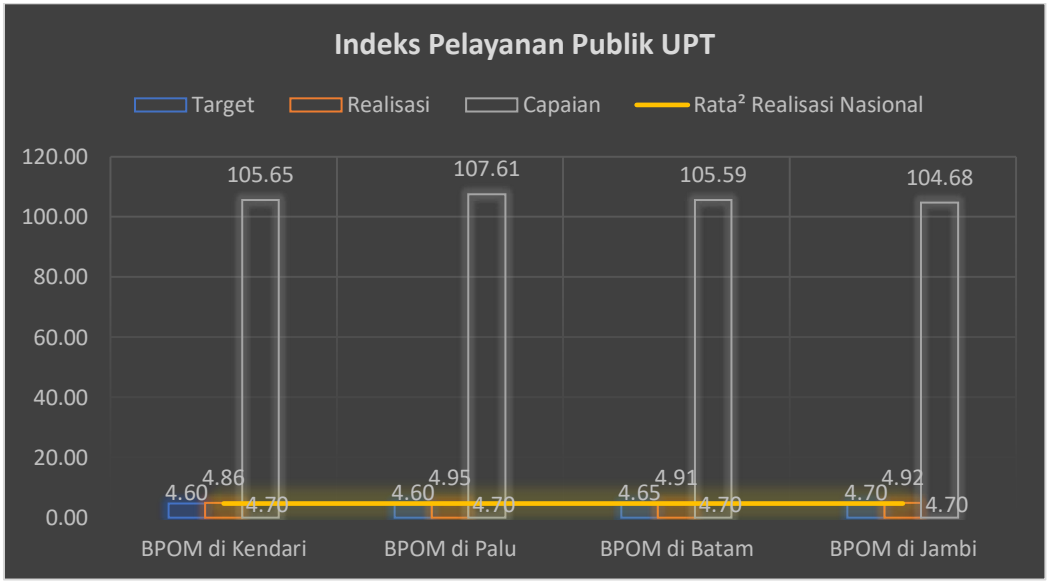

Gambar 54 Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik, dengan target sama pada keempat balai, telah melampaui targetnya. Balai dengan nilai IPP tertinggi adalah BPOM di Palu sebesar 4,95; sedangkan dengan nilai IPP terendah adalah BPOM di Kendari sebesar 4,86. Pada keempat balai yang dieprbandingkan, realisasi berada diatas rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2025 telah melampui target. Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Kendari mengalami tren kenaikan yang positif pada Tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian adalah;

1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik telah melibatkan pengguna layanan BPOM di Kendari, yaitu dari Stakeholder, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, Masyarakat sebagai perwakilan konsumen, dan Organisasi Masyarakat dan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan; Penyusunan dan penetapan standar pelayanan, SOP, maklumat pelayanan memberikan kepastian prosedur, waktu, biaya, dan output layanan.
2) Standar pelayanan yang disosialisasikan dengan baik meningkatkan pemahaman pegawai dan masyarakat, sehingga mengurangi keluhan dan kesalahan layanan. Pemberian layanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan;
3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui pelatihan termasuk peningkatan soft skill petugas pemberi layanan; Program pelatihan pelayanan prima, etika pelayanan, komunikasi publik, serta pengendalian gratifikasi meningkatkan profesionalisme aparatur. Penanaman nilai integritas dan budaya melayani berdampak langsung pada sikap ramah, responsif, dan adil dalam pemberian layanan. Konsistensi penerapan budaya 5S (Sambut, Senyum, Sapa, Salam, dan Solusi);
4) Digitalisasi dan Inovasi Layanan memberi kontribusi terhadap keberhasilan penerapan sistem layanan berbasis elektronik (e-service, antrian online, pengaduan digital) mempercepat proses dan meningkatkan transparansi. Inovasi layanan yang berorientasi kebutuhan pengguna (user oriented) meningkatkan kepuasan masyarakat dan persepsi positif terhadap instansi.

   Layanan inovasi Si jempol memudahkan pengguna layanan dan peningkatan kepuasan pihak ketiga dalam menguji sampelnya di laboratorium BPOM di Kendari; Layanan ODS (One Day Service) untuk sampel kasus dengan waktu penyelesaian pengujian sehari, Layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

konsultasi Sertifikasi dan Registrasi baik secara online maupun offline melalui Inovasi SiPintar yang dikembangkan menjadi Pintar Plus;

5) Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan publik dengan berkontribusi untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika mendapatkan pelayanan;
6) Pengelolaan Pengaduan dan Umpan Balik dengan menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat meningkatkan kepercayaan publik. Hasil pengaduan dan survei kepuasan digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan;
7) Monitoring dan evaluasi berkala memastikan program berjalan sesuai target kinerja berkontribusi dalam keberhasilan capaian tersebut serta pemberian penghargaan (reward) dan penerapan sanksi (punishment) mendorong konsistensi kinerja pelayanan.

Tabel 79 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pelayanan Publik	Petugas pelayanan tidak memberikan informasi yang jelas terkait informasi layanan di luar kewenangan BPOM	Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik dan Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana layanan publik	- Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan - Perbaikan sarana prasarana layanan - Menyiapkan rekomendasi penyedia layanan lain jika layanan tersebut bukan kewenangan BPOM	TW I 2026	Y	R-01	Pelanggan tidak puas atas pelayanan informasi yang diterima
2	Indeks Pelayanan Publik	Kurangnya pemahaman stake holder terhadap tupoksi BPOM	Advokasi lintas sektor terkait tupoksi BPOM	Advokasi lintas sektor terkait tupoksi BPOM	TW I 2026	Y	R-02	Terjadinya pemberian informasi yang keliru dari pihak stake holder di media massa terkait tupoksi BPOM
3	Indeks Pelayanan Publik	Informasi yang diberikan konsumen dalam pengaduan online kurang jelas atau kurang lengkap dan pengaduan tertentu membutuhkan investigasi lanjutan sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaiannya	Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik dan Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana layanan publik	Follow up perkembangan tindak lanjut pengaduan di fungsi terkait	TW I 2026	Y	R-03	Pegaduan masyarakat lambat ditindaklanjuti
4	Indeks Pelayanan Publik	Pihak terkait tidak mengetahui jadwal masuk sampel ODS ke Laboratorium	Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik dan Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana layanan	1. Menyampaikan SOP ODS kepada pihak terkait 2. Monev ODS secara berkala	TW I 2026	Y	R-05	Hasil pengujian sampel ODS melewati timeline

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			publik					
5	Indeks Pelayanan Publik	Sarana dan prasarana kurang memadai	Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik dan Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana layanan publik	Pengadaan dan/atau pemeliharaan Sarpras Pelayanan Publik	TW I 2026	Y	S-02	Kepuasan masyarakat turun
6	Indeks Pelayanan Publik	Anggaran belum tersedia	Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik dan Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana layanan publik	Pengadaan Penyimpanan sampel sesuai standar	TW I 2026	Y	SDM-06	Penanganan Narkotika tidak dalam kondisi aman
7	Indeks Pelayanan Publik	Kurangnya integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik dan Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana layanan publik	- Implementasi core values BerAKHLAK khususnya nilai-nilai akuntabel - Update pakta integritas pegawai BPOM Kendari setiap tahun	TW I 2026	Y	SDM-11	Terjadi kebocoran pengaduan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 ditetapkan dengan target 4,6; sedangkan realisasi capaian 4,86 atau 105% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori Pelayanan Prima, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan standar pelayanan dan kepuasan Masyarakat. Tangging indikator Indeks Pelayanan Publik pada kegiatan RO BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT. Realisasi anggaran Tahun 2025 pada RO BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT sebesar 99,80% dengan capaian output mencapai 338,69%.

Beberapa program yang dapat mendukung tercapainya keberhasilan indeks pelayanan publik di BPOM Kendari pada Tahun 2025 antara lain:

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan secara konsisten dan sesuai kebutuhan pelanggan. Standar pelayanan telah disusun, ditetapkan, dan diterapkan secara konsisten, sehingga memberikan kepastian prosedur, waktu, dan biaya layanan kepada masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya persepsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kualitas layanan. Kualitas peningkatan layanan juga didasarkan review dari hasil kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan dan masukan dari pelanggan;

2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM dalam memberikan layanan melalui pelatihan pelayanan prima dan penguatan integritas aparatur mendorong perubahan perilaku petugas layanan menjadi lebih ramah, responsif, dan profesional.
3. Pemanfaatan digitalisasi dalam pemberian layanan dan Inovasi layanan berbasis teknologi informasi mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan transparansi, yang berkontribusi pada meningkatnya kepuasan pengguna layanan yang sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat dan pelaku usaha
4. Pemberian penghargaan terhadap petugas layanan publik terbaik setiap triwulan untuk memotivasi pegawai yang bertugas untuk memberikan layanan publik yang optimal;
5. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik secara berkesinambungan untuk memberi rasa aman dan kenyamanan pelanggan;
6. Pengelolaan Pengaduan yang Efektif. Tersedianya kanal pengaduan dan tindak lanjut yang relatif cepat membuat masyarakat merasa didengar dan dilayani dengan baik, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan publik.
7. Monitoring dan Evaluasi Kinerja pelayanan yang dilakukan secara berkala dan digunakan sebagai dasar perbaikan, sehingga kualitas layanan dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

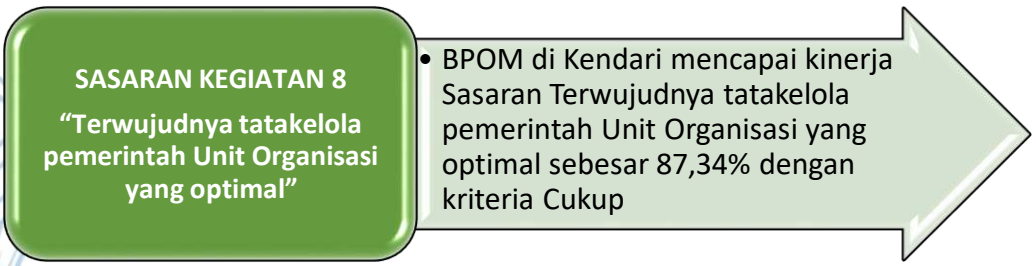

Gambar 55 Sasaran Kegiatan 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pencapaian Sasaran Kegiatan kedelapan didukung oleh empat indikator

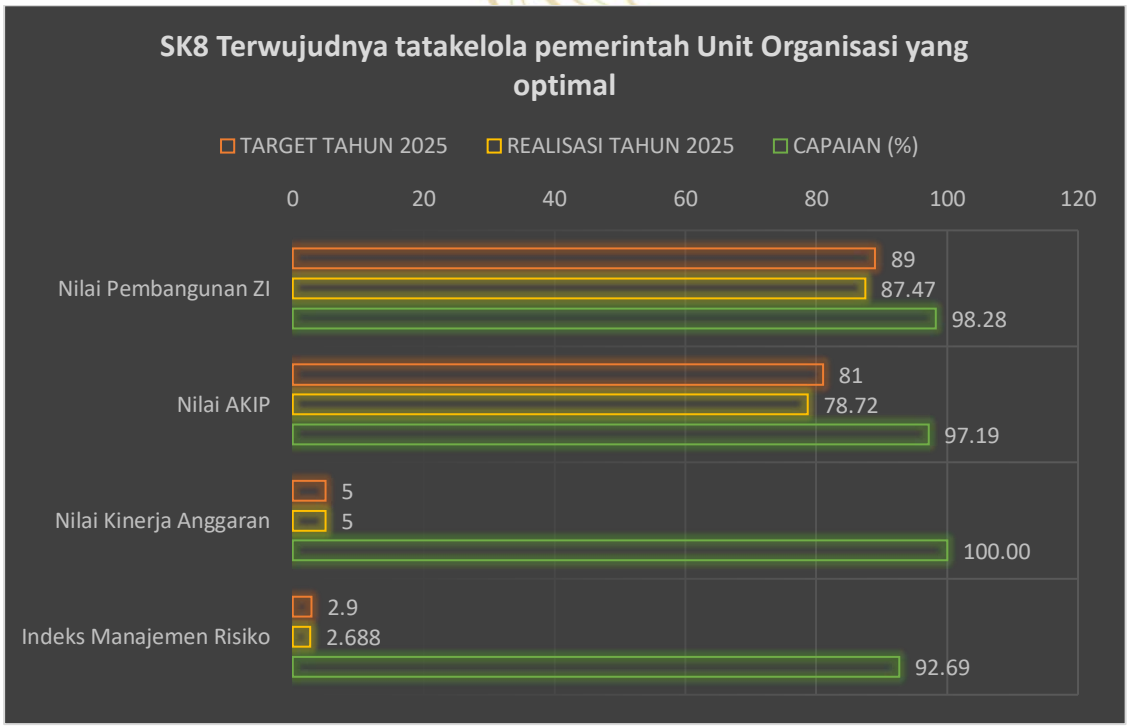

25] Nilai Pembangunan ZI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 80 Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI	89	87,47	98,28	Baik

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
No	**KOMPONEN HASIL**	**BOBOT**
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Berdasarkan Nota Dinas dari Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.08.25.312 tanggal 14 Agustus 2025; Hasil Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Kendari sebesar 87,47 dan merupakan nilai Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

NILAI PMPZI					87,47
A	**Komponen Pengungkit**	**Bobot**	**Aspek Pemenuhan**	**Aspek Reform**	**Nilai Total**
					50,77
1	Manajemen Perubahan	8%	2,89	3,67	6,56
2	Penataan Tatalaksana	7%	2,75	2,83	5,58
3	Penataan Sistem	10%	4,20	4,25	8,45

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NILAI PMPZI					**87,47**
	Manajemen SDM				
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	4,57	4,20	8,77
5	Penguatan Pengawasan	15%	6,50	6,88	13,38
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	4,14	3,89	8,03
B	**Komponen Hasil**	**Bobot**	**Aspek Pemenuhan**	**Aspek Reform**	**Nilai Total**
					36,70
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %			19,72
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %			16,98

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

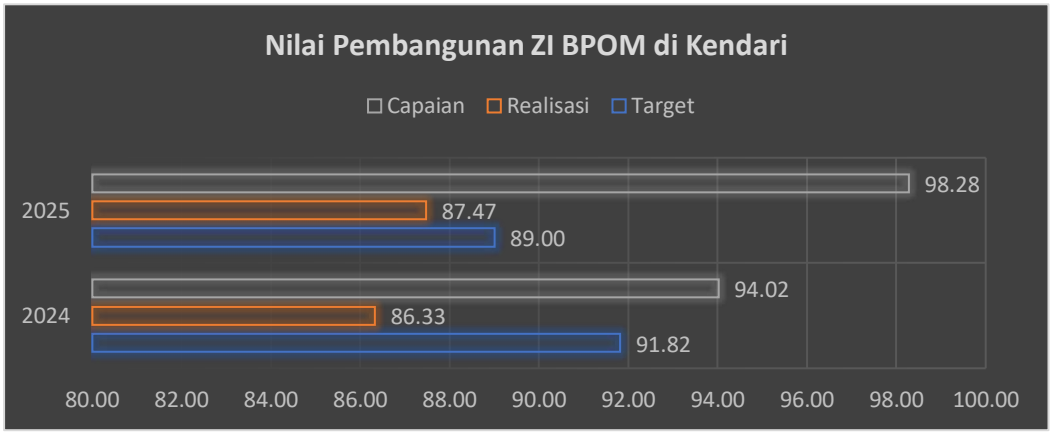

Gambar 56 Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari mengalami peningkatan pada Tahun 2025. Namun baik pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, realisasi yang diperoleh BPOM di Kendari belum mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari mengalami tren yang fluktuatif selama 2020-2025 ditunjukkan pada gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

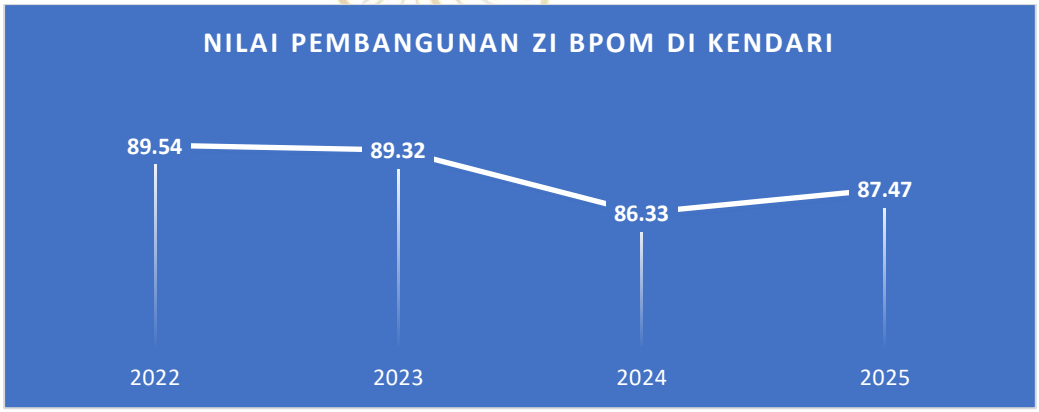

Gambar 57 Trend Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025 jika diperbandingkan dengan target Tahun 2029 belum mencapai target jangka menangah. BPOM di Kendari perlu melakukan Langkah-langkah perbaikan dalam implementasi RB sehingga mampu meraih nilai Pembangunan ZI sesuai yang telah direncanakan. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 81 Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025 dengan Target 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI	90,2	87,47	96,97	Akan Tercapai

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

Berdasarkan grafik berikut diketahui bahwa realisasi Nilai Pembangunan ZI, BPOM di Palu meraih nilai tertinggi mencapai 90,35. Sedangkan balai dengan nilai pembangunan ZI terendah dicapai oleh BPOM di Jambi sebesar 85,82%. Pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasinya berada diatas rata-rata realisasi Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

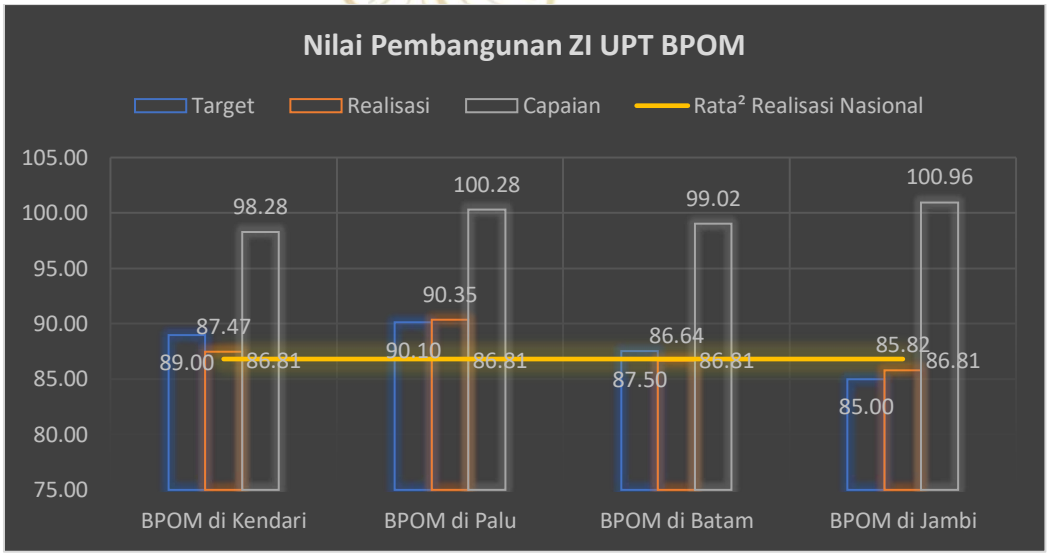

Gambar 58 Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025 dengan Balai setara

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari pada Tahun 2025 belum mencapai target. Realisasi Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari mengalami tren yang fluktuatif selama periode Renstra 2020-2024. Dibandingkan dengan nilai Tahun 2024 sebesar 86,33 nilai Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,14 poin. Namun, meskipun mengalami kenaikan pada Tahun 2025, Nilai Pembangunan ZI BPOM di Kendari belum mencapai target yang direncanakan.

Hasil penilain RB pada Tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas dari Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.08.25.312 tanggal 14 Agustus 2025 menunjukkan bahwa hasil evaluasi RB Balai POM di Kendari:

1) Balai POM di Kendari berhasil mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024;
2) Terdapat kebijakan kepala unit kerja terkait mekanisme dan kriteria pemilihan tim pembangunan Zona Integritas (ZI), namun bukti dukung yang disampaikan belum menggambarkan secara jelas bahwa proses pemilihan tim ZI telah sesuai dengan kebijakan kepala unit kerja terkait mekanisme dan kriteria pemilihan tim pembangunan ZI.;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Dokumen Rencana kerja pembangunan ZI telah memuat target prioritas, namun program prioritas yang telah ditetapkan belum dilengkapi rencana kerja dan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan masing-masing target prioritas tersebut secara berkala;
4) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan ZI, namun hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI belum seluruhnya ditindaklanjuti dan belum terlihat tindak lanjut atas rencana aksi/saran yang disusun pada pelaporan periode berikutnya;
5) Telah dibentuk Agen Perubahan yang berperan aktif melaksanakan program perubahan dan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perubahan dalam mendukung implementasi pembangunan zona integritas, namun dampak dari program perubahan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya serta belum terdapat penjelasan terkait dampak dari setiap program perubahan yang telah dilaksanakan;
6) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik, namun belum disertai kendala serta tindak lanjutnya.
7) Telah memiliki SOP untuk beberapa inovasi yang dibangun namun belum terdapat bukti implementasi bahwa SOP tersebut telah dijalankan.
8) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan analisa kebutuhan dan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala;
9) Hasil assessment pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;
10) Telah mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, namun belum terdapat inovasi terkait aturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

11) Pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja namun belum terlihat tindak lanjut atas rekomendasi dari triwulan sebelumnya;
12) Unit Kerja telah membangun lingkungan pengendalian termasuk penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi, namun belum terdapat inovasi yang mendukung agar penerapan sistem pengendalian intern berjalan dengan baik;
13) Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap bulan, namun belum terdapat data dukung yang menunjukkan bahwa seluruh hasil survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang dilakukan ditindaklanjuti secara memadai.

Tabel 82 Matriks Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Pembangunan ZI	Petugas tidak ingin mendapatkan sanksi	Membuat kebijakan bahwa verifikator WBS adalah seorang pegawai yang memiliki keterlibatan minimal dengan pihak eksternal / tidak memiliki keterlibatan pihak eksternal.	Membuat kebijakan bahwa verifikator WBS adalah seorang pegawai yang memiliki keterlibatan minimal dengan pihak eksternal / tidak memiliki keterlibatan pihak eksternal.	TW I 2026	Y	F-01	Verifikator pengaduan dapat menghapus data pengaduan terutama jika pegawai yang dilaporkan adalah verifikator tersebut
2	Nilai Pembangunan ZI	Pelapor merasa dirugikan atas hasil pengawasan	Melakukan verifikasi terhadap semua laporan yang masuk ke SINGA	Melakukan verifikasi terhadap semua laporan yang masuk ke SINGA	TW I 2026	Y	F-02	Adanya laporan fiktif
3	Nilai Pembangunan ZI	Petugas verifikator memiliki beban kerja yang tinggi	Membuat jadwal monitoring saluran pengaduan	Membuat jadwal monitoring saluran pengaduan	TW I 2026	Y	F-03	Laporan pengaduan telat ditindaklanjuti oleh petugas
4	Nilai Pembangunan ZI	Budaya gratifikasi atau pemberian tanda terimakasih yang masih tinggi di masyarakat	Melaporkan kegiatan pemberian suap melalui aplikasi SANG INTEGRITAS, Penandatanganan Pakta Integritas	Melaporkan kegiatan pemberian suap melalui aplikasi SANG INTEGRITAS, Penandatanganan Pakta Integritas	TW I 2026	Y	F-05	Adanya pemberian gratifikasi karena telah mendapatkan informasi serta layanan yang baik dan tepat waktu
5	Nilai Pembangunan ZI	Pemberi suap berharap proses penyidikan tidak berlanjut	Segera membuat laporan fraud melalui Sang Integritas	Segera membuat laporan fraud melalui Sang Integritas	TW I 2026	Y	F-08	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 mengharapkan penghentian proses penyidikan
6	Nilai Pembangunan ZI	Integritas pemberi suap masih rendah dan berharap ditunjuk pelaksana pekerjaan di luar	Menyiapkan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa sesuai SOP	Menyiapkan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa sesuai SOP	TW I 2026	Y	F-09	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 sebagai vendor untuk Pengadaan barang/jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SOP Pengadaan Barang/Jasa						
7	Nilai Pembangunan ZI	Budaya gratifikasi atau pemberian tanda terimakasih yang masih tinggi di masyarakat	Melaporkan pemberian gratifikasi ke aplikasi SANG INTEGRITAS	Melaporkan pemberian gratifikasi ke aplikasi SANG INTEGRITAS	TW I 2026	Y	F-10	Adanya pemberian gratifikasi oleh pihak ke-3 karena telah ditunjuk sebagai Penyedia
8	Nilai Pembangunan ZI	Integritas penguji masih rendah	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Melakukan pelaporan benturan kepentingan melalui SANG INTEGRITAS secara berkala 3. Pengujian sampel dilakukan oleh penguji yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak ke-3 4. Melakukan pengujian sampel TMS secara tim dan berulang dengan personel yang berbeda.	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Melakukan pelaporan benturan kepentingan melalui SANG INTEGRITAS secara berkala 3. Pengujian sampel dilakukan oleh penguji yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak ke-3 4. Melakukan pengujian sampel TMS secara tim dan berulang dengan personel yang berbeda.	TW I 2026	Y	F-11	Adanya benturan Kepentingan antara penguji dan pemilik sampel pihak ke-3
9	Nilai Pembangunan ZI	Manajemen jaringan kurang terstruktur dan Penanganan dari provider penyedia jasa jaringan internet yang kurang responsif/sigap.	1. Tim TI melakukan identifikasi penyebab gangguan, bila diluar kendali Tim TI maka 2. Tim TI melaporkan kepada Provider Penyedia Layanan Jaringan Internet 3. Monitoring kualitas jaringan secara berkala 4. Pengusulan koneksi internet cadangan (backup link) 5. Mendokumentasi gangguan dan waktu pemulihan (down time)	1. Tim TI melakukan identifikasi penyebab gangguan, bila diluar kendali Tim TI maka 2. Tim TI melaporkan kepada Provider Penyedia Layanan Jaringan Internet 3. Monitoring kualitas jaringan secara berkala 4. Pengusulan koneksi internet cadangan (backup link) 5. Mendokumentasi gangguan dan waktu pemulihan (down time)	TW I 2026	Y	IT-02	Gangguan Jaringan Internet UPT menyebabkan aplikasi pusat tidak dapat diakses
10	Nilai Pembangunan ZI	Kurangnya kesadaran pegawai dalam penggunaan listrik	Peningkatan pemahaman terkait efisiensi sumberdaya	Pembuatan Chatbot pengingat di akhir jam kantor; Pembuatan poster ramah lingkungan	TW I 2026	Y	K-01	Penggunaan listrik yang belum efisien
11	Nilai Pembangunan ZI	Adanya Efisiensi Anggaran	Koordinasi denganTim Penganggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana kearsipan	Menyediakan anggaran pengadaan sarana dan prasarana kearsipan	TW I 2026	Y	O-05	Sarana dan prasarana yang masih kurang di masing-masing fungsi/unit pengolah
12	Nilai Pembangunan ZI	Pegawai belum sepenuhnya Aware terhadap Tata naskah Dinas	Melakukan pembinaan terkait tata naskah dinas, dan melakukan verifikasi naskah dinas berjenjang diaplikasi srikandi	Melakukan pembinaan terkait tata naskah dinas, dan melakukan verifikasi naskah dinas berjenjang diaplikasi srikandi	TW I 2026	Y	O-06	Naskah dinas yang dibuat belum sesuai dengan tata naskah dinas
13	Nilai Pembangunan ZI	Arsip statis wajib diselamatkan sebagai memori kolektif bangsa	Melakukan koordinasi dengan lembaga kearsipan daerah dalam rangka penyerahan arsip	Melakukan koordinasi dengan lembaga kearsipan daerah dalam rangka penyerahan arsip statis	TW I 2026	Y	O-07	Balai POM Kendari memiliki arsip statis, tetapi tidak dapat menyimpan dan mengelola arsip statis secara mandiri karena

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			statis					kewenangan pengelolaan arsip statis berada pada lembaga kearsipan.
14	Nilai Pembangunan ZI	akses dokumen tidak terkelola	Monitoring pelaksanaan pengelolaan kearsipan di setiap fungsi/unit pengelola	Monitoring pelaksanaan pengelolaan kearsipan di setiap fungsi/unit pengelola	TW I 2026	Y	O-08	Pengelolaan kearsipan belum memenuhi Pedoman Pengelolaan Kearsipan BPOM
15	Nilai Pembangunan ZI	kurang edukasi terhadap pelanggan terkait permohonan uji	Peningkatan edukasi kepada pihak ketiga	Edukasi kepada pelanggan	TW I 2026	Y	O-08	Pelanggan tidak membawa surat permohonan uji
16	Nilai Pembangunan ZI	Anggaran belum tersedia	Penambahan kuota jaringan	Penambahan kuota jaringan	TW I 2026	Y	O-09	Pada saat melakukan penginputan koneksi jaringan yang tidak stabil
17	Nilai Pembangunan ZI	Kurangnya koordinasi antara operator dan petugas BMN	Menjalankan prosedur penginputan data sesuai persyaratan sesuai kodefikasi	Menjalankan prosedur penginputan data sesuai persyaratan sesuai kodefikasi	TW I 2026	Y	O-10	Kesalahan pencatatan kodefikasi pada saat pendetailan BMN
18	Nilai Pembangunan ZI	User memindahkan barang berdasarkan kebutuhan fungsi	1. DBR di aktifkan 2. Kepedulian Penanggung Jawab DBR terhadap aset yang menjadi tangung jawabnya	1. DBR di aktifkan 2. Kepedulian Penanggung Jawab DBR terhadap aset yang menjadi tangung jawabnya	TW I 2026	Y	O-11	Kesulitan dalam penelusuran aset
19	Nilai Pembangunan ZI	Dokumen IMS dari tiap bagian/fungsi belum terkelola secara terpusat	kolaborasi dengan Tim SPI terkait dokumen mutu	kolaborasi dengan Tim SPI terkait dokumen mutu	TW I 2026	Y	O-20	Fungsi/bagian yang memiliki keterkaitan proses bisnis dengan fungsi lainnya tidak dapat melihat dokumen IMS dari fungsi tersebut
20	Nilai Pembangunan ZI	Pelaku usaha/pelanggan yang akan menguji sampel belum membawa samplenya karena membutuhkan waktu khusus untuk ke kantor Balai POM di Kendari	Membuat jadwal Petugas (SK Petugas) dan konfirmasi terhadap pelanggan	Membuat jadwal Petugas (SK Petugas) dan konfirmasi terhadap pelanggan	TW I 2026	Y	O-21	Sampel pihak ke-3 yang sedianya telah dapat diuji menjadi tertunda
21	Nilai Pembangunan ZI	Suara bising di area terbuka (kapal)	Menggunakan poster KIE yang lebih besar dan menarik untuk peserta KIE KAPEM PLUS, serta menggunakan pengeras suara	Menggunakan poster KIE yang lebih besar dan menarik untuk peserta KIE KAPEM PLUS, serta menggunakan pengeras suara	TW I 2026	Y	R-06	Peserta KIE KAPEM PLUS yang kurang fokus mendengarkan KIE yang diberikan
22	Nilai Pembangunan ZI	Punishment belum diterapkan dengan optimal	1. Monitoring pengisian LAKO 2. Pengawasan dari Kepala Sub Bag. TU, Ketua Tim dan Kepegawaian 3. Security lebih optimal dalam melakukan pencatatan pegawai yang keluar masuk	1. Monitoring pengisian LAKO 2. Pengawasan dari Kepala Sub Bag. TU, Ketua Tim dan Kepegawaian 3. Security lebih optimal dalam melakukan pencatatan pegawai yang keluar masuk	TW I 2026	Y	SDM-01	Masih terdapat pegawai yang tidak mengisi form izin keluar kantor secara manual saat keluar di jam kerja.
23	Nilai Pembang	Tidak mau menerima penugasan baru dari	1. Sosialisasi terkait Manajemen Talenta	1. Sosialisasi terkait Manajemen Talenta	TW I 2026	Y	SDM-02	Terjadinya penolakan pegawai pada Fungsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	unan ZI	pimpinan	2. Pembinaan secara persuasif 3. Bimbingan Kinerja	2. Pembinaan secara persuasif 3. Bimbingan Kinerja				Tujuan jika terjaring rotasi internal UPT
24	Nilai Pembang unan ZI	Panitia tidak menjaga integritas dalam melaksanakan tugas	1. Sosialisasi dari Biro SDM Badan POM terkait pelaksanaan pengadaan CPNS 2. Panitia wajib membuat Pakta Integritas	1. Sosialisasi dari Biro SDM Badan POM terkait pelaksanaan pengadaan CPNS 2. Panitia wajib membuat Pakta Integritas	TW I 2026	Y	SDM-03	Adanya kemungkinan terjadi pungli oleh panitia yang menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi CPNS
25	Nilai Pembang unan ZI	Adanya Efisiensi Anggaran	Menyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Kearsipan	Menyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Kearsipan	TW I 2026	Y	SDM-05	Pengelola Arsip belum mengikuti diklat teknis kearsipan
26	Nilai Pembang unan ZI	Kendala jaringan pada saat upload laporan	Menjalankan prosedur penginputan data sesuai persyaratan	Menjalankan prosedur penginputan data sesuai persyaratan	TW I 2026	Y	SDM-10	Keterlambatan penyampaian laporan BMN
27	Nilai Pembang unan ZI	Karena awareness keamanan informasi masih rendah	1. Sosialisasi rutin keamanan data dan informasi 2. Edukasi terkait phishing, password, dan data rahasia 3. Pembatasan hak akses data sesuai tugas 4. Penerapan kebijakan password dan autentikasi 5. Pembuatan SOP keamanan informasi	1. Sosialisasi rutin keamanan data dan informasi 2. Edukasi terkait phishing, password, dan data rahasia 3. Pembatasan hak akses data sesuai tugas 4. Penerapan kebijakan password dan autentikasi 5. Pembuatan SOP keamanan informasi	TW I 2026	Y	SDM-12	Potensi kebocoran data instansi dan pegawai yang bersifat rahasia
28	Nilai Pembang unan ZI	Adanya perbedaan pemahaman antar pegawai terhadap suatu isu atau permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal	Monev secara berkala	Monev secara berkala	TW I 2026	Y	SDM-15	Tidak efektifnya wadah yang ada untuk aspirasi/ide/keluhan pegawai sehingga aspirasi tidak tersalurkan dengan baik, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja, menurunkan semangat dan keterlibatan tim serta menghambat inovasi internal
29	Nilai Pembang unan ZI	Kurang efektifnya sosialisasi nilai-nilai RB, core values BerAKHLAK, dan peraturan Badan POM terbaru dalam lingkungan kerja	1. Membuat kuis PARABELA 2. Monitoring partisipasi dan hasil sosialisasi pada pegawai melalui Kuis PARABELA	1. Membuat kuis PARABELA 2. Monitoring partisipasi dan hasil sosialisasi pada pegawai melalui Kuis PARABELA	TW I 2026	Y	SDM-16	Belum meratanya pemahaman dan implementasi pada pegawai terkait RB, core values BerAKHLAK peraturan Badan POM terbaru
30	Nilai Pembang unan ZI	Kurangnya motivasi pegawai untuk melakukan diseminasi setelah mengikuti pelatihan	Pembuatan jadwal pemaparan materi Kompas BPOM (materi umum, diseminasi hasil pelatihan)	Pembuatan jadwal pemaparan materi Kompas BPOM (materi umum, diseminasi hasil pelatihan)	TW I 2026	Y	SDM-17	Penurunan tingkat sharing ilmu pengetahuan dan kebersamaan antar pegawai
31	Nilai Pembang unan ZI	1. Kurangnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital; 2. Materi belum	1. Update materi baru tiap bulan dari beberapa fungsi ke website 2. Feedback SDM	1. Update materi baru tiap bulan dari beberapa fungsi ke website 2. Feedback SDM magang setiap materi setelah	TW I 2026	Y	SDM-18	-Pembinaan SDM magang masih berbasis konvensional; -Gangguan teknis pada website, -Kurangnya kemampuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		diupdate ke website; 3. Jadwal pertemuan dan pelatihan dengan SDM magang belum diilakukan rutin tiap bulan; 4. Kolaborasi belum terealisasi karena jadwal antar user di masing-masing fungsi berbeda-beda	magang setiap materi setelah menerima pelatihan IDE-U dalam bentuk review 3. Melakukan monev bulanan triwulan dan tahunan, 4. Membuat jadwal bulanan pertemuan SDM Magang untuk akses materi	menerima pelatihan IDE-U dalam bentuk review 3. Melakukan monev bulanan triwulan dan tahunan, 4. Membuat jadwal bulanan pertemuan SDM Magang untuk akses materi				teknis SDM dalam pengoperasian platform; minimnya partisipasi user dari berbagai fungsi untuk berbagi materi yang akan di update ke website
32	Nilai Pembangunan ZI	Beban kerja utama tim, belum adanya pengaturan waktu produksi dan target konten yang terstruktur.	Perencanaan konten, pembagian peran tim, dan penetapan target produksi video yang realistis	Perencanaan konten, pembagian peran tim, dan penetapan target produksi video yang realistis	TW I 2026	Y	SDM-19	Program BANGGONA PIKKIR tidak berjalan secara konsisten sehingga tidak memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tangging indikator Nilai Pembangunan ZI pada kegiatan RO BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 50%; RO CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia sebesar 50%; RO CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar 50%; RO CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesiasebesar 100%; RO EBA.956 Penatausahaan BMN sebesar 50%; dan RO EBA.994 Layanan Perkantoran sebesar 50%. Realisasi anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator Nilai Pembangunan ZI adalah

1) RO BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 99,96% dengan realisasi output sebesar 100%;
2) RO CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia sebesar 98,78% dengan realisasi output sebesar 100%;
3) RO CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar 100% dengan realisasi output sebesar 14%;
4) RO CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia sebesar 99,99% dengan realisasi output sebesar 0,50%;
5) RO EBA.956 Penatausahaan BMN sebesar 94,67% dengan realisasi output sebesar 100%; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6) RO EBA.994 Layanan Perkantoran sebesar 98,89% dengan realisasi output sebesar 100%.

Capaian indeks RB BPOM di Kendari pada Tahun 2025 belum memenuhi target. Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan Balai POM di Kendari untuk mencapai target Nilai Pembangunan ZI pada Tahun 2026 antara lain:

1) Melakukan penyempurnaan implementasi dan dokumentasi yang memadai terhadap mekanisme penentuan anggota Tim ZI sesuai dengan kebijakan mekanisme dan kriteria pemilihan tim ZI di lingkungan Balai POM di Kendari;
2) Menyusun rencana aksi pembangunan ZI secara komprehensif serta menetapkan indikator dan target keberhasilan yang akan dicapai;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala dan memastikan bahwa rencana aksi perbaikan atas kendala yang dihadapi pada periode pemantauan sebelumnya telah ditindaklanjuti;
4) Mendorong agen perubahan berperan aktif mendukung implementasi pembangunan zona integritas menghasilkan perubahan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya serta melengkapi laporan monitoring dan evaluasi agen perubahan dengan penjelasan terkait dampak program perubahan yang telah dilaksanakan;
5) Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang memuat kendala dan tindak lanjutnya.
6) Mengimplementasikan SOP mikro inovasi yang telah dijalankan dan mendokumentasikannya secara memadai;
7) Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang memadai dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan dan memanfaatkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala;
8) Mempertimbangkan hasil assessment sebagai dasar untuk mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai agar penempatan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap pegawai;
9) Mendorong penciptaan inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10) Mendokumentasikan bukti keterlibatan pimpinan unit kerja dalam proses pemantauan pencapaian kinerja dan memastikan bahwa rekomendasi dari triwulan sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut;
11) Mendorong penciptaan inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian intern agar berjalan dengan baik;
12) Memastikan seluruh hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap bulan terkait pelayanan yang dilakukan telah ditindaklanjuti dan mendokumentasikannya secara memadai;
13) Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

26] Nilai AKIP

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 83 Nilai AKIP Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Nilai AKIP	81	78,72	97,19	Baik

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh BPOM di Kendari.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP dengan bobot sebagi berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Nilai AKIP BPOM di Kendari pada Tahun 2025 sebesar 78,72 dengan predikat BB. Hal ini menggambarkan aingkat akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

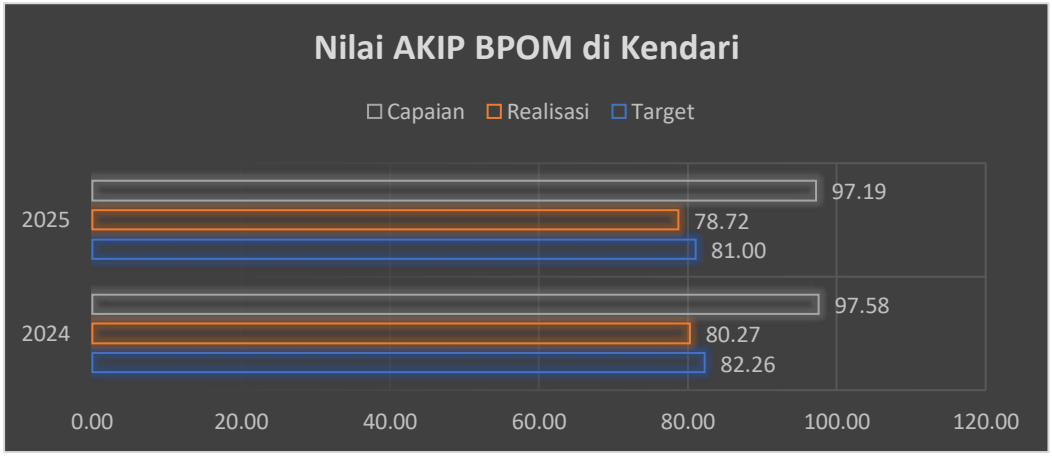

Gambar 59 Nilai AKIP BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Nilai AKIP BPOM di Kendari mengalami penurunan pada Tahun 2025. Realisasi Nilai AKIP BPOM di Kendari mengalami penurunan nilai dan predikat dari nilai 80,27 (A) pada Tahun 2024, menjadi 78,72 (BB) pada Tahun 2025. Penurunan sebesar 1,54 poin tersebut disebabkan pada penurunan komponen capaian kinerja yang signifikan (-4,3). Penurunan nilai AKIP tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai POM di Kendari Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	19,20	19,68	+0,48
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,76	19,68	+1,92
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	9,84	+0,36
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	16,80	0,00
5.	Capaian Kinerja	20	17,02	12,72	-4,30
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**80,26**	**78,72**	**-1,54**
Predikat			**A**	**BB**	**Turun dari A ke BB**

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 84 Nilai AKIP Tahun 2025 dengan Target 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP	83	78,72	94,84	Akan Tercapai

Nilai AKIP BPOM di Kendari Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029, perlu upaya perbaikan untuk melampaui targetnya. Upaya keras dalam perbaikan implementasi AKIP di BPOM di Kendari diharapkan dapat meningkatkan kualitas SAKIP, sehingga dapat mencapai target Tahun 2029 seperti yang direncanakan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

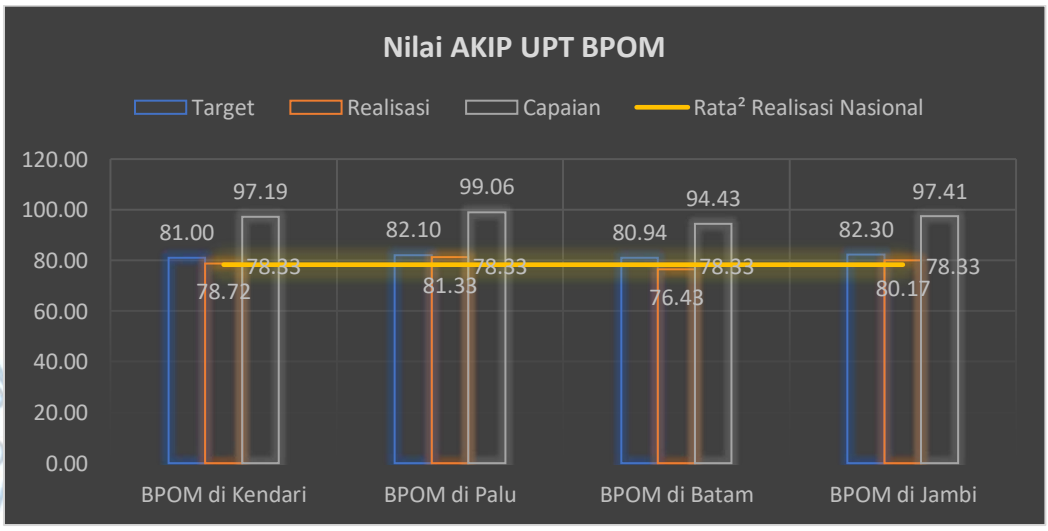

Gambar 60 Nilai AKIP Tahun 2025 dengan Balai setara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Nilai AKIP, BPOM di Palu meraih nilai tertinggi mencapai 81,33. Sedangkan balai dengan nilai AKIP terendah dicapai oleh BPOM di Batam sebesar 76,43%. Pada keempat balai yang diperbandingkan, realisasi berada diatas rata-rata realisai Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai AKIP BPOM di Kendari Tahun 2025 mencapai 78,72; menurun dibandingkan Tahun 2024. Realisasi Nilai AKIP BPOM di Kendari mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2020-2025 ditunjukkan pada gambar berikut.

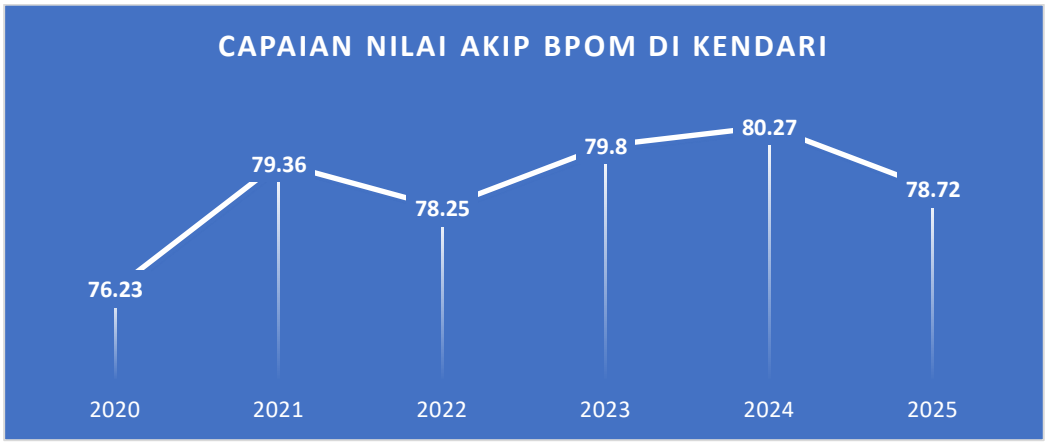

Gambar 61 Nilai AKIP BPOM di Kendari

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP BPOM di Kendari Tahun 2025 yang disampaikan oleh Inspektur Utara melalui Nota Dinas Nomor PI.04.71.7.01.26.03 Tanggal 5 Januari 2026, terdapat penurunan pada komponen Capaian Kinerja dan kondisi stagnan pada komponen Evaluasi Internal. Terhadap komponen Capaian Kinerja, BPOM di Kendari perlu melakukan upaya keras untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, BPOM di Kendari perlu melakukan perbaikan dalam Laporan Evaluasi Internal dan pelaporan pada aplikasi e-Simetris.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat I terhadap implementasi atas SAKIP BPOM di Kendari pada Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dikategorikan BB (sangat baik); menunjukkan akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Hasil nilai AKIP BPOM di Kendari menunjukkan penurunan. Beberapa yang menjadi kelemahan adalah sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
    a. BPOM di Kendari telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, jangka pendek dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja; dan telah dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh stakeholder. Namun masih terdapat perbedaan nomenklatur Sasaran Strategis yang disajikan pada dokumen PK dan RAPK dengan Manual IKU, yang belum dilengkapi dengan justifikasi ataupun dokumentasi proses perubahan nomenklatur Sasaran Strategis yang dapat dijadikan dasar untuk meyakinkan bahwa perubahan dokumen perencanaan tersebut telah melalui tahapan reviu kinerja dalam rapat internal atau rapat evaluasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
    b. BPOM di Kendari telah menyusun Draf Renstra periode 2025-2029 namun terdapat beberapa perbedaan penetapan target kinerja pada dokumen RKT, PK, RAPK Tahun Anggaran 2025;
    c. Telah disusun analisa SWOT sebagai dasar dalam menentukan target indikator namun penyajiannya belum memadai, antara lain dengan mengidentifikasi elemen terkait Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kekuatan (pegawai yang kompeten) dan kelemahan (terdapat gap kompetensi) pada saat yang bersamaan;
    d. Kertas kerja penetapan target telah disusun untuk seluruh indikator namun belum seluruhnya mencakup cara pengukuran target yang didukung oleh basis data yang lengkap dan cenderung berdasarkan tren realisasi periode sebelumnya;
    e. Belum terdapat inovasi terkait perencanaan kinerja
2. Komponen Pengukuran Kinerja
    a. Penyajian data capaian kinerja pada dokumen pelaporan belum dapat diyakini keandalannya karena tim pengumpul data kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tidak memiliki akses hingga ke sumber data kinerja tiap bidang sehingga tidak bisa dilakukan mekanisme cross check data;

b. Pengisian pada aplikasi e-Simetris 2025 belum sepenuhnya sesuai ketentuan, khususnya pada pengisian atas kendala dan hambatan dan belum secara tertib mengisi kondisi awal, rekomendasi, maupun kondisi akhir pada menu RTL;

c. Pemanfaatan kertas kerja SKP level individu belum optimal.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

a. Dalam pengisian realisasi dan capaian kinerja yang dilakukan pada aplikasi e-Simetris dan menjadi dasar penyajian Laporan Evaluasi Internal (LEI), Laporan Kinerja Interim, dan Laporan Kinerja Tahunan, terdapat perbedaan penyajian data capaian kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan aplikasi e-Simetris;

b. Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian target atas indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara yang disebabkan karena pencapaian yang rendah pada tahun sebelumnya, namun atas kondisi penyesuaian tersebut belum disajikan di dalam Laporan Kinerja tahun 2024

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. BPOM di Kendari telah menyusun Laporan Evaluasi Internal (LEI) Tahun 2024 dan on going 2025 namun hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum berdampak secara signifikan terhadap peningkatan efektifitas dan efisiensi Kinerja;

b. Pengisian pada aplikasi e-Simetris 2025 telah dilakukan rutin setiap bulan, tetapi belum sepenuhnya lengkap untuk rencana aksi dan rekomendasi;

Tabel 85 Matriks Rekomendasi Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai AKIP	Data kinerja tersebar diberbagai substansi dan tidak terintegrasi	1. Penetapan target kinerja berdasarkan baseline data yang akurat 2. Menjalankan prosedur perencanaan kinerja yang optimal 3. Sistem integrasi	1. Penetapan target kinerja berdasarkan baseline data yang akurat 2. Menjalankan prosedur perencanaan kinerja yang optimal 3. Sistem integrasi data yang memadai	TW I 2026	Y	O-02	Ketidak-akuratan data kinerja sebagai acuan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			data yang memadai					
2	Nilai AKIP	Mekanisme Pengumpulan data kinerja yang tidak jelas (penanggungjawab, timeline dan langkah jika terjadi kesalahan/perubahan data)	Menetapkan mekanisme pelaporan kinerja yang memadai (adanya langkah verifikasi oleh penanggungjawab KaTim/Kasubbag TU, timeline pelaporan kepada tim monev, dan langkah perubahan/perbaikan data)	Menetapkan mekanisme pelaporan kinerja yang memadai (adanya langkah verifikasi oleh penanggungjawab KaTim/Kasubbag TU, timeline pelaporan kepada tim monev, dan langkah perubahan/perbaikan data)	TW I 2026	Y	O-03	Ketidaksesuaian nilai pengukuran kinerja
3	Nilai AKIP	Monitoring dilakukan setiap triwulan (rentang terlalu lama) untuk mendeteksi ketidaksesuaian dan melakukan pengendalian	Melaksanakan monev triwulanan secara konsisten oleh manajemen	Melaksanakan monev triwulanan secara konsisten oleh manajemen	TW I 2026	Y	O-04	Ketidaksesuaian Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap hasil monitoring yang dilakukan
4	Nilai AKIP	Kompetensi tim pelaporan kinerja belum optimal	Peningkatan/pengembangan kompetensi petugas terkait SAKIP secara berkala	Peningkatan/pengembangan kompetensi petugas terkait SAKIP secara berkala	TW I 2026	Y	SDM-04	Ketidaktepatan penyampaian laporan kinerja sesuai pedoman
5	Nilai AKIP	Nilai komponen capaian kinerja menurun tajam dikarenakan hasil evaluasi menunjukkan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya	Nilai AKIP agar ditingkatkan. Pencapaian kinerja terus dipantau, karena bagian dari penilaian AKIP. Karena nilai AKIP akan berpengaruh terhadap pembobotan NKO kedepan serta terhadap perolehan WBBM.	Peningkatan Pemantauan Kinerja untuk mengawal pencapaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	2026	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada Tahun 2025 BPOM di Kendari belum dapat mencapai nilai AKIP sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tagging indikator Nilai AKIP pada kegiatan RO BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan; namun dikarenakan adanya kebijakan efisiensi, anggaran sub komponen pada RO BKB.001 yang mendukung capaian indikator Nilai AKIP terblokir seluruhnya.

Beberapa hal yang diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai AKIP pada Tahun 2026 antara lain:

1) Peningkatan pemahaman dan kesadaran SDM BPOM di Kendari terkait akuntabilitas kinerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Komitmen dalam implementasi *Reward and Punishment* dari level Tim sd Individu;
3) Peningkatan komitmen pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal setiap bulan
4) Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui Bimbingan Teknis/Workshop dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja.
5) Mengupayakan kinerja tahun 2026 agar target tercapai dan capaiannya lebih baik dari tahun 2025.

27] Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Delapan indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 86 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100	Baik

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Selanjutnya nilai dikonversi menjadi:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0-50	Sangat Kurang	1
50,1-60	Kurang	2
60,01-80	Cukup	3
80,01-90	Baik	4
90,01-100	Sangat Baik	5

Pada Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kendari sebesar 91,84 yag terdiri dari 95,80 niai IKPA dan 87,87 nilai EKA. Nilai tersebut dikonversi menjadi 5 dengan kriteria Sangat Baik.

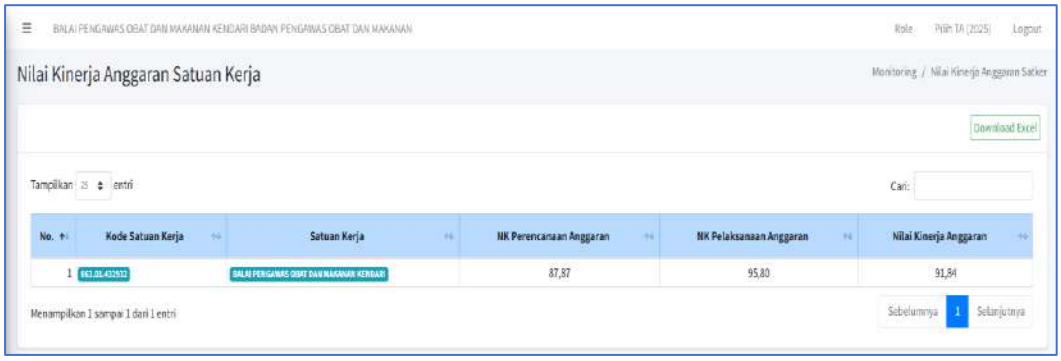

Gambar 62 Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari Tahun 2025 berdasarkan aplikasi e-Monev DJA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(BUN) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Adapun indicator yang digunakan yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satuan Kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai aspek ini terdiri dari Indikator penyerapan anggaran, belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM. Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satuan Kerja dalam pencapaian output sebagaimana yang telah ditetapkan pada DIPA. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai aspek ini yaitu dengan menggunakan capaian output. Nilai IKPA BPOM di Kendari pada Tahun 2025 sebesar 95,80 ditunjukkan sebagai berikut.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	060	063	432932	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	Nilai	100.00	79.31	98.90	100.00	100.00	98.89	96.96	95.80	100%	0.00	95.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.90	19.78	10.00	10.00	9.89	24.24				
					Nilai Aspek	89.66		99.45				96.96				

Gambar 63 Nilai IKPA BPOM di Kendari Tahun 2025

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No.214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari Penyerapan Anggaran,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Konsistensi, Capaian rincian output dan Efisiensi. Nilai EKA BPOM di Kendari pada Tahun 2025 sebesar 87,87 ditunjukkan sebagai berikut.

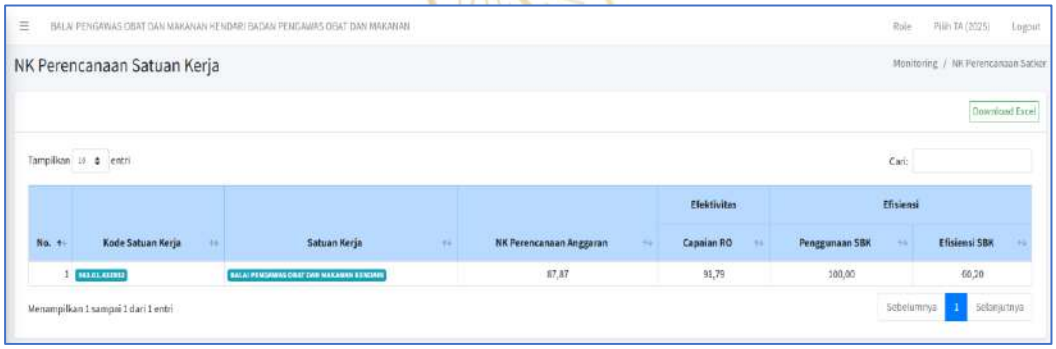

Gambar 64 Nilai EKA BPOM di Kendari Tahun 2025

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

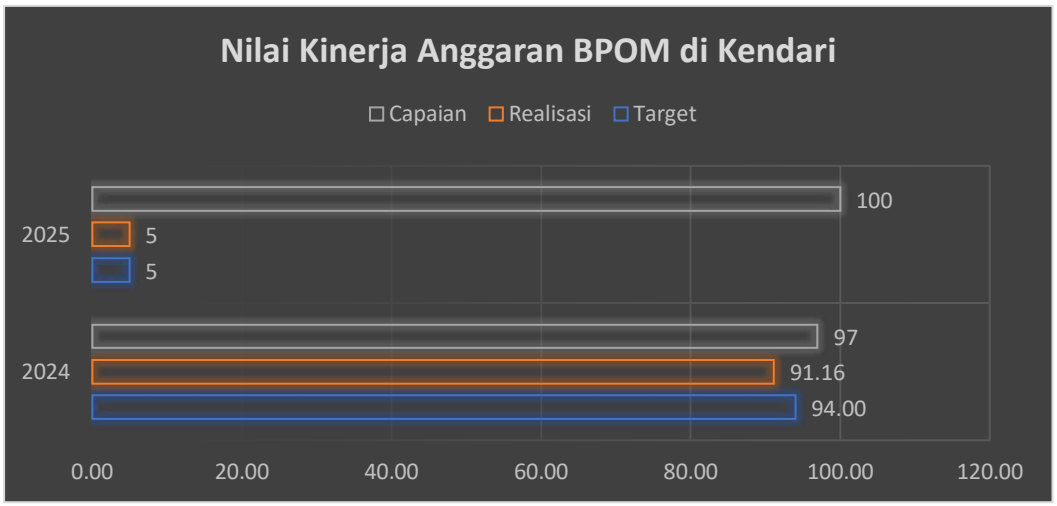

Gambar 65 Nilai Kinerja BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM di Kendari Tahun 2025 sebesar 91,84 (konversi 5) mengalami peningkatan 0,68 poin dibandingkan Tahun 2024 (91,16). Realisasi NKA tersebut mengalami peningkatan pada nilai EKA tetapi mengalami penurunan pada nilai IKPA yang dapat dilihat sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

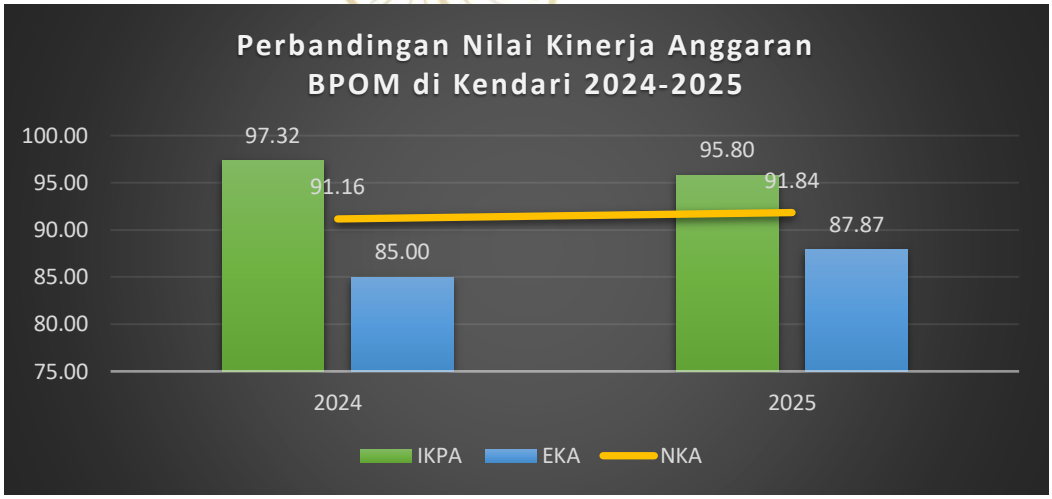

Gambar 66 Detail Capaian NKA BPOM di Kendari Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 87 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dengan Target 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100	Akan Tercapai

Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

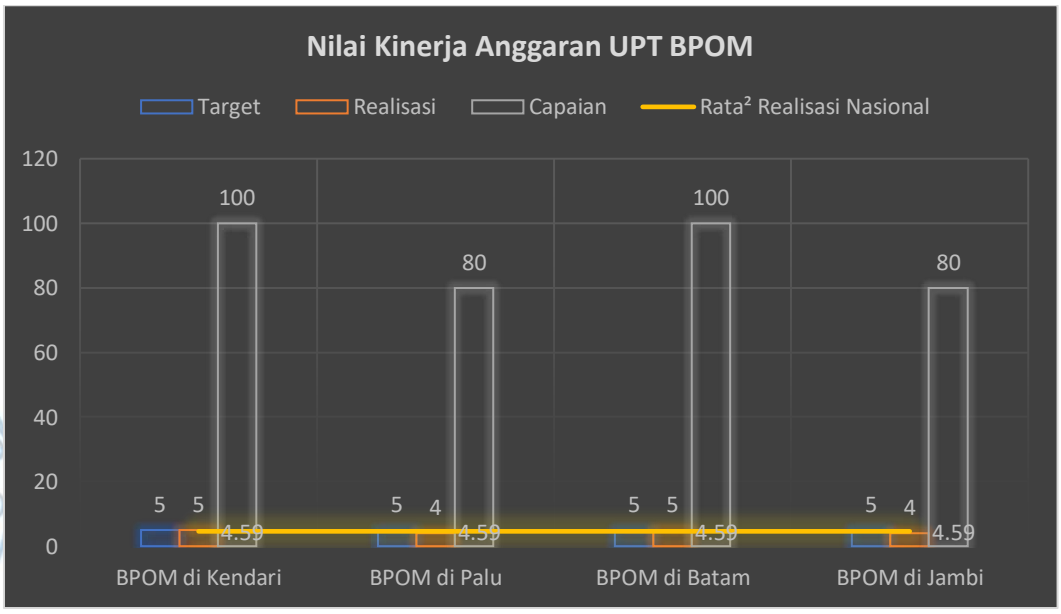

Gambar 67 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dengan Balai setara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada balai yang diperbandingkan, dengan target sama sebesar 5, hanya BPOM di Kendari dan BPOM di Batam yang mencapai targetnya, sedangkan BPOM di Palu dan BPOM di Jambi belum memenuhi targetnya. Hanya BPOM di Kendari dan BPOM di Batam yang realisasi indikator NKA nya berada diatas rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM di Kendari Tahun 2025 sebesar 91,84 (konversi 5) mengalami peningkatan 0,68 poin dibandingkan Tahun 2024 (91,16). Realisasi NKA tersebut mengalami peningkatan pada nilai EKA sebesar +2,85 tetapi mengalami penurunan pada nilai IKPA sebesar -1,52. Penuruan pada nilai IKPA terjadi pada empat komponen, yaitu: 1] Deviasi Halaman III DIPA; 2] Penyerapan Anggaran; 3] Pengelolaan UP dan TUP; dan 4] Capaian Output.

1) Pada Komponen Deviasi Hal III DIPA mendapatkan nilai 79,93; akibat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga menimbulkan GAP yang cukup tinggi dan penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan batas minimal realisasi tiap jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang,dan belanja modal yang diatur dan ditetapkan batas minimal realisasi tiap belanja untuk setiap triwulan anggaran tahun berjalan. BPOM di Kendari perlu melakukan pemutakhiran RPD dan konsistensi dalam pelaksanaan RPD untuk meningkatakan nilai kualitas deviasi Hal III DIPA.
2) Pada Komponen Penyerapan Anggaran mendapatkan nilai 98,90. Hal ini disebabkan karena penyerapan anggaran di Balai POM di Kendari yang belum optimal akibat adanya beberapa kontrak yang tidak dapat dibayarkan pada tahun berjalan akibat kendala pada sistem pembayaran melalui Inaproc dan SAKTI. Sehingga kontrak tersebut dibayarkan pada tahun berikutnya. Adapaun kontrak atau surat pesanan yang tidak dapat dibayarkan pada tahun 2026 sebanyak 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SPM dengan total anggaran sebesar Rp. 99.576.000. Hal ini menyebabkan realisasi anggaran menjadi 99,20%.

3) Pada Komponen Pengelolaan UP dan TUP mendapatkan nilai 98,89. Hal ini disebabkan penurunan nilai pada pertanggungjawaban TUP No.00002/TUP/432932/2025 tanggal 16 Mei 2025 dengan jumlah nilai TUP Rp.141.700.000,00 dengan pengembalian sisa TUP senilai Rp.2.979.000,00 yang seharusnya pengembalian harus di disetorkan ke kas negara paling lambat 30 hari sejak SP2D TUP terbit namun penyetoran sisa TUP disetorkan ke kas negara tanggal 23 Juni 2025 sehingga melewati batas waktu. Keterlambatan tersebut dikarenakan pertangggungjawaban administrasi belum dapat diselesaikan secara tepat waktu.
4) Pada Komponen Capaian Output mendapatkan nilai 96,96. Hal ini disebabkan terdapat satu RO yaitu CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia yang nilai capaian outputnya 0. Pada RO CBV, anggaran yang berupa belanja 53 untuk Pembangunan gedung laboratorium kimia terdampak efisiensi, sehingga sampai akhir tahun 2025 anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,00 terblokir dengan realisasi output 0 paket (gedung). Namun, pada Januari 2025 sebelum adanya kebijakan efisiensi, terdapat realisasi anggaran pada RO CBV sebesar Rp.15.239.522,00 berupa belanja perjalanan dinas pejabat pengadaan dan PPK dalam rangka proses pengadaan gedung. Hal ini menyebabkan blokir anggaran tidak dilakukan sepenuhnya terhadap RO CBV, sehingga pada DIPA masih terdapat target 1 paket gedung dengan anggaran yang telah direalisasikan pada belanja perjalanan dinas pengadaan gedung. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

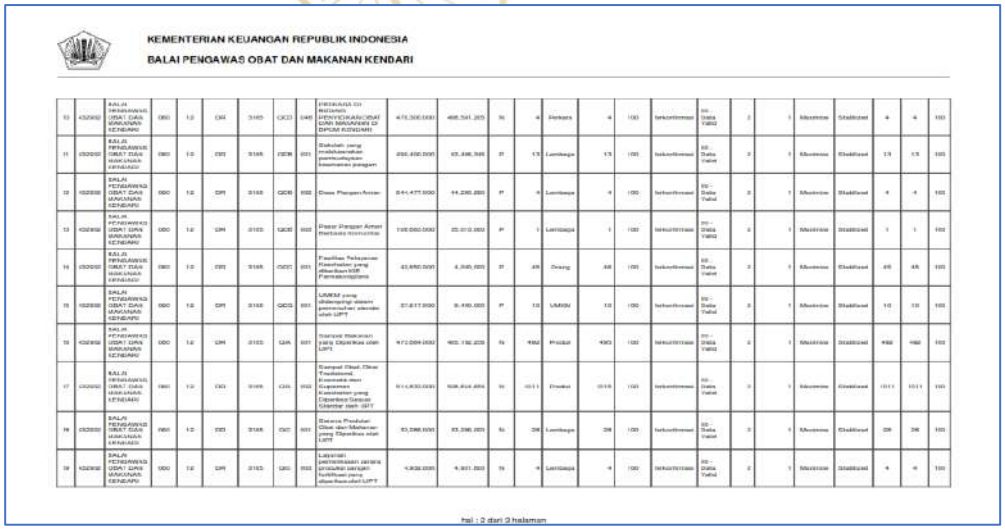

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI

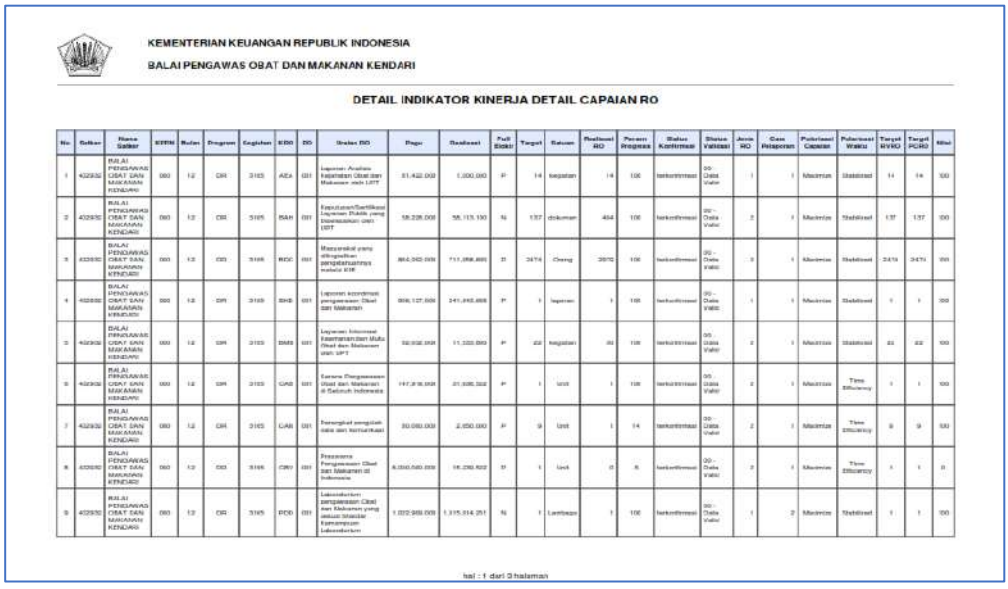

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI

DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

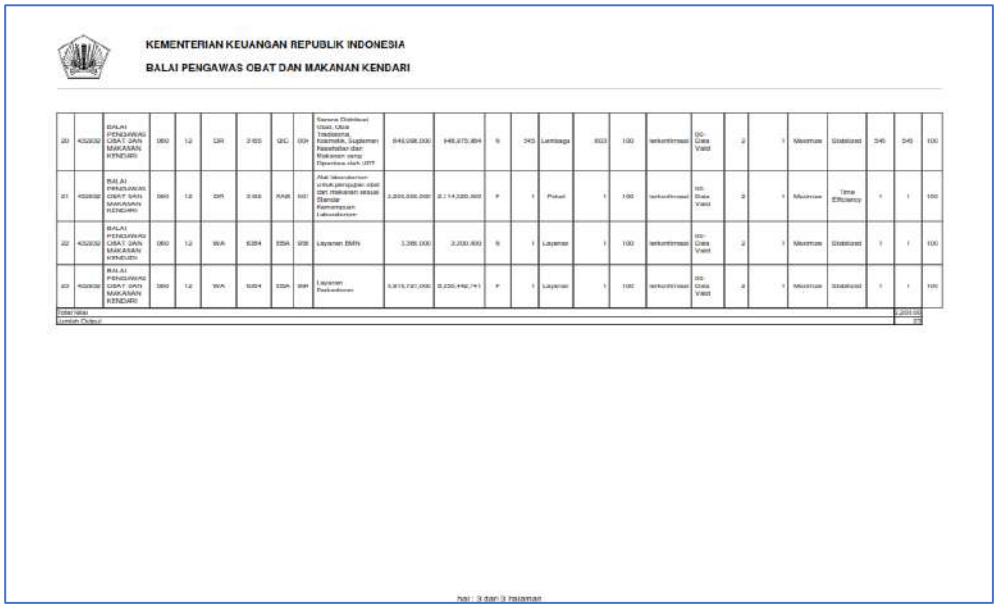

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI

Gambar 68 Detail Kinerja Capaian RO Tahun 2025 BPOM di Kendari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tagging indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada kegiatan RO BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 50%; RO CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia sebesar 50%; RO CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar 50%; RO CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesiasebesar 100%; RO EBA.956 Penatausahaan BMN sebesar 50%; dan RO EBA.994 Layanan Perkantoran sebesar 50%. Realisasi anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator NKA adalah

1) RO BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 99,96% dengan realisasi output sebesar 100%;
2) RO CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia sebesar 98,78% dengan realisasi output sebesar 100%;
3) RO CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar 100% dengan realisasi output sebesar 14%;
4) RO CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia sebesar 99,99% dengan realisasi output sebesar 0,50%;
5) RO EBA.956 Penatausahaan BMN sebesar 94,67% dengan realisasi output sebesar 100%; dan
6) RO EBA.994 Layanan Perkantoran sebesar 98,89% dengan realisasi output sebesar 100%.

Nilai kinerja anggaran BPOM di Kendari Tahun 2025 telah mencapai target. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dengan adanya penurunan nilai IKPA. Beberapa kegiatan yang menjadi rekomendasi perbaikan dalam pencapaian target indikator Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2026 antara lain:

1. Melakukan penyesuaian RPD setelah dilakukan revisi anggaran, sehingga memperkecil deviasi Hal III DIPA dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal.

   Tindak lanjut yang akan dilakukan dengan melakukan penyesuaian anggaran terhadap RPD setiap melakukan revisi DIPA dan dilakukan revisi RPD sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setiap berakhirnya triwulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Konsistensi penyerapan anggaran dengan capaian output secara bulanan sehingga nilai konsistensi dalam optimalisasi nilai EKA tinggi. Tidak lanjut yang dilakukan adalah monev capaian output dan anggaran setiap bulan.

28] Indeks Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori; yaitu: (1) *Risk Naive, (2) Risk Aware, (3) Risk Defined, (4) Risk Managed, dan (5) Risk Enabled.*

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 88 Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko	2,9	2,688	92,69	Baik

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{Skor\ Total}{16}$$

Keterangan:

- ✓ Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- ✓ Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada Tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kendari belum mencapai target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari mengalami penurunan nilai sebesar 1,062 poin dari Tahun 2024. Penurunan indeks tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai POM di Kendari Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	**44,00**	**43,00**	**(1,00)**
Nilai Maturitas	**2,750**	**2,688**	**(0,062)**
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*	*Risk Aware*	

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan table dibawah ini, Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari pada Tahun 2025 jika diperbandingkan dengan target Tahun 2029, diproyeksikan memerlukan upaya untuk pencapaiannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 89 Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan Target 2029

Indikator Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko	3,8	2,688	70,74	Akan Tercapai

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Setara (Cluster 1)

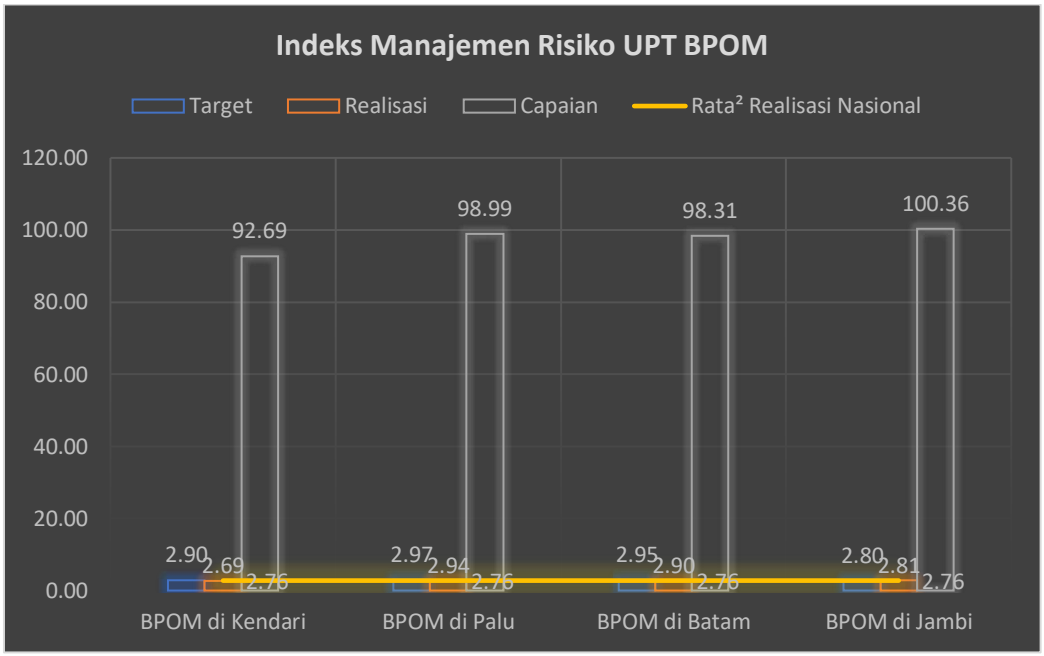

Gambar 69 Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan Balai setara

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Indeks Manajemen Risiko, BPOM di Palu meraih nilai indeks tertinggi mencapai 2,94. Sedangkan balai dengan nilai indeks terendah dicapai oleh BPOM di Kendari sebesar 2,688. Hanya BPOM di Kendari yang realisasi Indeks Manajemen Risiko masih berada dibawah rata-rata realisasi Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

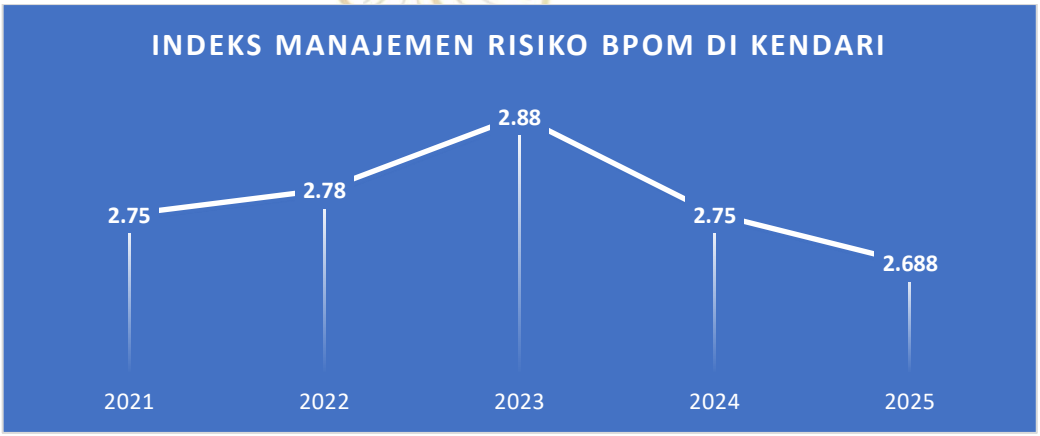

Gambar 70 Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari Tahun 2021-2025

Realisasi Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari mengalami tren fluktuatif selama periode 2021-2025, dan cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan Nota Dinas dari Inspektur Utama Nomor PI.06.07.7.01.26.181 tanggal 15 Januari 2026; beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya penurunan pada Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari adalah:

1) Seluruh pegawai Balai POM di Kendari telah mendapatkan pelatihan manajemen risiko melalui *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS), namun belum terdapat rencana pelatihan secara berkesinambungan dan terjadwal;
2) Pemahaman pegawai mengenai proses pengelolaan manajemen risiko pada Balai POM di Kendari belum seluruhnya memadai, hal tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan secara sampling terhadap pegawai pada saat desk maturitas manajemen risiko seperti belum dapat menjelaskan bagaimana menetapkan kategori risiko;
3) Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan pada dokumen laporan manajemen risiko;
4) Auditor Internal Balai POM di Kendari sebagai lini kedua dalam konsep *Three Lines Model* belum menjalankan fungsinya dalam melaksanakan reviu atas dokumen manajemen risiko Balai POM di Kendari;
5) Belum terdapat informasi terdokumentasi yang menunjukkan bahwa dalam proses identifikasi risiko pada Semester I dan II telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mempertimbangkan isu internal dan eksternal;

6) Belum terdapat eskalasi risiko kepada tingkat yang lebih tinggi atas risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, baik melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal kepada Satuan Kerja Eselon I Pembina;
7) Pada Surat Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BPOM Tahun 2025 terdapat beberapa nama pegawai dari Balai POM di Kendari, nama pegawai yang ada pada SK tersebut belum mendapatkan tanggung jawab dalam proses penentuan, penilaian, dan pengelolaan risiko yang dituangkan dalam uraian tugas pada dokumen SKP;
8) Pejabat Struktural dan Ketua Tim Kerja telah terlibat dalam penyusunan daftar risiko namun belum terdapat data dukung yang menunjukkan bahwa Kepala Balai POM di Kendari selaku pemilik risiko memberikan arahan dan terlibat aktif dalam proses manajemen risiko Balai POM di Kendari.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indeks Manajemen Risiko BPOM di Kendari mengalami penurunan indeks manajemen risiko pada Tahun 2025. Tagging indikator Indeks Manajemen Risiko pada kegiatan RO BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan; namun dikarenakan adanya kebijakan efisiensi, anggaran sub komponen pada RO BKB.001 yang mendukung capaian indikator Nilai AKIP terblokir seluruhnya.

Beberapa kegiatan yang menjadi rekomendasi perbaikan dalam pencapaian target indikator Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2026 antara lain:

a) Melakukan pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko inheren dengan level risiko diatas selera risiko Badan POM;
b) Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai sistem penilaian yang telah ditentukan, diantaranya dengan:
   1. Mereviu kembali penentuan kategori risiko, risk event, sumber

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

risiko, sebab dan akibat/potensi kerugian.

2. Melakukan identifikasi risiko secara spesifik dan mengidentifikais risiko pada progam/kegiatan baru;
3. Mereviu kembali kesesuaian atribut pengendalian dengan aktivitas pengendalian yang dilakukan;
4. Mereviu kembali simpulan efektivitas pengendalian eksisting agar mengambarkan kondisi yang sebenarnya.

c) Melakukan implementasi manajemen risiko secara konsisten sesuai sistem penilaian yang telah ditentukan untuk pelaporan manajemen risiko periode berikutnya diantaranya dengan:
   1) Mereviu kembali respon risiko yang sesuai dengan tindakan mitigasi yang dilakukan;
   2) Melakukan reviu terhadap tindakan mitigasi pada RTP sehingga efektif menurunkan level risiko.

d) Melaporkan kepada pimpinan tinggi madya untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap risiko yang tidak dapat dikelola sendiri oleh unit kerja.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025, telah disusun rekomendasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya. Rencana aksi tersebut dapat disajikan pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 90 Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi triwulanan melampaui 110%, sehingga diproyeksikan realisasi Tahun 2025 akan melampaui target >110%	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Belum	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	Jan-Feb	T	-	-
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	sampai dengan TW III, hanya 5 fasilitas pelayanan kesehatan telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM di Kendari dari 45 fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	Agar Proaktif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigillance agar aktif melaporkan KTE/ESO	Proaktif menindaklanjuti kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigillance agar aktif melaporkan KTE/ESO	Selesai	sd Desember 2025 sebanyak 13 fasilitas pelayanan kesehatan telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM di Kendari dari 45 fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BPOM di Kendari		T	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi triwulanan melampaui 110%, sehingga diproyeksikan realisasi Tahun 2025 akan melampaui target >110%	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Belum	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	Jan-Feb	T	-	-
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi triwulanan melampaui 110%, sehingga diproyeksikan realisasi Tahun 2025 akan melampaui target >110%	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Belum	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	Jan-Feb	T	-	-
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi triwulanan melampaui 110%, sehingga diproyeksikan realisasi Tahun 2025 akan melampaui target >110%	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Belum	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	Jan-Feb	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	T	-	-
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi triwulanan melampaui 110%, sehingga diproyeksikan realisasi Tahun 2025 akan melampaui target >110%	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Dikarenakan tidak bisa menyesuaikan target pada tahun berjalan, diharapkan target disesuaikan apda saat penyusunan PK dan RAPK 2026	Belum	Perlu dilakukan reviu untuk kenaikan target indikator pada Tahun 2026 mengingat capaian sudah melampaui target (>110%), agar penetapan target lebih realistis (tidak terlalu pesimis)	Jan-Feb	T	-	-
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Jumlah desa pangan aman	Realisasi telah mencapai target triwulanan namun belum mencapai target tahunan. Adanya kebijakan efisiensi menyebabkan progres kegiatan dalam intervensi Desa belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan	Koordinasi dengan bagian penganggaran (Sub Bagian Tata Usaha) terkait revisi/pengalokasian anggaran untuk penyelesaian tahapan intervensi Desa	Koordinasi dengan bagian penganggaran (Sub Bagian Tata Usaha) terkait revisi/pengalokasian anggaran untuk penyelesaian tahapan intervensi Desa	Selesai	Telah dilakukan revisi anggaran untuk penyelesaian tahapan intervensi Desa	Jan-Feb	T	-	-
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi melampauii target triwulanan namun belum mencapai target tahunan hal ini dikarenakan terdapat 1 perkara 2024 dan 3 perkara 2025 yang masih belum sampai Tahap II	Penyelesaian perkara Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan Tahap II	Penyelesaian perkara Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan Tahap II	Belum	Tim Penindakan perlu berkoordinasi dengan jaksa, terkait penyelesaian perkara Tahun 2024 dan Tahun 2025	Jan-Feb	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Hasil laporan monitoring dan evaluasi telah digunakan dalam:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;

a. Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat laboratorium sehingga biaya pemeliharaan dan kebutuhan reagensia juga semakin tinggi, sehingga dibutuhkan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan alat laboratorium. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dan pembahasan terkait kesepakatan terkait alur dan timeline pengujian regionalisasi terutama komoditi Obat

b. Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Pada Februari 2025 diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pada DIPA BPOM di Kendari. Adanya kebijakan efisiensi tersebut menyebabkan kegiatan pada RO QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans diblokir sebesar hampir 91% dengan menyisakan Rp.4.000.000,00. RO QDC.001 tersebut mendukung pencapaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Sehingga pada April 2025, dalam upaya pencapaian kegiatan KIE farmakovigilance, maka dilaksanakan KIE farmakovigillance kepada 46 petugas fasilitas pelayanan Kesehatan secara hybrid (*offline* dan *online*) dikarenakan keterbatasan anggaran.

c. Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat laboratorium sehingga biaya pemeliharaan dan kebutuhan reagensia juga semakin tinggi, sehingga anggaran yang capaian output nya telah memenuhi target dilakukan revisi untuk dilakukan optimalisasi anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Pendampingan terhadap UMKM Kosmetik mengalami kendala, dimana telah dilakukan pendampingan denah, tetapi sampai Triwulan III belum ada perbaikan dari pelaku usaha terhadap masukan yang diberikan oleh fasilitator dan PMPU UMKM. Pada Triwulan IV dilakukan perubahan target dari pendampingan UMKM Kometik menjadi UMKM Obat Tradisional yang telah dilaporkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui nota dinas Kepala BPOM di Kendari Nomor PR.06.01.5B.11.25.200.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;

a. Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar diukur sebagai indikator pada Triwulan III. Penambahan indikator ini, menyebabkan penyesuaian anggaran dalam pencapaian kinerjanya. Untuk dapat mencapai target indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pada kegiatan RO RO QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT. Hal ini menyebabkan terdapat penyesuaian pada *cascading* penggunaan anggaran apda RO tersebut.

b. Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman diukur sebagai indikator pada Triwulan III. Penambahan indikator ini, menyebabkan penyesuaian anggaran dalam pencapaian kinerjanya. Untuk dapat mencapai target indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pada kegiatan RO RO QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT.

c. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada RO QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman mengalami penyesuaian pada pencapaian tahapan kegiatan.
d. Jumlah desa pangan aman
   Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada RO QDB.002 Desa Pangan Aman mengalami penyesuaian pada pencapaian tahapan kegiatan.
e. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
   Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada RO QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya mengalami penyesuaian pada pencapaian tahapan kegiatan.
f. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
   Realisasi Tahun 2025 telah mencapai target, namun masih terdapat satu perkara *carryover* 2024 dan dua perkara 2025 yang belum sampai Tahap II. Terhadap hal tersebut diupayakan untuk diselesaikan pada Tahun 2026 dengan penyesuaian anggaran.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja; dan

a. Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; dan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   Sistem regionalisasi laboratorium, memungkinkan BPOM di Kendari untuk menguji sampel dari balai lain dalam regionalnya; maupun sebeliknya. Hal tersebut menimbulkan risiko keterlambatan pengujian maupun pelaporan hasil uji dikarenakan kendala pengiriman dan perbedaan waktu sampling. Oleh sebab itu diperlukan upaya koordinasi aktif dengan regional lab untuk mengurangi dampak risiko yang mengganggu pencapaian indikator kinerja.
b. Perubahan pada peraturan BPOM terntang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sehingga terdapat penmbahan balai dan loka baru didaerah, termasuk BPOM di Baubau; yang semula merupakan Loka POM di Kabupaten Baubau. Namun, perubahan organisai dan tatakerja yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

cepat tidak diimbangi dengan pengadaan infrastruktur laboratorium secara cepat, sehingga menyebabkan UPT yang menjadi Balai tidak dapat melakukan fungsi pengujian sebagaimana mestinya. Perubahan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan target sampling sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BPOM di Baubau seiring meningkatnya status dari Loka menjadi Balai. Hal ini menjadi tantangan bagi BPOM di Kendari selama Tahun 2025 dikarenakan beban sampel yang diuji menjadi bertambah seiring bertambahnya jumlah sampel BPOM di Baubau. Keterbatasan SDM yang dimiliki BPOM di Kendari menjadi kendala dalam pengujian sampel tersebut. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi dengan BPOM di Baubau terkait penyediaan personal penguji dari BPOM di Baubau untuk melakukan pengujian sampelnya sehingga dapat selesai tepat waktu dan tidak membebani personal pengujian BPOM di Kendari.

c. Kegiatan Pro PN Desa Pangan Aman, Sekolah dengan PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas yang diinisiasi oleh BPOM untuk menjadi percontohan atau kegiatan yang dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah dalam pemenuhan implementasi keamanan pangan

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Pada beberapa indikator, penetapan target kinerja terlalu pesimis sehingga capaian pada Tahun 2025 menjadi tidak dapat disimpulkan (>110%). Sehingga BPOM di Kendari perlu menyesuaikan target kinerja pada periode mendatang. Indikator tersebut yaitu:

a. Indikator Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
a. Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
b. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
c. Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
d. Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
e. Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; dan

f. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Anggaran Balai POM di Kendari bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432932/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp.23.993.072.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah). Pada Triwulan III dilakukan revisi belanja pegawai (Belanja 51) antar satker di lingkup BPOM sehingga anggaran BPOM di Kendari menjadi sebesar Rp.23.732.896.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Sampai dengan akhir periode Tahun 2025 masih terdapat kebijakan efisiensi dari periode Februari 2025; sehingga Pagu diblokir menjadi sebesar Rp.14.862.040.000,00. Pada Tahun 2025 Balai POM di Kendari melakukan Revisi terhadap DIPA TA 2025 yaitu:

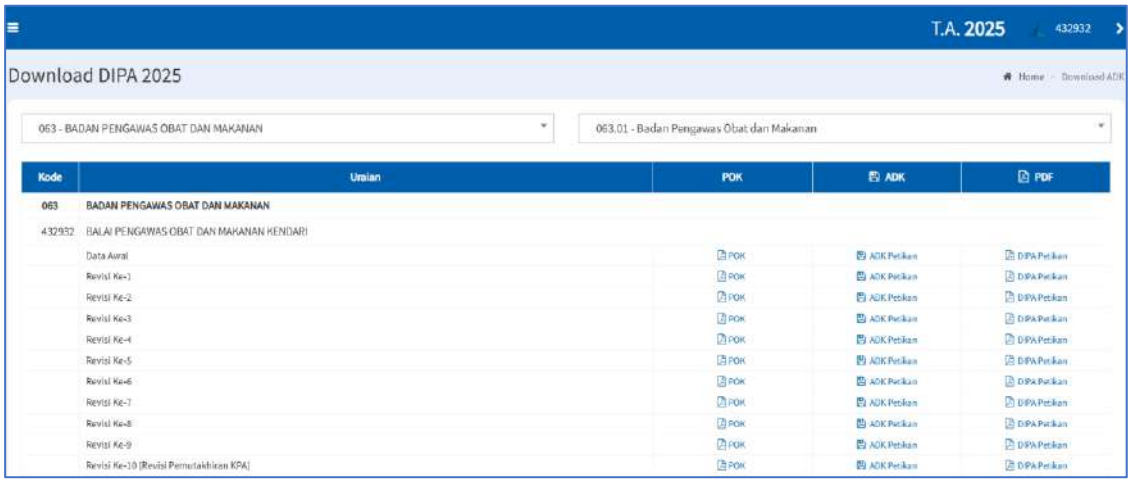

Gambar 71 Revisi DIPA dan POK Tahun 2025

Adapun rincian realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2025 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

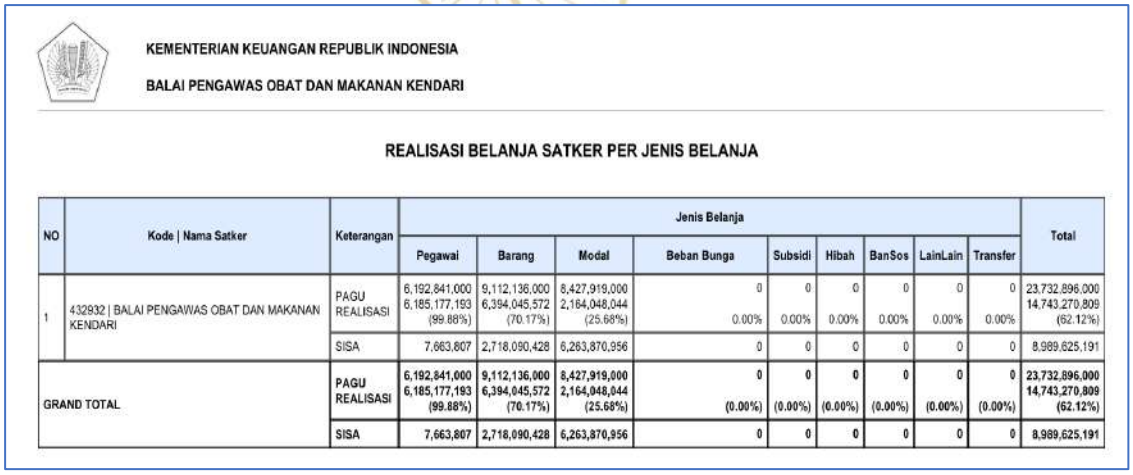

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432932 | BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	PAGU	6,192,841,000	9,112,136,000	8,427,919,000	0	0	0	0	0	0	23,732,896,000
		REALISASI	6,185,177,193 (99.88%)	6,394,045,572 (70.17%)	2,164,048,044 (25.68%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,743,270,809 (62.12%)
		SISA	7,663,807	2,718,090,428	6,263,870,956	0	0	0	0	0	0	8,989,625,191
GRAND TOTAL		PAGU	6,192,841,000	9,112,136,000	8,427,919,000	0	0	0	0	0	0	23,732,896,000
		REALISASI	6,185,177,193 (99.88%)	6,394,045,572 (70.17%)	2,164,048,044 (25.68%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	14,743,270,809 (62.12%)
		SISA	7,663,807	2,718,090,428	6,263,870,956	0	0	0	0	0	0	8,989,625,191

Gambar 72 Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada aplikasi spanint.kemenkeu



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output;

Periode Desember 2025

Kementerian : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Satuan Kerja : 432932 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	14,862,040,000	0	13,551,328,449	1,192,977,360	14,744,305,809	99.21 %	117,734,191
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan	6,515,064,000	0	5,987,568,937	502,434,131	6,490,003,068	99.62 %	25,060,932
DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,515,064,000	0	5,987,568,937	502,434,131	6,490,003,068	99.62 %	25,060,932
AEA Koordinasi	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
BAH Pelayanan Publik Lainnya	58,228,000	0	12,457,500	45,655,600	58,113,100	99.80 %	114,900
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	712,561,000	0	606,157,365	105,801,325	711,958,690	99.92 %	602,310
BKB Pemantauan produk	241,750,000	0	223,960,699	17,683,000	241,643,699	99.96 %	106,301
BMB Komunikasi Publik	11,720,000	0	4,583,300	6,950,500	11,533,800	98.41 %	186,200
CAB Sarana Bidang Kesehatan	32,028,000	0	31,638,522	0	31,638,522	98.78 %	389,478
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,650,000	0	2,650,000	0	2,650,000	100.00	0
CBV Prasarana Bidang Kesehatan	15,241,000	0	15,239,522	0	15,239,522	99.99 %	1,478
PDD Standarisasi Lembaga	1,022,909,000	0	929,310,096	86,604,155	1,015,914,251	99.32 %	6,994,749
QCD Perkara Hukum Badan Usaha	470,300,000	0	428,471,605	40,119,600	468,591,205	99.64 %	1,708,795
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	142,894,000	0	137,244,605	5,525,000	142,769,605	99.91 %	124,395
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	9,430,000	0	5,540,000	3,890,000	9,430,000	100.00	0
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	988,517,000	0	894,950,416	78,856,474	973,806,890	98.51 %	14,710,110
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	687,316,000	0	575,845,307	111,348,477	687,193,784	99.98 %	122,216
RAB Sarana Bidang Kesehatan	2,114,520,000	0	2,114,520,000	0	2,114,520,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	8,346,976,000	0	7,563,759,512	690,543,229	8,254,302,741	98.89 %	92,673,259
WA.6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	8,346,976,000	0	7,563,759,512	690,543,229	8,254,302,741	98.89 %	92,673,259
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,346,976,000	0	7,563,759,512	690,543,229	8,254,302,741	98.89 %	92,673,259

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Gambar 73 Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI

Upaya yang telah dilakukan BPOM di Kendari dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah peningkatan komitmen semua pihak mulai dari pimpinan, pengelola anggaran, penanggung jawab kegiatan dan seluruh pegawai BPOM di Kendari untuk konsisten terhadap RPD yang telah disusun. Identifikasi kegiatan yang berpotensi tidak dilaksanakan akan dilakukan revisi ke kegiatan lainnya dan pemanfaatan evaluasi anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bulanan sebagai bahan perbaikan.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan.Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika **IE>SE**, maka kegiatan dianggap **efisien**

Jika **IE<SE**, maka kegiatan dianggap **tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisien (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisien/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Kendari diukur pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 91 Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2025

KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Revisi				Pagu Efisiensi (PAGU Akhir)			
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi
AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	100.00	1.23	81.42	80.42	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien
BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)	338.69	99.80	3.39	2.39	Efisien	99.80	3.39	2.39	Efisien
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	120.41	82.38	1.46	0.46	Efisien	99.92	1.21	0.21	Efisien
BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	100.00	26.67	3.75	2.75	Efisien	99.96	1.00	0.00	Efisien
BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	136.36	14.06	9.70	8.70	Efisien	98.41	1.39	0.39	Efisien
CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	100.00	21.39	4.68	3.68	Efisien	98.78	1.01	0.01	Efisien
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	14.00	3.31	4.23	3.23	Efisien	100.00	0.14	-0.86	Tidak Efisien
CBV Prasarana Bidang Kesehatan	001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0.50	0.25	1.97	0.97	Efisien	99.99	0.01	-0.99	Tidak Efisien
PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	100.00	99.32	1.01	0.01	Efisien	99.32	1.01	0.01	Efisien
QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)	100.00	99.64	1.00	0.00	Efisien	99.64	1.00	0.00	Efisien
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	100.00	12.94	7.73	6.73	Efisien	99.97	1.00	0.00	Efisien
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	100.00	8.13	12.29	11.29	Efisien	99.79	1.00	0.00	Efisien
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	100.00	32.22	3.10	2.10	Efisien	99.96	1.00	0.00	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Revisi				Pagu Efisiensi (PAGU Akhir)			
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	102.22	9.38	10.90	9.90	Efisien	100.00	1.02	0.02	Efisien
QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	100.00	25.07	3.99	2.99	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)	100.61	98.20	1.02	0.02	Efisien	98.20	1.02	0.02	Efisien
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)	100.40	98.80	1.02	0.02	Efisien	98.80	1.02	0.02	Efisien
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	100.00	100.00	1.00	0.00	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	003 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (Sarana)	100.00	100.00	1.00	0.00	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	110.64	99.98	1.11	0.11	Efisien	99.98	1.11	0.11	Efisien
RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	100.00	96.11	1.04	0.04	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien
6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	956 Layanan BMN (layanan)	100.00	94.67	1.06	0.06	Efisien	94.67	1.06	0.06	Efisien
6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	994 Layanan Perkantoran (layanan)	100.00	92.54	1.08	0.08	Efisien	98.89	1.01	0.01	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada Tahun 2025 BPOM di Kendari melaksanakan 23 (dua puluh tiga) kegiatan utama (KRO) untuk mendukung pencapaian 8 sasaran kegiatan. Dua puluh satu RO menunjukkan penggunaan sumberdaya yang efisien; dan dua RO menunjukkan penggunaan sumerdaya tidak efisien. Progres Capaian Rincian Output (PCRO) berkisar antara 0,50-338,69% dengan input anggaran sebesar 94,67-100%; yang menunjukkan bahwa BPOM di Kendari telah melakukan pengawalan atas pencapaian target RO pada Tahun 2025.

Dua kegiatan yang menunjukkan tidak efisien adalah RO CAN.001 001 Perangkat pengolah data dan komunikasi; dan RO CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Pada Rincian Output (RO) CAN.001 001 Perangkat pengolah data dan komunikasi; realisasi output perangkat pengolah data yang telah selesai diadakan oleh BPOM di Kendari sebanyak 1 (satu) unit printer label BMN (14%) dari target 9 (sembilan) unit alat pengolah data. Sedangkan pada RO CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia; realisasi output sarana gedung yang telah selesai diadakan oleh BPOM di Kendari sebanyak 0 (nol) unit gedung laboratorium (0%) dari target 1 gedung laboratorium. Pada kedua RO tersebut (CAN dan CBV) terdampak kebijakan blokir dari Februari 2025 sampai akhir periode anggaran 31 Desember 2025; sehingga BPOM di Kendari tidak dapat melakukan proses pengadaan.

ANALISIS HUBUNGAN BIAYA DENGAN CAPAIAN PER SASARAN KEGIATAN

Nilai efisiensi sasaran kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 92 Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan

No	Tingkat Efisiensi		Capaian
1.	< 0		Tidak Efisien
2.	0 – 0,20	100%	Efisien
3.	0,21 – 0,40	95%	Efisien
4.	0,41 – 0,60	92%	Efisien
5.	0,61 – 0,80	90%	Efisien
6.	0,81 – 1,00	88%	Efisien
7.	1,01 – 1,20	86%	Tidak Efisien
8.	1,21 – 1,40	84%	Tidak Efisien
9.	1,41 – 1,60	80%	Tidak Efisien
10.	1,61 – 1,80	78%	Tidak Efisien
11.	> 1,81	75%	Tidak Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil pengukuran Tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Kendari selama Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 93 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan pada Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	CAPAIAN SASARAN	CAPAIAN ANGGARAN (vs PAGU REVISI)*				CAPAIAN ANGGARAN (vs PAGU EFISIENSI)			
				Capaian Anggaran	IE	TE=1-IE	Kriteria	Capaian Anggaran	IE	TE=1-IE	Kriteria
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	110.79	88.73	1.25	0.25	Efisien	94.95	1.17	0.17	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	CAPAIAN SASARAN	CAPAIAN ANGGARAN (vs PAGU REVISI)*				CAPAIAN ANGGARAN (vs PAGU EFISIENSI)			
				Capaian Anggaran	IE	TE=1-IE	Kriteria	Capaian Anggaran	IE	TE=1-IE	Kriteria
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar									
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT									
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium									
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman									
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100.00	1	0.00	Efisien	100.00	1	0.00	Efisien
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100.56	32.44	3.10	2.10	Tidak Efisien	99.90	1.01	0.01	Efisien
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan									
		Jumlah desa pangan aman									
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas									
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	25.07	3.99	2.99	Tidak Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	116.96	99.64	1.17	0.17	Efisien	99.64	1.17	0.17	Efisien
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	105.80	1.23	86.14	85.14	Tidak Efisien	100.00	1.06	0.06	Efisien
SK7	Layanan Publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	105.65	99.80	1.06	0.06	Efisien	99.80	1.06	0.06	Efisien
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	97.04	62.14	1.56	0.56	Efisien	98.92	0.98	-0.02	Tidak Efisien
		Nilai AKIP									
		Nilai Kinerja Anggaran									
		Indeks Manajemen Risiko									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa baik jika dibandingkan dengan realisasi berdasarkan Pagu Revisi (anggaran blokir karena efisiensi dihitung belum realisasi), serapan anggaran pada lima sasaran menunjukkan efisien, dan tiga sasaran tidak efisien. Sedangkan dengan perhitungan Pagu Efisiensi (Pagu akhir Tahun 2025) sebanyak tujuh sasaran menunjukkan efisien, dan satu sasaran tidak efisien.

Sasaran kegiatan yang menunjukkan tidak efisien yaitu pada sasaran kedelapan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Sasaran ini terdiri dari empat indikator yaitu 1] Nilai Pembangunan ZI; 2] Nilai AKIP; 3] Nilai Kinerja Anggaran; dan 4] Indeks Manajemen Risiko. Pencapaian sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal didukung oleh kegiatan pada KRO BKB.001; CAB.001; CAN.001; CBV.001; EBA.956; dan EBA.994 dimana anggaran pada RO tersebut terdampak kebijakan efisiensi yang signifikan sampai akhir tahun, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, faktor yang mempengaruhi ketidakefisienan adalah pencapaian sasaran yang belum memenuhi target. Tiga dari empat indikator pembentuk sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal; belum mencapai targetnya.

Pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Kendari pada Tahun 2025 diukur dengan 8 sasaran dan 28 indikator indikator. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi; antara -0,02 sampai 0,17. Analisa pemanfaatan sumber daya anggaran terhadap tingkat efisiensi per sasaran kegiatan yang dapat diukur pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran 1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;**

   Pagu akhir anggaran sasaran Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar Rp.4.812.330.000,00; dengan realisasi sebesar Rp.4.790.503.125,00 atau sebesar 94,95%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 15 indikator pembentuknya; penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah “Efisien”. Anggaran pada sasaran pertama terdiri dari akun anggaran pada RO 1] PDD Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice; 2] QDC Sarana Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans, 3] QIA Sampel Makanan, Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar, 4] QIC Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT; dan 5] RAB Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice. Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2025 adalah optimalisasi anggaran yang dilaksanakan dalam pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pengadaan reagen untuk pengujian sampel. Selain itu BPOM di Kendari telah melaksanakan KIE farmakovigilans kepada petugas layanan kesehatan secara hybrid dalam rangka efisiensi anggaran. Realisasi anggaran yang optimal juga bersumber dari belanja modal RO RAB berupa pengadaan Alat Laboratorium HPLC, Microwave dan BSC.

2. **Sasaran 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi;**

   Pagu akhir anggaran sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebesar 4.932.000,00; dengan realisasi sebesar Rp. 4.931.000,00 atau 100%. Indikator pembentuk sasaran ini adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan anggaran berasal dari RO QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT. Pada Tahun 2025 serapan anggaran pada RO ini berupa terlaksananya pemeriksaan empat sarana produksi pangan fortifikasi di Sulawesi Tenggara. Penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua “Efisien”.

3. **Sasaran 3: Meningkatnya efektivitas KIE;**

   Pagu akhir anggaran sasaran Meningkatnya efektivitas KIE sebesar Rp.867.175.000,00; dengan realisasi sebesar Rp.866.262.095,00 atau 99,90%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi empat indikator pembentuknya; penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah “Efisien”. Anggaran pada sasaran keempat terdiri dari akun anggaran pada RO BDC, BMB, QDB-001, QDB-002, dan QDB-003. Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2025 dalam optimalisasi anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

adalah pelaksanaan kegiatan KIE rutin; KIE tomas; serta intervensi sekolah, desa dan pasar pangan aman.

4. **Sasaran 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;**

   Pagu akhir anggaran sasaran Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sebesar Rp.9.430.000,00; dengan realisasi sebesar Rp.9.430.000.000,00 atau 100%. Indikator pembentuk sasaran keempat adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan anggaran berasal dari RO QDG UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT. Realisasi anggapan pada Tahun 2025 menunjukkan “Efisien”; bersumber dari telah dilaksanakannya pendampingan dan fasilitasi UMKM.

5. **Sasaran 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif;**

   Pagu akhir anggaran sasaran Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif sebesar Rp.470.300.000,00; dengan realisasi sebesar Rp.468.591.205,00 atau 99,64%. Indikator pembentuk sasaran ini adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan anggaran berasal dari RO QCD U46 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT. Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2025 dalam optimalisasi anggaran adalah pelaksanaan operasi intelijen, operasi penindakan dan pemberkasan perkara. Serapan anggaran sebesar 99,64% sejalan dengan tahapan penyelesaian perkara sehingga notifikasi serapan “Efisien”.

6. **Sasaran 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif;**

   Pagu akhir anggaran sasaran Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif sebesar Rp.1.000.000,00; dengan realisasi Rp.1.000.000,00 atau 100%. Indikator pembentuk sasaran keenam Adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan anggaran berasal dari RO AEA Laporan Analisis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT. Realisasi output kegiatan berupa Pelaporan Analisis Penelusuran Siber yang rutin disampaikan setiap bulan melalui aplikasi pelaporan siber. Anggaran pada RO AEA yang terdampak blokir merupakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi penyidik yang jadwanya terpadu dari pusat. Serapan anggaran sebesar 100% sejalan dengan capaian indikator sebesar 105,80% sehingga notifikasi serapan “Efisien”.

7. **Sasaran 7: Layanan Publik yang prima;**

   Pagu akhir anggaran sasaran Layanan Publik yang prima sebesar sebesar Rp.58.228.000,00; dengan realisasi Rp.58.113.100,00 atau 99,80%. Indikator pembentuk sasaran ini adalah Indeks Pelayanan Publik dengan anggaran berasal dari RO BAH dan BMB. Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2025 dalam optimalisasi anggaran adalah pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi dan pelaksanaan pengujian sampel pihak ketiga. Serapan anggaran sebesar 99,80% sejalan dengan capaian indikator sebesar 105,65% sehingga notifikasi serapan “Efisien”.

8. **Sasaran 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal;**

   Pagu akhir anggaran sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal sebesar Rp.8.638.645.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.545.474.484,00 atau 98,92%. Pembentuk sasaran ini terdiri dari empat indikator dengan dukungan anggaran berasal dari KRO BKB.001; CAB.001; CAN.001; CBV.001; EBA.956; dan EBA.994. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, kegiatan pemenuhan sarana kantor, serta untuk kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

   Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi empat indikator pembentuknya; penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedelapan adalah “Tidak Efisien”. Anggaran pada sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal terdampak kebijakan efisiensi yang signifikan sampai akhir tahun; sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, faktor yang mempengaruhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketidakefisienan adalah pencapaian sasaran yang belum memenuhi target. Tiga dari empat indikator pembentuk sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal; belum mencapai targetnya. Serapan anggaran sebesar 98,92% tidak sebanding dengan capaian sasaran sebesar 97,04% sehingga menjadi Tidak Efisien.

Pada Tahun 2025 BPOM di Kendari melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung efisiensi penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Anggaran melalui Efisiensi Anggaran;**

   BPOM di Kendari turut mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden dengan melakukan blokir pada beberapa akun perjalanan, memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran, meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder, dan optimalisasi dalam mendukung peningkatan kinerja.

2. **Optimalisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;**

   BPOM di Kendari telah melakukan langkah strategis dengan melaksanakan proses pengadaan secara cepat. Beberapa pengadaan seperti perangkat pengolah data dan komunikasi telah diselesaikan pada Triwulan I. Selain itu proses pengadaan alat laboratorium berupa HPLC, Microwave dan BSC juga telah dilaksanakan pada Triwulan II. Sehingga pada Triwulan III proses pengadaan untuk RO RAB telah selesai dilaksanakan. Namun, pada dua KRO yaitu CAB dan KRO CBV; pagu KRO terdampak efisiensi sehingga anggaran diblokir seluruhnya, dan kegiatan pengadaan tidak dapat dilaksanakan

3. **Optimalisasi Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Melalui *Zoom Meeting;***

   BPOM di Kendari telah melakukan upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan maupun diseminasi dalam rangka peningkatan kinerja yang dilakukan secara berkala melalui zoom meeting. Beberapa kegiatan KIE termasuk KIE Farmakovigillance dilaksanakan secara *hybrid* untuk memaksimalkan pencapaian output dengan keterbatasan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. **Optimalisasi Peningkatan Kompetensi bagi ASN BPOM di Kendari secara daring melalui IDEAS (*Integrated development and Training Information System*) BPOM;**

   BPOM di Kendari berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme ASN, melalui pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. BPOM di Kendari telah memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran berkelanjutan melalui IDEAS (*Integrated development and Training Information System*) BPOM sebagai platform pembelajaran online terintegrasi sebagai salah satu media pembelajaran mandiri sehingga mendukung pegawai belajar kapanpun dan dimanapun dengan data hasil pembelajaran tercatat sebagai capaian pembelajaran. Hal ini juga dilaksanakan dalam rangka dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

5. **Sinergi Kegiatan dengan Lintas Sektor di Sulawesi Tenggara;**

   Pelibatan secara aktif dengan stakeholder pada beberapa pihak sebagai komitmen implementasi kerjasama dijadikan sebagai salah satu upaya untuk efisiensi dan alternatif solusi dalam keterbatasan anggaran yang dikelola oleh BPOM di Kendari.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian pada sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 96,03% dengan kriteria **Baik**;
2. Capaian pada sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” sebesar 90,00% dengan kriteria **Cukup**;
3. Capaian pada sasaran kegiatan ketiga “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” sebesar 90,50% dengan kriteria **Baik**;
4. Capaian pada sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan 90% dengan kriteria **Cukup**;
5. Capaian pada sasaran kegiatan kelima “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 99% dengan kriteria **Baik**;
6. Capaian indikator pada sasaran kegatan keenam “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 95,22% dengan kriteria **Baik**;
7. Capaian pada sasaran kegiatan ketujuh “Layanan Publik yang prima” sebesar 95,09% dengan kriteria **Baik**; dan
8. Capaian pada sasaran kegiatan kedelapan “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” sebesar 86,45% dengan kriteria **Cukup.**

Realisasi terhadap 28 indikator BPOM di Kendari Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Sebanyak sembilan indikator bernotifikasi abu-abu dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** (capaian >110%)
2. Sebanyak lima Indikator bernotifikasi biru dengan kriteria **Sangat Baik** (dengan capaian 100% < x ≤ 110%);
3. Sebanyak empat belas Indikator bernotifikasi hijau dengan kriteria **Baik** (dengan capaian 90% < x ≤ 100%);

Persentase capaian target indikator kinerja BPOM di Kendari pada Tahun 2025 antara 92,69% sampai dengan 110%. Capaian indikator kinerja paling rendah pada indikator Indeks Manajemen Risiko 92,69%, namun masih dalam kategori “Baik”. Belum tercapainya indikator ini sesuai target dikarenakan terjadi penurunan indeks berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat; sehingga target Tahun 2025 tidak tercapai.

Pada Tahun 2025; Progres Capaian Rincian Output (PCRO) berkisar antara 0,50-338,69% dengan input anggaran sebesar 94,67-100%; yang menunjukkan bahwa BPOM di Kendari telah melakukan pengawalan atas pencapaian target RO. Pada Rincian Output (RO) BAH Pelayanan Publik Lainnya; realisasi output Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BPOM di Kendari mencapai 464 keputusan; melampaui targetnya sebesar 137 keputusan (338,69%). Dua kegiatan RO yang menunjukkan tidak efisien adalah RO CAN.001 001 Perangkat pengolah data dan komunikasi; dan RO CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Kedua RO tersebut (CAN dan CBV) terdampak kebijakan blokir dari Februari 2025 sampai akhir periode anggaran 31 Desember 2025; sehingga BPOM di Kendari tidak dapat melakukan proses pengadaan.

Pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Kendari pada Tahun 2025 diukur dengan 8 sasaran dan 28 indikator indikator. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi; antara -0,02 sampai 0,17. Sasaran kegiatan yang menunjukkan tidak efisien yaitu pada sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Sasaran ini didukung oleh kegiatan pada KRO BKB.001; CAB.001; CAN.001; CBV.001; EBA.956; dan EBA.994; dimana anggaran pada RO tersebut terdampak kebijakan efisiensi yang signifikan pada Tahun 2025, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, tiga dari empat indikator pembentuk sasaran ini belum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mencapai targetnya.

BPOM di Kendari secara terus menerus melakukan perbaikan kinerja, sehingga diharapkan terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai BPOM di Kendari untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang ditelah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

4.2 SARAN

Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dan capaian kinerja Tahun 2025 agar digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang. Hasil evaluasi Tahun 2025 agar ditindaklanjuti khususnya terhadap indikator yang belum mencapai target; dan mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja terhadap target yang telah tercapai.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan BPOM di Kendari antara lain:

1. Melakukan upaya perbaikan terhadap indikator kinerja yang belum memenuhi target, yaitu indikator 1] Nilai Pembangunan ZI; 2] Nilai AKIP; dan 3] Indeks Manajemen Risiko;
2. Melakukan reviu terhadap indikator yang targetnya terlalu pesimis, yang menyebabkan capaian menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Sehingga pada periode mendatang diharapkan target yang disusun dan direncanakan relevan dengan mempertimbangkan upaya dan sumberdaya yang dimiliki BPOM di Kendari;
3. Meningkatkan akurasi dan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja yang sudah ada;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Kinerja dan anggaran secara berkala, menindaklanjuti rekomendasi perbaikian kinerja periode sebelumnya serta melakukan reviu target kinerja.

.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM di Kendari Tahun 2025



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93232
Telp : (0401) 3195855; Fax : (0401) 3195513;
Email: bpom_kendari@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

NOMOR HK.02.02.6B.09.24.80 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tentang Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI



RIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

NOMOR HK.02.02.6B.09.24.80 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,50
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Kendari	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	99,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	13 (100%)
		Jumlah desa pangan aman	4 (100%)
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 (100%)
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	efektif di wilayah kerja Balai POM di Kendari		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai POM di Kendari	14
10	Layanan Publik Balai POM di Kendari yang prima	Indeks Pelayanan Publik	4,65
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI	91,00
		Nilai AKIP	80,01
		Nilai Kinerja Anggaran	90,00
		Indeks Manajemen Risiko	3,20

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KENDARI



RIYANTO

Lampiran 2
Perjanjian Kinerja (PK) Awal BPOM di Kendari Tahun 2025



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIYANTO
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RIYANTO	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.6 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	89 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 23,993,072,000 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	14,462,063,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,531,009,000

Kendari, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

RIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran 3

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Awal BPOM di Kendari Tahun 2025

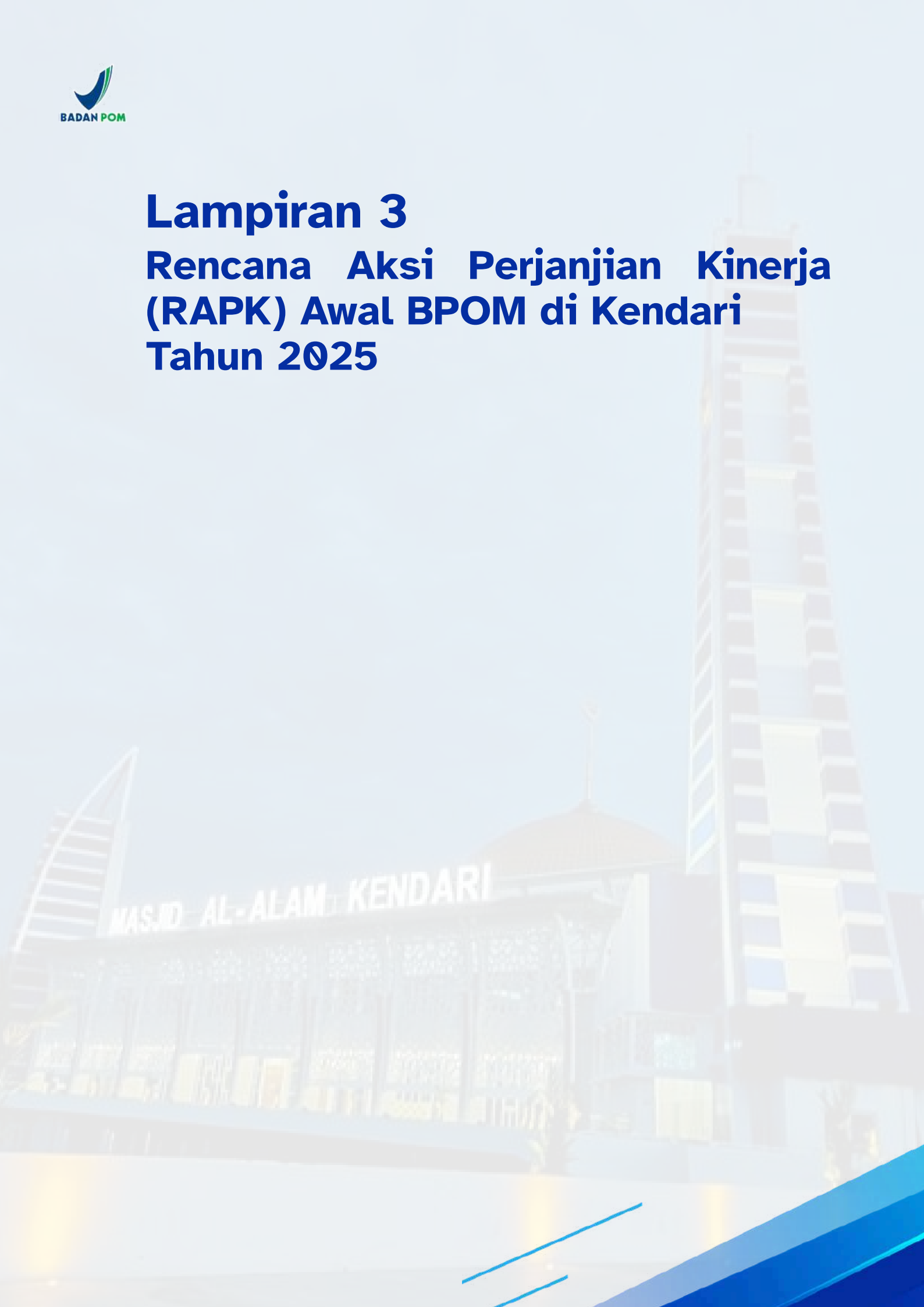

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	608,783,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	42,650,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	432,417,440
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,751,840

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	38,014,720
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	39,330,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10,006,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	23,280,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	472,971,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	157,657,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	16,460,000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	4,932,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			71	71	71	72	72	72	73	73	73	74.5	9,349,116,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	223,852,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan	5	20	30	55	55	55	55	61.67	80	80	100	13	496,550,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pembudayaan keamanan pangan													
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	5	5	25	40	55	65	70	75	85	100	4	642,210,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	25	55	55	65	65	75	90	90	100	1	139,363,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	20	25	35	40	45	55	60	65	70	80	37,617,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	20	30	35	40	50	50	60	70	80	80	80	488,520,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	100,422,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	diselesaikan sesuai standar													
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.6	115,160,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												89	5,241,424,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												81	33,760,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,241,424,500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	32,400,000
														Total	23,993,072,000

Kendari, 12 February 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari



RIYANTO

Lampiran 4
Perjanjian Kinerja (PK) Revisi BPOM di Kendari Tahun 2025



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANDI AMIRAH NILAWATI
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 01 October 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
ANDI AMIRAH NILAWATI	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.77 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	9.09 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17.54 %
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.6 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	89 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 23,732,896,000 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	14,812,789,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	8,920,107,000

Kendari, 01 October 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

ANDI AMIRAH NILAWATI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 5

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi BPOM di Kendari Tahun 2025

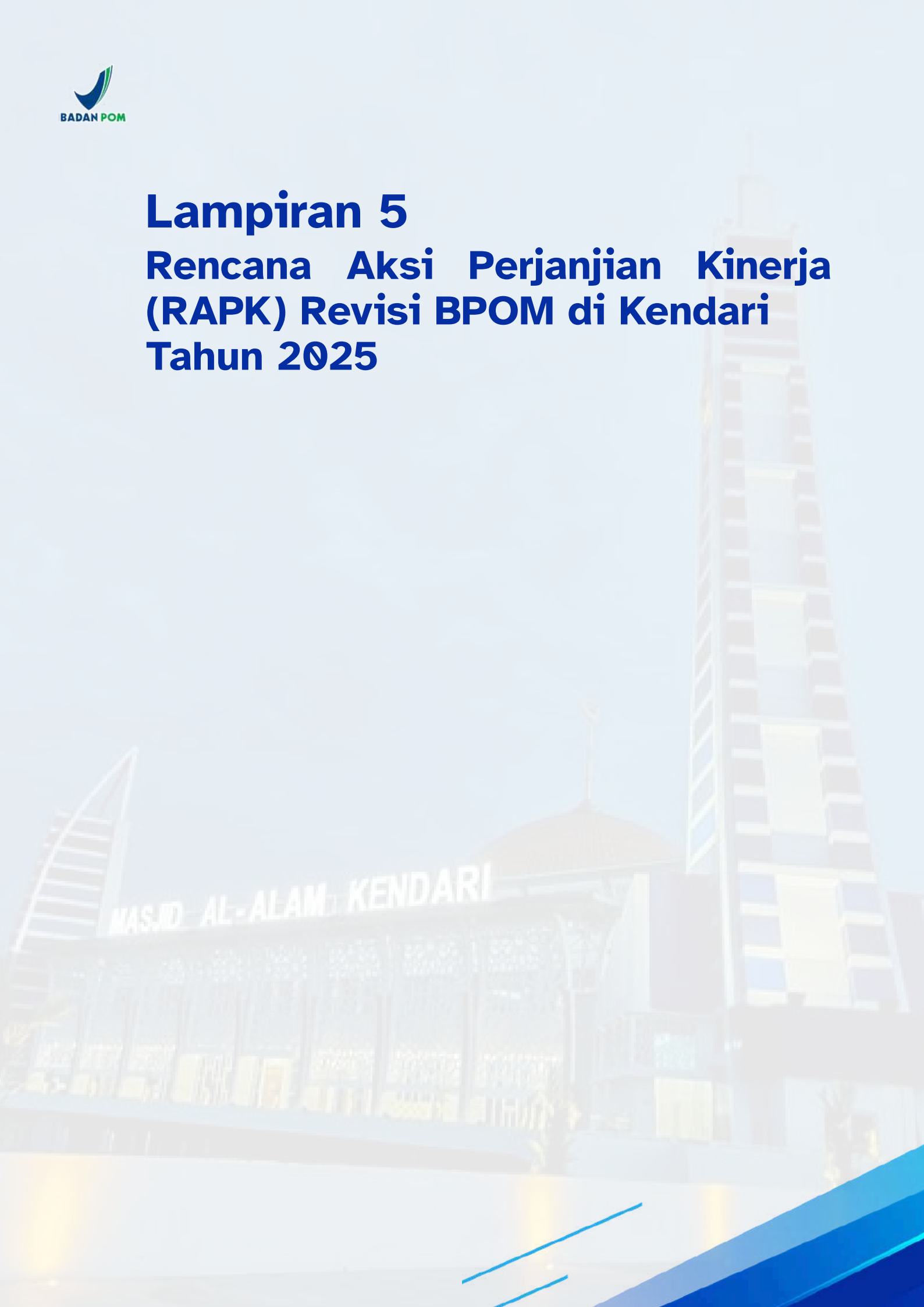

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KENDARI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	499,388,010
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	42,650,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	407,368,240
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,736,840
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	37,894,720
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	14,137,400
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	9,102,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	23,579,400
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	308,630,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	254,634,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	86.57	88.77	88.77	88.77	88.77	88.77	11,754,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	15,444,990
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	60,547,200
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			71	71	71	72	72	72	73	73	73	74.5	3,222,909,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												9.09	23,684,200
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	4,932,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	946,234,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	20	30	55	55	55	55	61.67	80	80	100	13	490,400,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	5	5	25	40	55	65	70	75	85	100	4	544,477,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	25	55	55	65	65	75	90	90	100	1	108,663,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	20	25	35	40	45	55	60	65	70	17.54	37,617,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	5	20	30	35	40	50	50	60	70	80	80	80	470,300,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT													
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	81,422,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.6	58,228,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												89	10,996,694,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												81	29,200,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	4,996,694,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	31,575,000
														Total	23,732,896,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Kendari, 01 October 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari



ANDI AMIRAH NILAWATI

Lampiran 6

Realisasi Output dan Anggaran BPOM di Kendari Tahun 2025



						Pagu Revisi	Pagu Efisiensi (Pagu Akhir)			
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan						Rp23,732,896,000	Rp14,862,040,000			
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						Rp14,812,789,000	Rp6,515,064,000			
No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran					Volume		
			Target Pagu RO (Revisi)	Target Pagu RO (Efisiensi)	Realisasi sd DESEMBER	% Capaian (dibandingkan Pagu Revisi)	% Capaian (dibandingkan Pagu Efisiensi)	Target 2025	Realisasi sd DESEMBER	Capaian %
1	AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	Rp81,422,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000	1.23	100.00	14	14	100.00
2	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)	Rp58,228,000	Rp58,228,000	Rp58,113,100	99.80	99.80	137	464	338.69
3	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	Rp864,202,000	Rp712,561,000	Rp711,958,690	82.38	99.92	2474	2979	120.41
4	BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	Rp906,137,000	Rp241,750,000	Rp241,643,699	26.67	99.96	1	1	100.00
5	BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	Rp82,032,000	Rp11,720,000	Rp11,533,800	14.06	98.41	22	30	136.36
6	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	Rp147,919,000	Rp32,028,000	Rp31,638,522	21.39	98.78	1	1	100.00
7	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	Rp80,000,000	Rp2,650,000	Rp2,650,000	3.31	100.00	9	1	14.00
8	CBV Prasarana Bidang Kesehatan	001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Rp6,000,000,000	Rp15,241,000	Rp15,239,522	0.25	99.99	1	0	0.50

						Pagu Revisi	Pagu Efisiensi (Pagu Akhir)				
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan						Rp23,732,896,000	Rp14,862,040,000				
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						Rp14,812,789,000	Rp6,515,064,000				
No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran					Volume			
			Target Pagu RO (Revisi)	Target Pagu RO (Efisiensi)	Realisasi sd DESEMBER	% Capaian (dibandingkan Pagu Revisi)	% Capaian (dibandingkan Pagu Efisiensi)	Target 2025	Realisasi sd DESEMBER	Capaian %
9	PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	Rp1,022,909,000	Rp1,022,909,000	Rp1,015,914,251	99.32	99.32	1	1	100.00
10	QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)	Rp470,300,000	Rp470,300,000	Rp468,591,205	99.64	99.64	4	4	100.00
11	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	Rp490,400,000	Rp63,485,000	Rp63,466,345	12.94	99.97	13	13	100.00
12	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	Rp544,477,000	Rp44,382,000	Rp44,290,260	8.13	99.79	4	4	100.00
13	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	Rp108,663,000	Rp35,027,000	Rp35,013,000	32.22	99.96	1	1	100.00
14	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	Rp42,650,000	Rp4,000,000	Rp4,000,000	9.38	100.00	45	46	102.22
15	QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	Rp37,617,000	Rp9,430,000	Rp9,430,000	25.07	100.00	10	10	100.00

						Pagu Revisi	Pagu Efisiensi (Pagu Akhir)				
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan						Rp23,732,896,000	Rp14,862,040,000				
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						Rp14,812,789,000	Rp6,515,064,000				
No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran					Volume			
			Target Pagu RO (Revisi)	Target Pagu RO (Efisiensi)	Realisasi sd DESEMBER	% Capaian (dibandingkan Pagu Revisi)	% Capaian (dibandingkan Pagu Efisiensi)	Target 2025	Realisasi sd DESEMBER	Capaian %
16	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)	Rp473,684,000	Rp473,684,000	Rp465,162,236	98.20	98.20	492	495	100.61
17	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)	Rp514,833,000	Rp514,833,000	Rp508,644,654	98.80	98.80	1011	1015	100.40
18	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	Rp33,286,000	Rp33,286,000	Rp33,286,000	100.00	100.00	28	28	100.00
19	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	003 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (Sarana)	Rp4,932,000	Rp4,932,000	Rp4,931,800	100.00	100.00	4	4	100.00
20	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	Rp649,098,000	Rp649,098,000	Rp648,975,984	99.98	99.98	545	603	110.64
21	RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	Rp2,200,000,000	Rp2,114,520,000	Rp2,114,520,000	96.11	100.00	1	1	100.00
			Rp14,812,789,000	**Rp6,515,064,000**	**Rp6,490,003,068**			**4818**	**5715**	
6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM						Rp8,920,107,000	Rp8,346,976,000				

						Pagu Revisi	Pagu Efisiensi (Pagu Akhir)				
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan						Rp23,732,896,000	Rp14,862,040,000				
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						Rp14,812,789,000	Rp6,515,064,000				
No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran					Volume			
			Target Pagu RO (Revisi)	Target Pagu RO (Efisiensi)	Realisasi sd DESEMBER	% Capaian (dibandingkan Pagu Revisi)	% Capaian (dibandingkan Pagu Efisiensi)	Target 2025	Realisasi sd DESEMBER	Capaian %	
22	6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	956 Layanan BMN (layanan)	Rp3,380,000	Rp3,380,000	Rp3,200,000	94.67	94.67	1	1	100.00	
23	6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	994 Layanan Perkantoran (layanan)	Rp8,916,727,000	Rp8,343,596,000	Rp8,251,102,741	92.54	98.89	1	1	100.00	
			Rp8,920,107,000	**Rp8,346,976,000**	**Rp8,254,302,741**			**2**	**2**		
Total Target / Realisasi Output								**4820**	**5717**	**118.61**	
Total Pagu / Realisasi Anggaran			**Rp23,732,896,000**	**Rp14,862,040,000**	**Rp14,744,305,809**	**62.13**	**99.21**				

Lampiran 7

Realisasi Indikator dan Anggaran BPOM di Kendari Tahun 2025



SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN				
				TARGET sd DESEMBER 2025	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	PAGU REVISI (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	REALISASI s.d DESEMBER 2025 (Rp)	CAPAIAN (vs PAGU REVISI) (%)	CAPAIAN (vs PAGU EFISIENSI) (%)
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**84.5**	99.69	117.98	499,388,010	499,388,010	493,385,314	98.80	98.80
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	**26**	28.89	111.12	42,650,000	4,000,000	4,000,000	9.38	100.00
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	99.53	124.41	407,368,240	407,368,240	400,039,523	98.20	98.20
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100**	100	100	4,736,840	4,736,840	4,651,622	98.20	98.20
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85**	100	117.65	37,894,720	37,894,720	37,212,979	98.20	98.20
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**89**	90.94	102.18	14,137,400	14,137,400	13,490,487	95.42	95.42
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**87**	100	114.94	9,102,000	9,102,000	6,880,400	75.59	75.59

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN				
				TARGET sd DESEMBER 2025	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	PAGU REVISI (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	REALISASI s.d DESEMBER 2025 (Rp)	CAPAIAN (vs PAGU REVISI) (%)	CAPAIAN (vs PAGU EFISIENSI) (%)
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85**	100	117.65	23,579,400	23,579,400	25,745,460	109.19	109.19
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**95.5**	100	104.71	308,630,000	308,630,000	326,798,706	105.89	105.89
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	100	125.00	254,634,000	254,634,000	241,732,458	94.93	94.93
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**88.77**	100	112.65	11,754,000	11,754,000	6,027,600	51.28	51.28
		IKSK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**80**	86.1	107.63	15,444,990	15,444,990	15,259,340	98.80	98.80
		IKSK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100**	100	100	60,547,200	60,547,200	61,586,872	101.72	101.72
		IKSK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**74.5**	78.9	105.91	3,222,909,000	3,137,429,000	3,130,434,251	97.13	99.78

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN				
				TARGET sd DESEMBER 2025	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	PAGU REVISI (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	REALISASI s.d DESEMBER 2025 (Rp)	CAPAIAN (vs PAGU REVISI) (%)	CAPAIAN (vs PAGU EFISIENSI) (%)
		IKSK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**9.09**	9.09	100	23,684,200	23,684,200	23,258,112	98.20	98.20
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**67**	67	100.00	4,932,000	4,932,000	4,931,800	100.00	100.00
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	**86**	87.92	102.23	946,234,000	724,281,000	723,492,490	76.46	99.89
		IKSK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**13**	1300%	100	490,400,000	63,485,000	63,466,345	12.94	99.97
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	**4**	400%	100	544,477,000	44,382,000	44,290,260	8.13	99.79
		IKSK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1**	100%	100	108,663,000	35,027,000	35,013,000	32.22	99.96
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**17.54**	17.54	100.00	37,617,000	9,430,000	9,430,000	25.07	100.00

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN				
				TARGET sd DESEMBER 2025	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	PAGU REVISI (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	REALISASI s.d DESEMBER 2025 (Rp)	CAPAIAN (vs PAGU REVISI) (%)	CAPAIAN (vs PAGU EFISIENSI) (%)
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	**80**	93.57	116.96	470,300,000	470,300,000	468,591,205	99.64	99.64
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90**	95.22	105.80	81,422,000	1,000,000	1,000,000	1.23	100.00
SK7	Layanan Publik yang prima	IKSK24	Indeks Pelayanan Publik	**4.6**	4.86	105.65	58,228,000	58,228,000	58,113,100	99.80	99.80
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK25	Nilai Pembangunan ZI	**89**	87.47	98.28	10,996,694,000	4,326,943,000	4,280,357,003	38.92	98.92
		IKSK26	Nilai AKIP	**81**	78.72	97.19	29,200,000	-	-	-	-
		IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran	**5**	5.00	100	4,996,694,000	4,311,702,000	4,265,117,481	85.36	98.92
		IKSK28	Indeks Manajemen Risiko	**2.9**	2.688	92.69	31,575,000	-	-	-	-
							23,732,896,000	**14,862,040,000**	**14,744,305,809**	**62.13**	**99.21**

Lampiran 8
Tingkat Efisiensi Anggaran BPOM di Kendari Tahun 2025



KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Revisi				Pagu Efisiensi (PAGU Akhir)				Keterangan Realisasi
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	
AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	100.00	1.23	81.42	80.42	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien	Realisasi output berupa laporan siber dan laporan intelijen menggunakan pagu efisiensi
BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)	338.69	99.80	3.39	2.39	Efisien	99.80	3.39	2.39	Efisien	LHU Pihak ketiga sd DESEMBER= 454 DAK= 170 POL= 188 MASY= 41 KLB= 55 SERITIKASI CPPOB dan CPOTB=17 SERTIFIKASI CPPOB= 15 sarana (Pendampingan 2025) Terbit IP CPPOB Sesuai SK= 8 Sarana 1. teporombu 2. UMK berkah 3. Vinci Star 4. Panglima Kendari 5. Dinyumy 6. UMK HR 7. CV Leha Ulan Group 8. CV Noer Jaya PErkasa Terbit IP CPPOB Diluar SK= 7 Sarana 1. CV Kedung Jati 2. Bagea Sukses 3. Jazirah 4. Indoherbal 5. CV. Indomekar 6. Adyaksa 7. PT Kopi Alam Keluar Rekomendasi CPOTB=2 1. PT BIN AMR 2. PT HGG GLOBAL
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	120.41	82.38	1.46	0.46	Efisien	99.92	1.21	0.21	Efisien	sd Desember telah dilaksanakan KIE (rutin dan tomas) kepada 2979 peserta

KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Revisi				Pagu Efisiensi (PAGU Akhir)				Keterangan Realisasi
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	
											dengan menggunakan pagu efisiensi
BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	100.00	26.67	3.75	2.75	Efisien	99.96	1.00	0.00	Efisien	sesuai
BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	136.36	14.06	9.70	8.70	Efisien	98.41	1.39	0.39	Efisien	sd DESEMBER telah dilaksanakan 43 pelayanan publik menggunakan PAGU efisiensi
CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	100.00	21.39	4.68	3.68	Efisien	98.78	1.01	0.01	Efisien	Realisasi Output sd DESEMBER 1 Meja Rapat Aula 1 Tangga 1 Kulkas Mini 2 AC 1 Mesin Air 1 Tachometer 1 Kursi Sova
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	14.00	3.31	4.23	3.23	Efisien	100.00	0.14	-0.86	Tidak Efisien	sd DESEMBER telah diadakan 1 unit printer label dengan menggunakan PAGU efisiensi
CBV Prasarana Bidang Kesehatan	001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0.50	0.25	1.97	0.97	Efisien	99.99	0.01	-0.99	Tidak Efisien	Realisasi anggaran berupa belanja pengelola kegiatan (perjadin) yang dilaksanakan awal tahun sebelum adanya kebijkan efisiensi.
PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	100.00	99.32	1.01	0.01	Efisien	99.32	1.01	0.01	Efisien	kegiatan telah dilaksanakan menggunakan PAGU efisiensi
QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)	100.00	99.64	1.00	0.00	Efisien	99.64	1.00	0.00	Efisien	Realisasi sd DESEMBER: Perkara target tahun 2025= 5 (0 SPDP, 0 pada Tahap I, 2 P21, 3 Tahap II) Perkara carryover 2024= 2 (1 P21; 1 Tahap II)

KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Revisi				Pagu Efisiensi (PAGU Akhir)				Keterangan Realisasi
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	100.00	12.94	7.73	6.73	Efisien	99.97	1.00	0.00	Efisien	Kegiatan intervensi SEKOLAH telah selesai dilaksanakan sesuai target dengan menggunakan PAGU efisiensi
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	100.00	8.13	12.29	11.29	Efisien	99.79	1.00	0.00	Efisien	Kegiatan intervensi DESA telah selesai dilaksanakan sesuai target dengan menggunakan PAGU efisiensi
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	100.00	32.22	3.10	2.10	Efisien	99.96	1.00	0.00	Efisien	Kegiatan intervensi PASAR telah selesai dilaksanakan sesuai target dengan menggunakan PAGU efisiensi
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	102.22	9.38	10.90	9.90	Efisien	100.00	1.02	0.02	Efisien	Kegiatan KIE Faramakovigillance telah dilaksanakan secara hybrid menggunakan PAGU efisiensi
QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	100.00	25.07	3.99	2.99	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien	SERITIKASI CPPOB dan CPOTB= 17 sarana (diklaim hanya sarana yang didampingi dalam SK Tahun 2025) SERTIFIKASI CPPOB= 15 sarana (Pendampingan 2025) Terbit IP CPPOB Sesuai SK= 8 Sarana 1. teporombu 2. UMK berkah 3. Vinci Star 4. Panglima Kendari 5. Dinyumy 6. UMK HR 7. CV Leha Ulan Group 8. CV Noer Jaya PErkasa Terbit IP CPPOB Diluar SK= 7 Sarana 1. CV Kedung Jati 2. Bagea Sukses 3. Jazirah

KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Revisi				Pagu Efisiensi (PAGU Akhir)				Keterangan Realisasi
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	
											4. Indoherbal 5. CV. Indomekar 6. Adyaksa 7. PT Kopi Alam Keluar Rekomendasi CPOTB=2 1. PT BIN AMR 2. PT HGG GLOBAL
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)	100.61	98.20	1.02	0.02	Efisien	98.20	1.02	0.02	Efisien	sd DESEMBER Sampel Makanan=495PO=451PIRT=44
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)	100.40	98.80	1.02	0.02	Efisien	98.80	1.02	0.02	Efisien	sd DESEMBER sampel Sediaan Farmasi= 1015 OBAT= 287 OT= 218 KUASI= 14 SK= 59 KOS= 437
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	100.00	100.00	1.00	0.00	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien	sd DESEMBER=28 MD = 19 sarana (9 AMDK, 1 Tepung Tapioka, 1 Produk Biskuit, 2 Produk Bakso Frozen, 2 Produk olahan mete : Tengteng Mete dan kacang mete, 1 produk minuman susu, 1 produk minuman kopi dan herbal, 1 produk bawang goreng, 1 gula merah serbuk/palm sugar) IRTP = 7 sarana (1 produk roti, 1 produk kue pia, 2 produk keripik pisang, 3 produk mete UKOT : 1 (COD dan COL) UMOT : 1 (COL)
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	003 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang	100.00	100.00	1.00	0.00	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien	sd DESEMBER telah dilaksanakan pemeriksaan

KRO	Rincian Output	Output (%)	Pagu Revisi				Pagu Efisiensi (PAGU Akhir)				Keterangan Realisasi
			Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	Input (%)	IE	TE=1-IE	Notifikasi	
	diperiksa oleh UPT (Sarana)										terhadap 4 sarana produksi pangan fortifikasi sesuai target
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	110.64	99.98	1.11	0.11	Efisien	99.98	1.11	0.11	Efisien	sd DESEMBER telah dilakukan pemeriksaan terhadap 603 sarana distribusi: Obat=222 OT=86 SK=32 Kosmetik=116 Pangan =147
RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	100.00	96.11	1.04	0.04	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien	Telah diadakan Alat Laboratorium 1HPLC 1 Microwave 1 BSC
6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	956 Layanan BMN (layanan)	100.00	94.67	1.06	0.06	Efisien	94.67	1.06	0.06	Efisien	kegiatan telah dilaksanakan menggunakan PAGU efisiensi
6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	994 Layanan Perkantoran (layanan)	100.00	92.54	1.08	0.08	Efisien	98.89	1.01	0.01	Efisien	kegiatan telah dilaksanakan menggunakan PAGU efisiensi

	Indikator	Indikator	Anggaran (Pagu Revisi)			Anggaran (Pagu Efisiensi)		
		Capaian sd DESEMBER	Capaian sd DESEMBER	IE	TE = 1-IE	Capaian sd DESEMBER	IE	TE = 1-IE
IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.98	98.80	1.19	0.19	98.80	1.19	0.19
IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	111.12	9.38	11.85	10.85	100.00	1.11	0.11
IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	124.41	98.20	1.27	0.27	98.20	1.27	0.27
IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	98.20	1.02	0.02	98.20	1.02	0.02
IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65	98.20	1.20	0.20	98.20	1.20	0.20
IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	102.18	95.42	1.07	0.07	95.42	1.07	0.07
IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114.94	75.59	1.52	0.52	75.59	1.52	0.52
IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65	109.19	1.08	0.08	109.19	1.08	0.08
IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104.71	105.89	0.99	-0.01	105.89	0.99	-0.01
IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	94.93	1.32	0.32	94.93	1.32	0.32
IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	112.65	51.28	2.20	1.20	51.28	2.20	1.20
IKSK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	107.63	98.80	1.09	0.09	98.80	1.09	0.09
IKSK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	101.72	0.98	-0.02	101.72	0.98	-0.02
IKSK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	105.91	97.13	1.09	0.09	99.78	1.06	0.06
IKSK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	98.20	1.02	0.02	98.20	1.02	0.02
IKSK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00
IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	102.23	76.46	1.34	0.34	99.89	1.02	0.02

	Indikator	Indikator	Anggaran (Pagu Revisi)			Anggaran (Pagu Efisiensi)		
		Capaian sd DESEMBER	Capaian sd DESEMBER	IE	TE = 1-IE	Capaian sd DESEMBER	IE	TE = 1-IE
IKSK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	12.94	7.73	6.73	99.97	1.00	0.00
IKSK19	Jumlah desa pangan aman	100	8.13	12.29	11.29	99.79	1.00	0.00
IKSK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	32.22	3.10	2.10	99.96	1.00	0.00
IKSK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100.00	25.07	3.99	2.99	100.00	1.00	0.00
IKSK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	116.96	99.64	1.17	0.17	99.64	1.17	0.17
IKSK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	105.80	1.23	86.14	85.14	100.00	1.06	0.06
IKSK24	Indeks Pelayanan Publik	105.65	99.80	1.06	0.06	99.80	1.06	0.06
IKSK25	Nilai Pembangunan ZI	98.28	38.92	2.52	1.52	98.92	0.99	-0.01
IKSK26	Nilai AKIP	97.19	-	-	-	-	-	-
IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran	100	85.36	1.17	0.17	98.92	1.01	0.01
IKSK28	Indeks Manajemen Risiko	92.69	-	-	-	-	-	-
			62.13			**99.21**		

No	Sasaran Kegiatan		Indikator	Indikator	CAPAIAN SASARAN	CAPAIAN ANGGARAN (vs PAGU REVISI)				CAPAIAN ANGGARAN (vs PAGU EFISIENSI)			
				Capaian 2025		Capaian Anggaran	IE	TE=1-IE	Kriteria	Capaian Anggaran	IE	TE=1-IE	Kriteria
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.98	110.79	88.73	1.25	0.25	Efisien	94.95	1.17	0.17	Efisien
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	111.12									
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	124.41									
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00									
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65									
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	102.18									
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114.94									
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65									
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104.71									
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00									
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	112.65									
		IKSK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	107.63									
		IKSK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00									
		IKSK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	105.91									

No	Sasaran Kegiatan		Indikator	Indikator	CAPAIAN SASARAN	CAPAIAN ANGGARAN (vs PAGU REVISI)				CAPAIAN ANGGARAN (vs PAGU EFISIENSI)			
				Capaian 2025		Capaian Anggaran	IE	TE=1-IE	Kriteria	Capaian Anggaran	IE	TE=1-IE	Kriteria
		IKSK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100.00									
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	1.00	0.00	Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	102.23	100.56	32.44	3.10	2.10	Tidak Efisien	99.90	1.01	0.01	Efisien
		IKSK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00									
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	100.00									
		IKSK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00									
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100.00	100.00	25.07	3.99	2.99	Tidak Efisien	100.00	1.00	0.00	Efisien
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	116.96	116.96	99.64	1.17	0.17	Efisien	99.64	1.17	0.17	Efisien
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	105.80	105.80	1.23	86.14	85.14	Tidak Efisien	100.00	1.06	0.06	Efisien
SK7	Layanan Publik yang prima	IKSK24	Indeks Pelayanan Publik	105.65	105.65	99.80	1.06	0.06	Efisien	99.80	1.06	0.06	Efisien
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK25	Nilai Pembangunan ZI	98.28	97.04	62.14	1.56	0.56	Efisien	98.92	0.98	-0.02	Tidak Efisien
		IKSK26	Nilai AKIP	97.19									
		IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran	100.00									
		IKSK28	Indeks Manajemen Risiko	92.69									

Lampiran 9

Capaian RAPK Desember 2025 dibandingkan dengan Target Tahunan dan Target Renstra



Target Renstra

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N		CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN N		CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN KETIGA RENSTRA		CAPAIAN TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH	
					TARGET sd DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2027	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2029	CAPAIAN (%)
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.69	**84.5**	117.98	**84.5**	117.98	**87.5**	113.93	**90.5**	110.15
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28.89	**26**	111.12	**26**	111.12	**28**	103.18	**30**	96.30
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.53	**80**	124.41	**80**	124.41	**84**	118.49	**88**	113.10
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	**100**	100.00	**100**	100.00	**100**	100.00	**100**	100.00
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	**85**	117.65	**85**	117.65	**89**	112.36	**95**	105.26
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90.94	**89**	102.18	**89**	102.18	**91**	99.93	**93**	97.78
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	**87**	114.94	**87**	114.94	**89**	112.36	**91**	109.89
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	**85**	117.65	**85**	117.65	**89**	112.36	**95**	105.26
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	**95.5**	104.71	**95.5**	104.71	**97**	103.09	**98.5**	101.52
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	**80**	125.00	**80**	125.00	**84**	119.05	**90**	111.11
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	**88.77**	112.65	**88.77**	112.65	**92.17**	108.50	**95.37**	104.85
		IKSK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	86.1	**80**	107.63	**80**	107.63	**82**	105.00	**84**	102.50

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N		CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN N		CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN KETIGA RENSTRA		CAPAIAN TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH	
					TARGET sd DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2027	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2029	CAPAIAN (%)
		IKSK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	**100**	100.00	**100**	100.00	**100**	100.00	**100**	100.00
		IKSK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.9	**74.5**	105.91	**74.5**	105.91	**82.3**	95.87	**87**	90.69
		IKSK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	9.09	**9.09**	100.00	**9.09**	100.00	**27.27**	33.33	**90.91**	10.00
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	**67**	100.00	**67**	100.00	**83**	80.72	**100**	67.00
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	87.92	**86**	102.23	**86**	102.23	**87.72**	100.23	**89.44**	98.30
		IKSK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	**13**	100.00	**13**	100.00	**18**	72.22	**22**	59.09
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	4	**4**	100.00	**4**	100.00	**7**	57.14	**7**	57.14
		IKSK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	**1**	100.00	**1**	100.00	**2**	50.00	**3**	33.33
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17.54	**17.54**	100.00	**17.54**	100.00	**56.14**	31.24	**100**	17.54
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	93.57	**80**	116.96	**80**	116.96	**82**	114.11	**84**	111.39
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	95.22	**90**	105.80	**90**	105.80	**92**	103.50	**94**	101.30
SK7	Layanan Publik yang prima	IKSK24	Indeks Pelayanan Publik	4.86	**4.6**	105.65	**4.6**	105.65	**4.7**	103.40	**4.8**	101.25

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N		CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN N		CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN KETIGA RENSTRA		CAPAIAN TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH	
					TARGET sd DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2027	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2029	CAPAIAN (%)
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK25	Nilai Pembangunan ZI	87.47	**89**	98.28	**89**	98.28	**90.1**	97.08	**90.2**	96.97
		IKSK26	Nilai AKIP	78.72	**81**	97.19	**81**	97.19	**82**	96.00	**83**	94.84
		IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran	5	**5**	100.00	**5**	100.00	**5**	100.00	**92.17**	5.42
		IKSK28	Indeks Manajemen Risiko	2.688	**2.9**	92.69	**2.9**	92.69	**3.4**	79.06	**3.8**	70.74

Lampiran 10

Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPOM di Kendari Tahun 2025



SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	TARGET sd DESEMBER 2025	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	BOBOT NILAI AKIP (BB)	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	CAPAIAN SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	99.69	117.98	110.00	90%	99.00	96.03
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	28.89	111.12	110.00	90%	99.00	
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	99.53	124.41	110.00	90%	99.00	
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	90%	90.00	
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110.00	90%	99.00	
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89	90.94	102.18	102.18	90%	91.96	
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94	110.00	90%	99.00	
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110.00	90%	99.00	
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	100	104.71	104.71	90%	94.24	
		IKSK10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00	110.00	90%	99.00	

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	TARGET sd DESEMBER 2025	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	BOBOT NILAI AKIP (BB)	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	CAPAIAN SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11
		IKSK11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.77	100	112.65	110.00	90%	99.00	
		IKSK12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	86.1	107.63	107.63	90%	96.86	
		IKSK13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100.00	100.00	90%	90.00	
		IKSK14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.5	78.9	105.91	105.91	90%	95.32	
		IKSK15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	9.09	9.09	100.00	100.00	90%	90.00	
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	100.00	100.00	90%	90.00	90.00
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86	87.92	102.23	102.23	90%	92.01	90.50
		IKSK18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	13	100.00	100.00	90%	90.00	
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	4	4	100.00	100.00	90%	90.00	
		IKSK20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	100.00	90%	90.00	
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17.54	17.54	100.00	100.00	90%	90.00	90.00

SK	SASARAN KEGIATAN	IKK	INDIKATOR	TARGET sd DESEMBER 2025	REALISASI s.d DESEMBER 2025	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	BOBOT NILAI AKIP (BB)	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	CAPAIAN SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80	93.57	116.96	110.00	90%	99.00	99.00
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95.22	105.80	105.80	90%	95.22	95.22
SK7	Layanan Publik yang prima	IKSK24	Indeks Pelayanan Publik	4.6	4.86	105.65	105.65	90%	95.09	95.09
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK25	Nilai Pembangunan ZI	89	87.47	98.28	98.28	90%	88.45	87.34
		IKSK26	Nilai AKIP	81	78.72	97.19	97.19	90%	87.47	
		IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100.00	100.00	90%	90.00	
		IKSK28	Indeks Manajemen Risiko	2.9	2.688	92.69	92.69	90%	83.42	
NKO									**93.61**	

Lampiran 11
Realisasi Capaian Indikator Balai dalam Cluster 1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI PALU				BALAI POM DI KENDARI				BALAI POM DI BATAM				BALAI POM DI JAMBI			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.50	96.81	111.92	110.00	84.50	99.69	117.98	99.00	91.00	99.94	109.82	98.84	87.50	93.95	107.37	107.37
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	28.00	107.69	107.69	26.00	28.89	111.12	99.00	26.00	28.89	111.12	99.00	26.00	33.33	128.19	110.00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	94.17	110.79	110.00	80.00	99.53	124.41	99.00	91.00	99.16	108.97	98.07	86.00	96.28	111.95	110.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	87.00	87.00	87.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	-	-	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	109.89	85.00	100.00	117.65	99.00	91.00	100.00	109.89	98.90	85.00	92.65	109.00	109.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78.00	78.71	100.91	100.91	89.00	90.94	102.18	91.96	86.00	96.74	112.49	99.00	76.00	82.08	108.00	108.00
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	109.89	87.00	100.00	114.94	99.00	93.00	100.00	107.53	96.77	91.00	93.75	103.02	103.02
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	109.89	85.00	100.00	117.65	99.00	91.00	100.00	109.89	98.90	91.00	100.00	109.89	109.89
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.13	100.00	102.95	102.95	95.50	100.00	104.71	94.24	97.00	97.75	100.77	90.70	95.63	100.52	105.11	105.11
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	109.89	80.00	100.00	125.00	99.00	91.00	100.00	109.89	98.90	91.00	100.00	109.89	109.89

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI PALU				BALAI POM DI KENDARI				BALAI POM DI BATAM				BALAI POM DI JAMBI			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.40	98.59	104.44	104.44	86.57	100.00	115.51	99.00	92.38	99.89	108.13	97.32	92.40	98.54	106.65	106.65
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90.00	89.90	99.89	99.89	80.00	86.10	107.63	96.86	91.00	89.60	98.46	88.62	91.00	93.80	103.08	103.08
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Balai POM di Palu	100.00	104.90	104.90	104.90	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	105.64	105.64	95.08	100.00	105.73	105.73	105.73
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.00	79.90	103.77	103.77	74.50	78.90	105.91	95.32	67.30	67.60	100.45	90.40	71.00	72.35	101.90	101.90
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11.11	11.11	100.00	100.00	9.09	9.09	100.00	90.00	20.00	20.00	100.00	90.00	14.29	14.29	100.00	100.00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	100.00	67.00	67.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	90.00	60.00	60.00	100.00	100.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.45	90.11	103.04	103.04	86.00	87.92	102.23	92.01	86.18	87.78	101.86	91.67	88.21	88.75	100.61	100.61
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13.00	13.00	100.00	100.00	13.00	13.00	100.00	90.00	7.00	7.00	100.00	90.00	10.00	10.00	100.00	100.00
		Jumlah desa pangan aman	3.00	3.00	100.00	100.00	4.00	4.00	100.00	90.00	3.00	3.00	100.00	90.00	3.00	3.00	100.00	100.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	90.00	1.00	1.00	100.00	90.00	1.00	1.00	100.00	100.00
4	Meningkatnya pendampinga n UMKM dalam pemenuhan standar	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	17.50	17.50	100.00	100.00	17.54	17.54	100.00	90.00	12.12	12.12	100.00	90.00	17.19	19.05	110.82	110.00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI PALU				BALAI POM DI KENDARI				BALAI POM DI BATAM				BALAI POM DI JAMBI			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR
	keamanan dan mutu	dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan																
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	89.00	85.00	95.51	95.51	80.00	93.57	116.96	99.00	94.00	88.75	94.41	84.97	90.00	100.00	111.11	110.00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	87.58	97.31	97.31	90.00	95.22	105.80	95.22	90.00	100.00	111.11	99.00	90.00	97.92	108.80	108.80
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.60	4.95	107.61	107.61	4.60	4.86	105.65	95.09	4.65	4.91	105.59	95.03	4.70	4.92	104.68	104.68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.10	90.35	100.28	100.28	89.00	87.47	98.28	88.45	87.50	86.64	99.02	89.12	85.00	85.82	100.96	100.96
		Nilai AKIP UPT BPOM	82.10	81.33	99.06	99.06	81.00	78.72	97.19	87.47	80.94	76.43	94.43	84.99	82.30	80.17	97.41	97.41
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	4.00	80.00	80.00	5.00	5.00	100.00	90.00	5.00	5.00	100.00	90.00	5.00	4.00	80.00	80.00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.97	2.94	98.99	98.99	2.90	2.69	92.69	83.42	2.95	2.90	98.31	88.47	2.80	2.81	100.36	100.36
NKO						**101.89**				**93.61**				**92.99**				**103.80**

Lampiran 12
Kertas Kerja Indikator



Kertas Kerja Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		84.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari		84.50	100.00	100.00	100.00	99.30	99.82
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret		84.50	100.00	100.00	100.00	99.30	99.82
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April		84.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei		84.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni		84.50	99.89	100.00	100.00	100.00	99.97
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli		84.50	99.71	100.00	99.57	99.46	99.68
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		84.50	97.93	100.00	99.26	99.41	99.15
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		84.50	99.68	100.00	99.31	99.48	99.62
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober		84.50	99.30	100.00	99.35	99.62	99.57
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November		84.50	99.19	100.00	99.39	99.62	99.55
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	1011	84.50	99.16	100.00	100.00	99.59	99.69

Kertas Kerja Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Januari	0.00	0.00	0.00	0
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Februari	0.00	0.00	0.00	0
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Maret	0.00	0.00	0.00	0
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	April	0.00	0.00	0.00	0
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Mei	0.00	0.00	0.00	0
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juni	0.00	0.00	0.00	0
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juli	0.00	0.00	0.00	0
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Agustus	0.00	0.00	0.00	0
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	September	0.00	5.00	45.00	11.11
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Oktober	0.00	8.00	45.00	17.78
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	November	0.00	10.00	45.00	22.22
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Desember	26.00	13.00	45.00	28.89

Kertas Kerja Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	415	80.00	53.86	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	88.46
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	415	80.00	59.16	100.00	100.00	100.00	98.68	#DIV/0!	89.62
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	415	80.00	59.16	100.00	100.00	100.00	98.68	#DIV/0!	89.62
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	415	80.00	66.14	100.00	100.00	100.00	99.25	#DIV/0!	91.44
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	415	80.00	67.59	100.00	100.00	100.00	99.32	#DIV/0!	91.81
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	415	80.00	67.59	100.00	100.00	100.00	99.43	#DIV/0!	91.83
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	415	80.00	75.54	100.00	100.00	100.00	99.20	#DIV/0!	93.79
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	415	80.00	88.67	100.00	100.00	100.00	98.89	100.00	97.62
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	415	80.00	94.34	100.00	100.00	100.00	96.81	100.00	98.55
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	415	80.00	97.71	100.00	100.00	100.00	94.71	100.00	99.01
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	415	80.00	99.67	100.00	100.00	100.00	95.25	100.00	99.46
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	415	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.31	100.00	99.53

Kertas Kerja Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan) 30%	Kesesuaian parameter uji dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM 35%	Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP 35%	Realisasi (%)
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Januari	100.00	30%	35%	25%	90%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Februari	100.00	30%	35%	20%	85%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Maret	100.00	30%	35%	20%	85%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	April	100.00	30%	35%	20%	85%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Mei	100.00	30%	35%	20%	85%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Juni	100.00	30%	35%	35%	100%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Juli	100.00	30%	35%	35%	100%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Agustus	100.00	30%	35%	35%	100%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	September	100.00	30%	35%	35%	100%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Oktober	100.00	30%	35%	35%	100%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	November	100.00	30%	35%	35%	100%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Desember	100.00	30%	35%	35%	100%

Kertas Kerja Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel PIRT	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 10%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 60%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 5%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 5%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	44.00	85.00	18.18	18.18	18.18	18.18	0.00	14.55
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	44.00	85.00	65.91	65.91	65.91	65.91	0.00	52.73
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	44.00	85.00	65.91	65.91	65.91	65.91	0.00	52.73
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	44.00	85.00	88.64	88.64	88.64	88.64	0.00	70.91
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	44.00	85.00	93.18	93.18	93.18	93.18	0.00	74.55
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	44.00	85.00	93.18	100.00	93.18	100.00	100.00	98.98
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	44.00	85.00	97.73	100.00	97.73	100.00	100.00	99.66
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	44.00	85.00	97.73	100.00	97.73	100.00	100.00	99.66
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	44.00	85.00	97.73	100.00	97.73	100.00	100.00	99.66
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	44.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	44.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	44.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Kertas Kerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	89.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	89.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	89.00	40.00	100.00	70.00
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	89.00	55.56	100.00	77.78
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	89.00	82.09	87.50	84.79
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	89.00	82.83	88.89	85.86
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	89.00	79.84	93.02	86.43
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	89.00	84.18	85.45	84.82
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	89.00	86.41	95.08	90.75
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	89.00	86.76	89.86	88.31
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	89.00	87.93	93.06	90.49
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	89.00	88.55	93.33	90.94

Kertas Kerja Indikator Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA & SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	2.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	2.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	2.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	2.00	0.00	100.00	0.00	100.00

Kertas Kerja Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	85.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	100.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85.00	11.00	11.00	100.00	11.00	11.00	100.00	11.00	11.00	100.00	100.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa	Juni	85.00	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	100.00

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan												
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85.00	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	100.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	85.00	17.00	17.00	100.00	17.00	17.00	100.00	17.00	17.00	100.00	100.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	85.00	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	100.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	85.00	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	100.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	85.00	26.00	26.00	100.00	26.00	26.00	100.00	26.00	26.00	100.00	100.00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	85.00	26.00	26.00	100.00	26.00	26.00	100.00	26.00	26.00	100.00	100.00

Kertas Kerja Indikator Persentase Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	95.50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	95.50	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	95.50	100.00	100.00	100.00	92.11	98.03
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Kertas Kerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa 2	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa 3	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	132	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	132	2	2	20.00	2	2	70.00	2	2	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	132	13	13	20.00	13	13	70.00	13	13	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	132	23	23	20.00	23	23	70.00	23	23	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	132	51	51	20.00	51	51	70.00	51	51	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	132	62	62	20.00	62	62	70.00	62	62	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	132	76	76	20.00	76	76	70.00	76	76	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	132	88	88	20.00	88	88	70.00	88	88	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	132	102	102	20.00	102	102	70.00	102	102	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	132	106	106	20.00	106	106	70.00	106	106	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	132	109	109	20.00	109	109	70.00	109	109	10.00	100.00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	132	147	147	20.00	147	147	70.00	147	147	10.00	100.00

Kertas Kerja Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari		100.00	#VALUE!	100.00	100.00	100.00	#VALUE!
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Kertas Kerja Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Januari		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Februari		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Maret		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	April		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Mei		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juni		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juli		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Agustus		100.00	100.00	100.00
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	September		100.00	100.00	100.00
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Oktober		100.00	100.00	100.00
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	November		100.00	100.00	100.00
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Desember		100.00	100.00	100.00

HASIL PENGAWASAN LABEL UPT BPOM TAHUN 2025

BALAI POM

No	NAMA UPT	Realisasi Jumlah laporan Label	Realisasi Laporan Label tepat waktu	Target Indikator	Realisasi Indikator
1	BPOM AMBON	100,0%	77,08%	91,0%	88,5%
2	BPOM BATAM	100,0%	79,17%	91,0%	89,6%
3	BPOM BENGKULU	100,0%	73,61%	90,0%	86,8%
4	BPOM BOGOR	100,0%	50,00%	80,0%	75,0%
5	BPOM JAMBI	100,0%	87,50%	91,0%	93,8%
6	BPOM JEMBER	100,0%	94,44%	91,0%	97,2%
7	BPOM KENDARI	100,0%	72,22%	80,0%	86,1%
8	BPOM KEDIRI	100,0%	79,86%	91,0%	89,9%
9	BPOM MAMUJU	100,0%	72,92%	80,0%	86,5%
10	BPOM MANOKWARI	100,0%	84,03%	85,0%	92,0%
11	BPOM PALOPO	100,0%	84,03%	90,0%	92,0%
12	BPOM PALU	100,0%	77,78%	90,0%	88,9%
13	BPOM PANGKAL PINANG	100,0%	68,06%	80,0%	84,0%
14	BPOM PAYAKUMBUH	100,0%	90,97%	91,0%	95,5%
15	BPOM SOFIFI	100,0%	75,00%	90,0%	87,5%

No	NAMA UPT	Realisasi Jumlah laporan Label	Realisasi Laporan Label tepat waktu	Target Indikator	Realisasi Indikator
16	BPOM SURAKARTA	100,0%	63,19%	80,0%	81,6%
17	BPOM TANGERANG	100,0%	81,25%	80,0%	90,6%
18	BPOM TASIKMALAYA	100,0%	79,86%	80,0%	89,9%
19	BPOM TARAKAN	100,0%	89,58%	91,0%	94,8%
20	BPOM BALIKPAPAN	100,0%	66,67%	80,0%	83,3%
21	BPOM BAUBAU	100,0%	100,00%	91,0%	100,0%
22	BPOM DUMAI	100,0%	96,43%	90,0%	98,2%
23	BPOM TANJUNG BALAI	100,0%	90,48%	80,0%	95,2%
24	BPOM BANYUMAS	100,0%	66,67%	84,0%	83,3%
25	BPOM BIMA	100,0%	91,67%	90,0%	95,8%
26	BPOM ENDE	100,0%	75,00%	80,0%	87,5%
27	BPOM INDRAGIRI HULU	100,0%	91,67%	80,0%	95,8%
28	BPOM SANGGAU	100,0%	93,02%	91,0%	96,5%
29	BPOM TABALONG	100,0%	80,95%	91,0%	90,5%
30	BPOM TULANGBAWANG	100,0%	75,00%	80,0%	87,5%

Rata-Rata Realisasi Jumlah : 100%
Rata-Rata ketepatan waktu pelaporan: 80,3%
Rata-Rata Realisasi Indikator: 90,1%

Kertas Kerja Indikator Persentase Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%)	Realisasi (%)
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Januari	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Februari	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Maret	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	April	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Mei	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Juni	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Juli	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Agustus	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	September	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Oktober	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	November	100	111.76	100.00	100.00	50.00	90.44
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Desember	100	111.76	100.00	100.00	100.00	102.94

Kertas Kerja Indikator Persentase Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai POM di Kendari
Triwulan/Tahun : 4/2025
Tanggal Penilaian : 23 Desember 2025
Nama Tim Penilai : 1. Attin Rachmawati, S.Si., M.Si
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	85.4	78.9	74.5	105.9
2.	Standar Peralatan	89.3			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	60			
4.	Standar Metode Terverifikasi	63.2			

Kendala Pemenuhan
-

Rencana Tindak Lanjut :
-

Tim Penilai PPPOMN

1 Attin Rachmawati, S.Si., M.Si

2 Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Kepala Balai POM di Kendari

Andi Amirah Nilawati, S.Si, Apt, M.HSM

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kertas Kerja Indikator Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Januari	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Februari	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Maret	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	April	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Mei	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Juni	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Juli	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Agustus	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	September	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Oktober	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	November	9.09	1	11	0.09
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Desember	9.09	1	11	9.09%

Kertas Kerja Indikator Persentase Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	4	0	0	#DIV/0!
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	4	0	0	#DIV/0!
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	4	0	0	#DIV/0!
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	4	3	4	75.00
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	4	3	4	75.00
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	4	3	4	75.00
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	4	3	4	75.00
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	4	3	4	75.00
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	4	4	4	100.00
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	4	4	6	66.67
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	4	4	6	66.67
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	4	4	6	66.67

Kertas Kerja Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

No	Unit Kerja	Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka	Indeks Efektivitas KIE Media	Indeks Efektivitas KIE Total				
				Capaian	Target	% Realisasi	Keterangan	Intepretasi
46	BBPOM di Makassar	94,08	90,69	92,39	86,64	106.64 %	Mencapai Target	Efektif
47	BBPOM di Manado	96,48	93,55	95,02	89,24	106.48 %	Mencapai Target	Sangat Efektif
48	Balai POM di Ambon	91,56	91,24	91,4	87,93	103.95 %	Mencapai Target	Efektif
49	Balai POM di Bau-Bau	92,35	91,89	92,12	88,45	104.15 %	Mencapai Target	Efektif
50	Balai POM di Kendari	87,69	88,15	87,92	86	102.23 %	Mencapai Target	Efektif
51	Balai POM di Mamuju	87,01	85,91	86,46	85,88	100.68 %	Mencapai Target	Efektif
52	Balai POM di Manokwari	93,28	91,2	92,24	88,46	104.27 %	Mencapai Target	Efektif
53	Balai POM di Palopo	85,36	86,32	85,84	85	100.99 %	Mencapai Target	Efektif
54	Balai POM di Palu	89,88	90,34	90,11	87,45	103.04 %	Mencapai Target	Efektif
55	Balai POM di Sofifi	90,39	92,22	91,31	88,61	103.05 %	Mencapai Target	Efektif
56	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	86,47	85,32	85,89	84,76	101.33 %	Mencapai Target	Efektif
57	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	80,63	86,5	83,56	83,48	100.1 %	Mencapai Target	Cukup Efektif
58	Loka POM di Kabupaten Banggai	89,97	86,76	88,36	85,07	103.87 %	Mencapai Target	Efektif
59	Loka POM di Kabupaten Belitung	90,06	88,86	89,46	85,78	104.29 %	Mencapai Target	Efektif
60	Loka POM di Kabupaten Belu	83,3	80,33	81,82	81,12	100.86 %	Mencapai Target	Cukup Efektif
61	Loka POM di Kabupaten Buleleng	88,99	84,23	86,61	85,63	101.14 %	Mencapai Target	Efektif
62	Loka POM di Kabupaten Bungo	86,95	92,17	89,56	86,83	103.14 %	Mencapai Target	Efektif
63	Loka POM di Kabupaten Kep. Sangihe	88,2	86,69	87,45	84,52	103.47 %	Mencapai Target	Efektif
64	Loka POM di Kabupaten Kep. Tanimbar	90	85,75	87,87	85,87	102.33 %	Mencapai Target	Efektif
65	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	84,27	86,43	85,35	84,52	100.98 %	Mencapai Target	Efektif
66	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	87,5	93,62	90,56	85,08	106.44 %	Mencapai Target	Efektif
67	Loka POM di Kabupaten Merauke	87,84	86,95	87,4	86,48	101.06 %	Mencapai Target	Efektif
68	Loka POM di Kabupaten Mimika	88,08	88,19	88,14	87,35	100.9 %	Mencapai Target	Efektif
69	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	87,95	87,06	87,5	85,44	102.41 %	Mencapai Target	Efektif
70	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	87,38	85,18	86,28	84,63	101.95 %	Mencapai Target	Efektif
71	Loka POM di Kabupaten Sambas	81,63	81,87	81,75	81,44	100.38 %	Mencapai Target	Cukup Efektif

Kertas Kerja Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	55.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	55.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	70.00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	55.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	70.00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	55.00	25.00	20.00	25.00	12.50	0.00	82.50	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	61.67	25.00	20.00	25.00	12.50	0.00	82.50	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	80.00	25.00	20.00	25.00	25.00	1.82	96.82	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	80.00	25.00	20.00	25.00	25.00	2.05	97.05	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	100.00	25.00	20.00	25.00	25.00	5.00	100.00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	13.00	25.00	20.00	25.00	25.00	5.00	100.00	**13**

Kertas Kerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman
Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	April	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	40.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	55.00	25.00	25.00	10.00	0.00	0.00	60.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	65.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	70.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	September	75.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	85.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	November	100.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00	
Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	4.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00	**4**

Kertas Kerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Nama Indikator	Bulan	Target	25% Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Progress	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	55.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	55.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	65.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	65.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	75.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00	90.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	90.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	90.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	1.00	1.00

Kertas Kerja Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	5	0.00	10.00	10.00	2.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10	0.00	30.00	30.00	6.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	20	120.00	30.00	30.00	18.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	25	360.00	30.00	30.00	42.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	35	540.00	30.00	70.00	64.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	40	540.00	30.00	70.00	64.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juli	45	630.00	70.00	70.00	77.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Agustus	55	755.00	70.00	70.00	89.50	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	September	60	760.00	110.00	70.00	94.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Oktober	65	760.00	110.00	70.00	94.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	November	70	760.00	110.00	70.00	94.00	10
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	**Desember**	17.54	8.00	2.00	0.00	17.54	57.00

Kertas Kerja Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	4	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	4	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	4	2	0	1	0.15	0	1	0.55	0	0	0	0	0	0	11.67
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	4	2	2	0	0.3	0	2	1.1	0	0	0	0	0	0	23.33
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	4	2	3	0	0.45	0	1	0.55	0	1	0.85	0	0	0	30.83
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	4	2	0	0	0	3	0	1.65	0	1	0.85	0	1	1	58.33
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	4	2	0	0	0	3	0	1.65	0	1	0.85	1	1	2	75.00
Persentase Keberhasilan	Agustus	4	2	0	0	0	3	0	1.65	0	1	0.85	1	1	2	75.00

Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan																
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	4	2	0	0	0	2	0	1.1	1	1	1.7	1	1	2	80.00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	4	2	1	0	0.15	2	0	1.1	1	1	1.7	1	1	2	82.50
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	4	2	0	0	0	3	0	1.65	1	1	1.7	1	1	2	89.17
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	5	2	0	0	0	0	0	0	2	1	2.55	3	1	4	93.57

Kertas Kerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan

Bulan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu												
Jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.												
Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan												
Nilai maksimal penilaian analisis												
Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)												92%
jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT												
jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT												
Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)												88.89%
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	95.22%

Kertas Kerja Indikator Indeks Pelayanan Publik

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI POM DI KENDARI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

Pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4.86/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
2	Profesionalisme SDM	13.b.K	Agar pelaksanaan pemberian penghargaan yang telah diatur dalam SK dapat diimplementasikan secara konsisten, serta laporan yang disusun menyajikan hasil secara rinci untuk masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, sehingga proses pemberian penghargaan dapat terukur, transparan, dan akuntabel.
3	Sarana Prasarana	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	24.d.T	Agar pemutakhiran data, informasi, dan aplikasi pada kanal digital unit pelayanan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, termasuk penyajian data real-time pengunjung layanan pada subsite kendari.pom.go.id.
5	Konsultasi dan Pengaduan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
6	Inovasi	29.f.B	Agar inovasi yang telah dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan telah diikutsertakan dalam kompetisi dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya, melalui penguatan strategi, evaluasi berkelanjutan, serta perluasan dampak pelayanan, sehingga pada periode berikutnya inovasi tersebut berpeluang meraih prestasi dan pengakuan pada berbagai tingkat kompetisi, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
			memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
4.51 - 5.00	A	Pelayanan Prima
4.01 - 4.50	A-	Sangat Baik
3.51 - 4.00	B	Baik
3.01 - 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2.51 - 3.00	C	Cukup
2.01 - 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1.51 - 2.00	D	Buruk
1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
0.00 - 1.00	F	Gagal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Grafik Radar

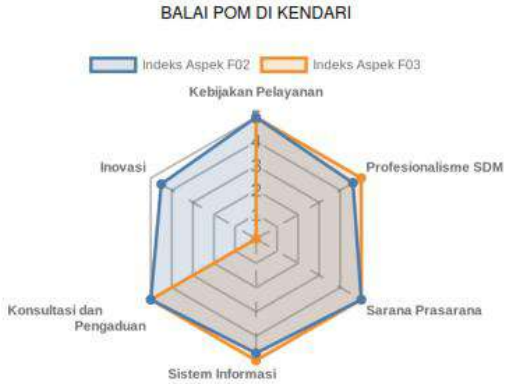

* : Aspek Inovasi pada Formulir F03 tidak dinilai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 17 September 2025

Kepala Balai POM di Kendari	Ketua Tim Penilai
Riyanto, S.Farm, Apt, M.Sc	Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Target IPP Balai POM

No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Balai POM di Tabalong	4,97	4,98	4,99	5,00	5,00
2	Balai POM di Palu	4,95	4,96	4,97	4,98	4,99
3	Balai POM di Sanggau	4,93	4,94	4,95	4,96	4,97
4	Balai POM di Jambi	4,92	4,93	4,94	4,95	4,96
5	Balai POM di Batam	4,91	4,92	4,93	4,94	4,95
6	Balai POM di Sofifi	4,89	4,90	4,91	4,92	4,93
7	Balai POM di Ambon	4,89	4,90	4,91	4,92	4,93
8	Balai POM di Kendari	4,86	4,87	4,88	4,89	4,90
9	Balai POM di Tasikmalaya	4,85	4,86	4,87	4,88	4,89
10	Balai POM di Tulang Bawang	4,84	4,85	4,86	4,87	4,88
11	Balai POM di Pangkal pinang	4,84	4,85	4,86	4,87	4,88
12	Balai POM di Balikpapan	4,84	4,85	4,86	4,87	4,88
13	Balai POM di Bogor	4,84	4,85	4,86	4,87	4,88
14	Balai POM di Bengkulu	4,82	4,83	4,84	4,85	4,86
15	Balai POM di Manokwari	4,81	4,82	4,83	4,84	4,85
16	Balai POM di Surakarta	4,78	4,79	4,80	4,81	4,82
17	Balai POM di Ende	4,76	4,77	4,78	4,79	4,80
18	Balai POM di Mamuju	4,75	4,76	4,77	4,78	4,79
19	Balai POM di Kediri	4,74	4,75	4,76	4,77	4,78
20	Balai POM di Tarakan	4,74	4,75	4,76	4,77	4,78
21	Balai POM di Palopo	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75
22	Balai POM di Bima	4,67	4,68	4,69	4,70	4,71
23	Balai POM di Indragiri Hulu	4,67	4,68	4,69	4,70	4,71
24	Balai POM di Baubau	4,61	4,62	4,63	4,64	4,65
25	Balai POM di Payakumbuh	4,56	4,57	4,58	4,59	4,60
26	Balai POM di Tangerang	4,54	4,55	4,56	4,57	4,58
27	Balai POM di Dumai	4,54	4,55	4,56	4,57	4,58
28	Balai POM di Tanjungbalai	4,38	4,51	4,65	4,79	4,93
29	Balai POM di Jember	4,14	4,26	4,39	4,52	4,66
30	Balai POM di Banyumas	4,10	4,22	4,35	4,48	4,61

Kertas Kerja Indikator Nilai Pembangunan ZI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: B-PI.06.06.7.08.25.312

Yth.	:	Kepala Balai POM di Kendari
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	-
Hal	:	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai POM di Kendari
Tanggal	:	14 Agustus 2025

Berdasarkan
1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2025;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai POM di Kendari.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai POM di Kendari sebesar **87,47** dengan rincian sebagai berikut

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	2,89	3,67	6,56	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,75	2,83	5,58	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,20	4,25	8,45	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,57	4,20	8,77	MS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,50	6,88	13,38	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,14	3,89	8,03	MS
TOTAL PENGUNGKIT						**50,77**	MS
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,72	MS
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,22	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	TMS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,98	MS
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,98	MS
TOTAL HASIL						36,70	MS
NILAI PMPZI						**87,47**	

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Balai POM di Kendari berhasil mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024;
2. Terdapat kebijakan kepala unit kerja terkait mekanisme dan kriteria pemilihan tim pembangunan Zona Integritas (ZI), namun bukti dukung yang disampaikan belum menggambarkan secara jelas bahwa proses pemilihan tim ZI telah sesuai dengan kebijakan kepala unit kerja terkait mekanisme dan kriteria pemilihan tim pembangunan ZI.
3. Dokumen Rencana kerja pembangunan ZI telah memuat target prioritas, namun program prioritas yang telah ditetapkan belum dilengkapi rencana kerja dan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan masing-masing target prioritas tersebut secara berkala;
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan ZI, namun hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI belum seluruhnya ditindaklanjuti dan belum terlihat tindak lanjut atas rencana aksi/saran yang disusun pada pelaporan periode berikutnya;
5. Telah dibentuk Agen Perubahan yang berperan aktif melaksanakan program perubahan dan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kertas Kerja Indikator Nilai AKIP

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: PI.04.71.7.01.26.23

Yth.	:	Kepala Balai POM di Kendari
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	-
Hal	:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025
Tanggal	:	27 Januari 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Balai POM di Kendari Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:
   a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
   c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
   d. Surat Edaran Nomor B-PI.04.7.08.25.320 Tahun 2025 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
   e. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.07.25.136 tanggal 30 Juli 2025 dan Nomor PI.04.7.09.25.166 tanggal 8 September 2025.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
   e. Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja.
4. Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh evaluator yang telah dibekali kompetensi terkait SAKIP.
5. Evaluasi AKIP dilaksanakan melalui proses pengumpulan, analisis, interpretasi data dan informasi sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disajikan pada aplikasi SAPA APIP, Balai POM di Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2024, dari 19 rekomendasi, seluruhnya telah ditindaklanjuti, rincian informasi mengenai tindak lanjut hasil evaluasi dapat dilihat melalui aplikasi SAPA APIP.

C. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai POM di Kendari Tahun 2025 dikategorikan **BB (Sangat Baik)** yaitu Akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	19,20	19,68
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,76	19,68
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	9,84
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	17,02	12,72
Nilai Hasil Evaluasi		100	**80,26**	**78,72**
Predikat			**A**	**BB**

*Rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPA APIP.

Penjelasan singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Balai POM di Kendari telah melaksanakan implementasi perencanaan kinerja berikut:
a. Telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, jangka pendek dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
b. Seluruh dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun telah dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh *stakeholder*.

Namun dalam implementasi perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kelemahan antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kertas Kerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran

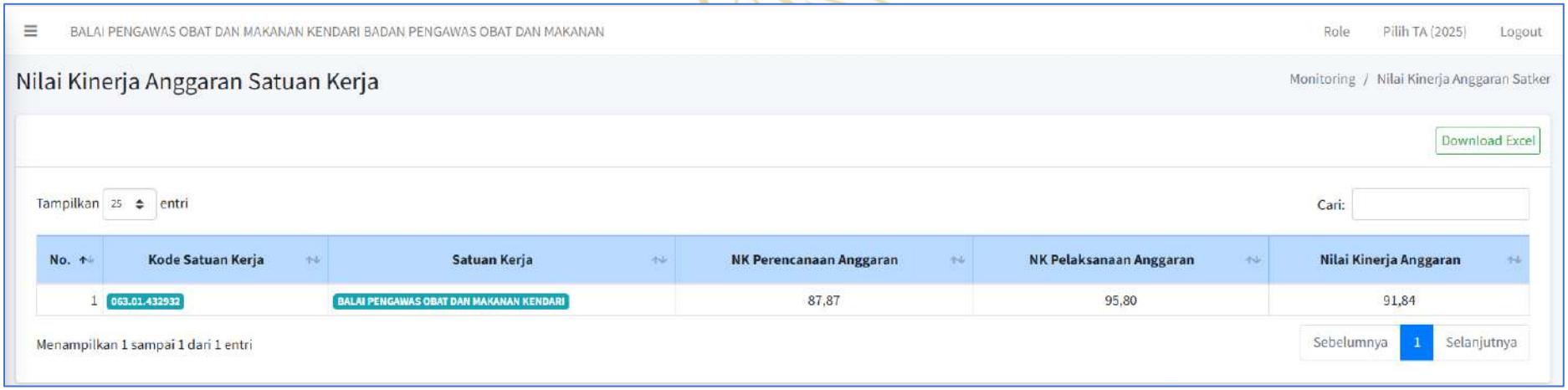

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Role | Pilih TA (2025) | Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	063.01.432932	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	87,87	95,80	91,84

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	060	063	432932	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	Nilai	100.00	79.31	98.90	100.00	100.00	98.89	96.96	95.80	100%	0.00	95.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.90	19.78	10.00	10.00	9.89	24.24				
					Nilai Aspek	89.66		99.45				96.96				

Kertas Kerja Indikator Indeks Manajemen Risiko

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PI.06.07.71.7.01.26.02

Yth.	:	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025
Tanggal	:	02 Januari 2026

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.06.07.7.11.25.220 dan PI.06.07.7.11.25.220 tanggal 4 November 2025.

Bersama ini kami sampaikan nilai tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025 pada 115 (seratus lima belas) Satuan/Unit Kerja yang terdiri dari 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I, 30 (tiga puluh) Unit Kerja Pusat, 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, 3 (tiga) Balai di lingkungan PPPOMN dan 23 (dua puluh tiga) Loka POM.

Rata-rata nilai maturitas manajemen risiko seluruh unit kerja BPOM tahun 2025 sebesar **2,875** atau level ***Risk Aware***, dengan rincian rata-rata per kluster sebagai berikut:

1. Rata-rata nilai Satuan Kerja Eselon I sebesar 3,094 (*Risk Defined);*
2. Rata-rata nilai Unit Kerja Pusat sebesar 3,205 (*Risk Defined);*
3. Rata-rata nilai Balai Besar POM sebesar 2,974 (*Risk Aware);*
4. Rata-rata nilai Balai POM sebesar 2,814 (*Risk Aware);*
5. Rata-rata nilai Balai di lingkungan PPPOMN sebesar 1,948 (*Risk Naive);*
6. Rata-rata nilai Loka POM sebesar 2,491 (*Risk Aware).*

Adapun penjelasan mengenai masing-masing level maturitas manajemen risiko sebagaimana lampiran 1 sedangkan rincian nilai maturitas manajemen risiko Unit Pemilik Risiko tahun 2025 disampaikan sebagaimana lampiran 2.

Berdasarkan hasil evaluasi, catatan implementasi manajemen risiko di lingkungan BPOM secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Hal-hal yang telah diterapkan dengan baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.26.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai POM di Kendari Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	**44,00**	**43,00**	**(1,00)**
Nilai Maturitas	**2,750**	**2,688**	**(0,062)**
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*	*Risk Aware*	

Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikannya akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

BALAI POM DI KENDARI

BALAI POM DI KENDARI

Kompleks Bumi Pradja Anduonohu
Kendari, Sulawesi Tenggara.
Email : bpom.kendari@pom.go.id
Telp. : (0401) 3195513
Facebook,
Instagram,
Tiktok : @bpom.kendari
X : @bpomkendari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).